

ABDUL HAMID PETTA PONGGAWAE

Profil Panglima yang Pantang Menyerah



M U H A M M A D A M I R

ABDUL HAMID PETTA PONGGAWAE

Profil Panglima yang Pantang Menyerah

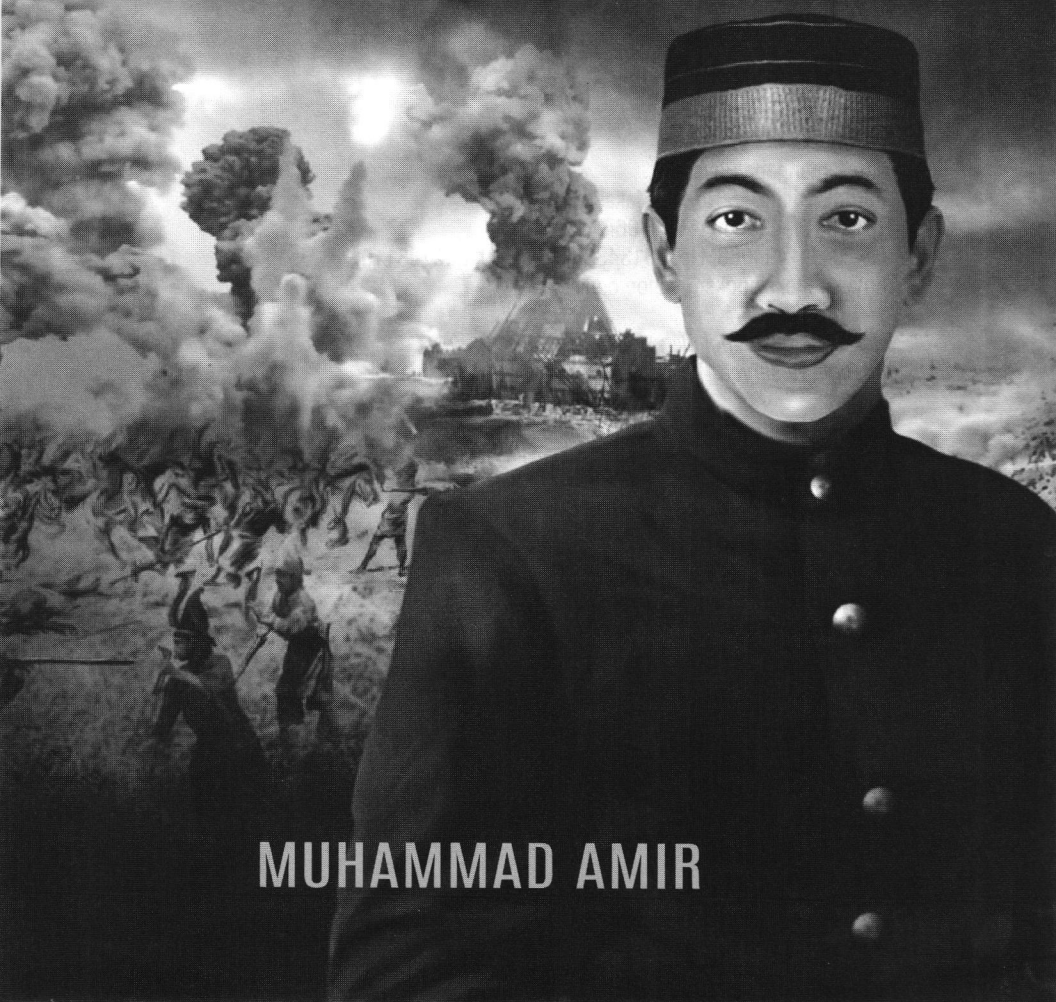
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

**Ketentuan Pidana
Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ABDUL HAMID PETTA PONGGAWAE

Profil Panglima yang Pantang Menyerah



MUHAMMAD AMIR

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abdul Hamid Petta Ponggawae; Profil Panglima yang Pantang Menyerah

Makassar: 2015

xvi + 188 hal.; 14,8 x 21 cm

Hak Cipta © 2015 pada Penulis

Hak penerbitan pada Pustaka Refleksi. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan penerbit Pustaka Refleksi.

Penulis : Muhammad Amir

Editor : Abd. Rahman

Desain Grafis : N. Anjala

Penerbit:

**PUSTAKA
REFLEKSI**

Jln. Tamangapa Raya III

Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235

Telp. 0411-494086 – 5047064.

Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172 - 081342183116

Email: refleksibooks@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Daerah Sulawesi Selatan

Cetakan I, 2015

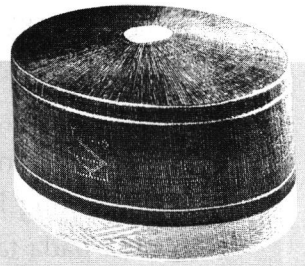
ISBN: 978-979-3570-81-5

Buku ini terbit atas kerjasama:

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar

dengan Penerbit Pustaka Refleksi

PENGANTAR PENERBIT



Kajian tentang sejarah perjuangan bangsa, umumnya bermuatan pada usaha untuk mengungkapkan nilai-nilai perjuangan, baik yang berkaitan dengan jiwa dan semangat kepahlawanan maupun yang berhubungan dengan integrasi bangsa dan pembentukan negara Republik Indonesia. Demikian pula penulis buku ini, berusaha mengungkapkan dan menjelaskan perlawanan Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae dalam menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di daerah Sulawesi Selatan.

Penulis menunjukkan bahwa perlawanan laskar Bone terhadap pasukan Belanda pada awal abad ke-20, bukan hanya menunjukkan sikap patriotisme rakyat Sulawesi Selatan pada umumnya. Tetapi juga merupakan salah satu bukti bahwa tidak benar bangsa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Dalam banyak literatur dan juga arsip yang dibuat di masa itu, penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda hanya ditulis dengan kata “ekspedisi” untuk menekankan bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia, terutama setelah dilakukan Perjan-

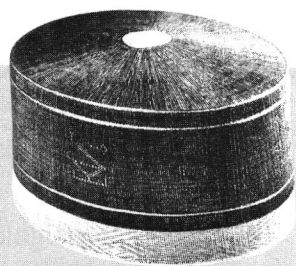
jian London 1824, secara tidak langsung adalah milik pemerintah Hindia Belanda.

Pandangan tersebut tentu saja merupakan suatu kekeliruan dalam sejarah Indonesia. Oleh karena kenyataannya, sejak VOC berkuasa yang kemudian dialihkan kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800, sejarah Indonesia senantiasa diwarnai pergolakan tanpa henti. Itulah sebabnya perlawanan Abdul Hamid Petta Ponggawae menjadi sangat penting dalam memahami sejarah perjuangan menentang kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan. Oleh karena peristiwa itu, tidak hanya dapat memberikan gambaran tentang dinamika semangat perjuangan rakyat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Bone pada khususnya, tetapi juga merupakan suatu fakta bahwa usaha pemerintah Hindia Belanda di dalam memperluas wilayah dan hegemoni kekuasaan senantiasa mendapat perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan.

Akhirnya, pimpinan dan seluruh staf Penerbit Pustaka Refleksi mengucapkan terima kasih kepada penulis Drs. Muhammad Amir, M.Si. dan editor Abd. Rahman, S.Pd., M.Si. serta semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penerbitan ini. Semoga dengan terbitnya buku ini mampu memberikan pencerahan dan pemahaman atas sejarah perjuangan bangsa dalam menentang penjajahan. Sekaligus dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri bangsa dan nilai-nilai patriotisme untuk masa depan yang lebih baik.

Pustaka Refleksi

PENGANTAR EDITOR



Perlawanan rakyat Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae terhadap pemerintah Hindia Belanda pada 1905, merupakan bagian dari mata rantai yang tak terpisahkan dari perjuangan rakyat Sulawesi Selatan dalam menentang pendudukan militer Belanda pada awal abad ke-20. Selain itu, peristiwa ini juga merupakan salah satu perlawanan terbesar yang pernah dilakukan oleh rakyat Bone dalam menentang kekuasaan Belanda di daerah ini. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah Hindia Belanda dalam memperluas wilayah dan hegemoni kekuasaan di daerah ini senantiasa mendapat perlawanan dari rakyat. Sikap anti imperialisme dan kolonialisme yang diperlihatkan oleh rakyat Bone itu, tentu saja meruntuhkan pendapat bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun.

Berdasarkan sejumlah literatur dan juga arsip yang dibuat pada masa itu, penyerangan yang dilakukan oleh Belanda hanya ditulis dengan kata “ekspedisi” untuk menekankan bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia, terutama setelah dilakukannya Perjanjian London 1824, secara tidak langsung adalah milik pemerintah Hindia Belanda. Hal yang demikian itu bukan hanya

mengabaikan realitas yang sesungguhnya, melainkan juga merupakan kekeliruan dalam sejarah Indonesia. Oleh karena kenyataannya, sejak Kompeni Belanda (VOC) berkuasa dan kemudian dialihkan kepada Pemerintah Hindia Belanda pada 1800, sejarah Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya dipenuhi pergolakan tanpa henti atau senantiasa diwarnai perlawanan terhadap Belanda.

Fakta-fakta historis mengenai peristiwa itu, menunjukkan bahwa bukan hanya rakyat biasa yang turut berjuang melainkan juga para bangsawan yang senantiasa memimpin rakyatnya dalam menentang kekuasaan Belanda. Buktinya lebih dari 1000 orang laskar Bone gugur sebagai kusuma bangsa di medan pertempuran, termasuk sekitar 100 orang dari kalangan bangsawan tinggi Bone. Perjuangan dan penentangan rakyat Bone terhadap Belanda tersebut, merupakan bentuk semangat heroisme yang perlu terus ditumbuhkembangkan dalam masyarakat kita dewasa ini. Oleh karena ungkapan bahwa sejarah adalah guru kehidupan, mengandung kebenaran yang agak sulit terbantahkan. Sejarah lokal di Sulawesi Selatan merupakan sumber nilai dan kearifan yang perlu diwarisi dan diejawantahkan oleh generasi masa kini dan yang akan datang.

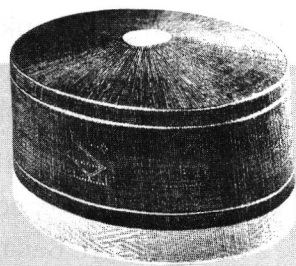
Sesungguhnya perlawanan Bone yang dipimpin oleh Abdul Hamid Petta Ponggawae telah banyak tulis orang. Namun peristiwa heroik yang mengandung makna historis tersebut, belum terungkap secara utuh. Oleh karena itu, perlawanan Bone yang merupakan salah satu mata rantai yang terpisahkan dalam perjuangan menentang pendudukan militer Belanda di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20 tersebut, patut diberi apresiasi. Sebab, akurasi data dan fakta kesejarahan yang dikemukakan penulis semakin melapangkan upaya mengungkapkan peristiwa

itu secara utuh. Selain itu, juga karena peristiwa ini bukan hanya patut direnungkan dan dipahami di dalam membangun jati diri dan persatuan bangsa, tetapi juga dapat memberikan pengetahuan yang amat berarti untuk meningkatkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makassar, Maret 2015

Abd. Rahman, S.Pd., M. Si.

PENGANTAR PENULIS



Buku ini diangkat dari laporan hasil penelitian penulis, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian rutin Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar. Secara spesifik buku ini memuat uraian tentang latar belakang kehidupan dan perlawanan Abdul Hamid Petta Ponggawae dalam menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Selain itu, juga mengungkapkan dan menjelaskan tentang pasang surut perlawanan laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae terhadap pasukan Belanda dari awal hingga akhir. Pada bagian akhir buku ini juga memuat uraian tentang perubahan sosial, khususnya perubahan politik dan hubungan kekuasaan pada Kerajaan Bone pasca perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Buku ini tidak akan pernah terwujud seperti apa adanya sekarang, tanpa dorongan, bantuan, dan kebaikan hati dari semua pihak, baik sebagai instansi maupun sebagai pribadi. Untuk itu, pada tempatnyalah saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Dra. Lindyastuti Setiawati, MM. yang

telah memberikan kesempatan dan kepercayaan serta arahan dan bimbingan, mulai dari tahap awal proses penelitian hingga terwujudnya buku ini.

Ucapan terima kasih yang sama saya haturkan sedalam-dalamnya kepada Dr. Edward Lambertus Poelinggomang selaku konsultan. Beliau dalam kesibukannya, tetap berupaya meluangkan waktunya untuk memeriksa dan menelaah serta memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis untuk membenahi dan mewujudkan tulisan ini. Oleh karena tanpa bantuan dan kebaik-an hati beliau, pastilah buku ini tidak akan pernah terwujud un-tuk sampai kepada pembaca sebagaimana adanya sekarang.

Pernyataan terima kasih saya tujukan pula kepada Abd. Rahman, S.Pd.,M.Si. yang dalam kesibukannya mendidik anak bangsa, beliau masih bersedia meluangkan waktunya yang berharga untuk membaca dan mengedit buku ini. Banyak saran dan kritikan berharga yang saya peroleh dari beliau. Kebaikan hati dan keramahannya di dalam memberikan petunjuk yang amat berharga pada saya, tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga Allah senantiasa memberikan kejernihan pikiran dan ke-sehatan yang baik, sehingga beliau selalu mampu untuk mem-bimbing generasi-generasi terdidik bangsa di masa mendatang.

Terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Peme-rintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta, Kepala Per-pustakaan Nasional Jakarta, dan Kepala Badan Arsip dan Per-pustakaan Propinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh stafnya masing-masing yang telah bermurah hati membantu saya selama melakukan penelitian. Ucapan yang sama juga kepada pimpinan dan seluruh staf Penerbit Pustaka Refleksi Makassar. Sebab, tanpa bantuan mereka semua, saya yakin tidak dapat mengumpulkan

bahan yang dibutuhkan dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

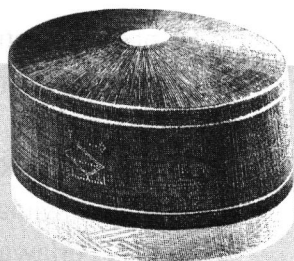
Pada ruang terbatas ini, penulis juga seharusnya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peneliti dan seluruh staf Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, serta kerabat dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tak ternilai. Atas semua kebaikan hati mereka itu, tidak akan pernah saya lupakan dan tentu tidak dapat saya balas hanya dengan ucapan terima kasih. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah swt, atas segala amal kebbaiknya.

Akhirnya, buku ini saya persembahkan kepada mereka semua sebagai wujud dari penghargaan dan terima kasih saya. Walaupun demikian, semua kesalahan dan kekurangan buku ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik dari pembaca yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis demi kesempurnaan buku ini.

Makassar, Juli 2015

Penulis

ISI BUKU



Pengantar Penerbit • v

Pengantar Editor • vii

Pengantar Penulis • xi

Isi Buku • xv

PENDAHULUAN • 1

SELAYANG PANDANG KERAJAAN BONE • 19

Sejarah Singkat Kerajaan Bone • 20

Geografi dan Demografi • 29

Kedaaan Sosial Budaya Masyarakat • 35

Kehidupan Ekonomi dan Politik di Bone • 45

LATAR BELAKANG KELUARGA DAN PERLAWANAN ABDUL
HAMID PETTA PONGGAWAE • 57

Lingkungan Keluarga • 59

Sekilas Hubungan Bone Dengan Belanda • 72

Campur Tangan Belanda Terhadap Bone • 83

Munculnya Antipati Terhadap Belanda • 94

Persiapan dalam Menyongsong Perang • 99

DINAMIKA PERLAWANAN ABDUL HAMID • 113

Awal perlawanan • 115

Puncak Perlawanan • 121

Perjalanan Panjang Ke Utara • 133

Gugurnya Abdul Hamid Petta Ponggawae • 145

KESIMPULAN • 157

Daftar Pustaka • 165

Indeks • 171

Lampiran • 179

Tentang Penulis • 187

PENDAHULUAN



Penulisan biografi atau riwayat hidup seorang tokoh pejuang atau pemimpin telah berkembang dengan pesat, terutama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun masih banyak di antara para pemimpin atau tokoh-tokoh pejuang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, terutama yang telah berjuang sejak zaman penjajahan Belanda tidak lagi dikenal oleh masyarakat mengenai jasa-jasanya karena biografi tentang dirinya tidak pernah ditulis atau terungkap di masyarakat. Jelas, konsekuensinya adalah suatu kerugian besar bagi masyarakat. Sebab, peranan mereka sebagai pemimpin bangsa, sebagai pejuang di zaman penjajahan atau di zaman revolusi, sebagai pemimpin politik di masyarakat, atau sebagai pembaharu di zaman kemerdekaan, dan lain-lain, tidak lagi banyak dikenal oleh bangsa kita. Itulah sebabnya Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno memperingatkan, bahwa “hanya bangsa yang tahu menghormati dan menghargai jasa para pahlawannya yang dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar”.¹

¹ Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 110. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menghormati dan menghargai jasa seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang bertujuan menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar ataupun telah berjasa baik di bidang politik, ketatanegaraan, sosial ekonomi, kebudayaan, maupun di bidang ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan bangsa, adalah dengan meneliti dan menulis biografinya.

Salah satu tokoh pejuang dari Sulawesi Selatan yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah Abdul Hamid Petta Ponggawae. Sebab, tokoh pemimpin ini bukan hanya sebagai panglima perang yang pantang menyerah terhadap pasukan Belanda, tetapi juga seorang pejuang yang rela mengorbankan jiwanya dalam mempertahankan kehormatan serta dalam membela martabat dan kedaulatan bangsa dan tanah airnya. Selain itu, juga karena tokoh pejuang ini mempunyai peran penting dalam perlawanan menentang Belanda yang bergiat memperluas wilayah kekuasaan kolonialnya di daerah Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Sebagaimana diketahui bahwa perluasan wilayah kekuasaan pemerintah Belanda itu, bukan hanya dimasukkan untuk menguasai secara langsung seluruh daerah Sulawesi Selatan, tetapi juga dimaksudkan untuk mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya pada kerajaan-kerajaan di daerah Sulawesi Selatan.²

Untuk mewujudkan rencana perluasan wilayah kekuasaan tersebut, pemerintah Belanda mempersiapkan pasukan pendudukan atau eskpedisi militer guna menaklukkan dan memaksa kerajaan-kerajaan di daerah Sulawesi Selatan yang tidak mau menyerahkan kekuasaannya atau yang belum dikuasai secara langsung. Penyerahan kekuasaan itu ditandai dengan pernyataan tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya di bawah kekuasaan pemerintah Belanda dengan menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*). Pada waktu itu, kerajaan-kerajaan di daerah Sulawesi Selatan yang belum dikuasai secara langsung dan dianggap sebagai kerajaan sekutu atau pinjaman berdasarkan Kontrak Bungaya yang diperbaharui, antara lain Gowa, Bone, Luwu,

² Abduh, Muhammad, dkk., 1985, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 93; Harvey, Barbara S. 1989, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti, hlm. 45.

Wajo, Soppeng, Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, Alitta, dan kerajaan-kerajaan di daerah Mandar. Oleh karena kerajaan-kerajaan itu menolak pernyataan pendek, sehingga menjadi sasaran dari rencana ekspedisi militer Belanda pada 1905.³

Selain itu, juga karena rakyat Sulawesi Selatan di bawah pimpinan raja-raja terkenal sebagai penentang yang gigih terhadap kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan dalam menentang kekuasaan Belanda, bukan hal yang baru tampak setelah ekspedisi militer Belanda pada 1905. Tetapi jauh sebelumnya, yaitu sejak kehadiran dan usaha VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) untuk menguasai perdagangan maritim di kawasan timur Nusantara pada abad ke-17, tindakan penolakan atau perlawanan terhadap VOC senantiasa terjadi. Bahkan menjelang akhir abad ke-19, ketika pemerintah Belanda mulai menampakkan keinginannya untuk menguasai seluruh daerah Sulawesi Selatan, telah timbul banyak sekali gerakan perlawanan. Itulah sebabnya menjelang akhir abad ke-19, daerah Sulawesi Selatan dijuluki “pulau keonaran” (*de onrust eiland*) oleh Belanda.⁴

Kenyataan itulah yang mendasari pemerintah Belanda dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan kolonialnya di daerah ini, berkesimpulan bahwa satu-satunya pemecahan terhadap “keresahan” yang menyusahkan Belanda, yang sudah berlangsung bertahun-tahun di daerah Sulawesi Selatan, ialah “kampanye pengamanan” atau penaklukan secara militer, yang secara

³ Kadir, Harun, dkk., 1984, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Pemda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dan Unhas, hlm. 46. Namun dalam perkembangannya Kerajaan Bone, Wajo, dan Tanete berubah menjadi kerajaan pinjaman (*leen voerstendom*).

⁴ PaEni, Mukhlis, dkk., 2002. *Batara Gowa: Messianisme Dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 2; Harun, Kadir, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 61.

halus disebut dengan *pacificatie politiek* (politik perdamaian).⁵ Oleh karena itu, Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya (*Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden*), Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906), memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat di Batavia (surat tertanggal 11 Februari 1904) untuk melakukan tindakan militer terhadap Bone dan Luwu. Sebab kedua kerajaan itu, bukan hanya memiliki pengaruh kuat dan gigih menentang rencana kebijakan pelabuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan, tetapi juga menolak menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*).⁶ Menurut Gubernur Kroesen bahwa demi menegakkan dan mempertahankan kewibawaan pemerintah Belanda, serta untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan para penguasa, dan persetujuan terhadap tuntutan-tuntutan pemerintah Belanda harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan.⁷

Sesungguhnya usaha perluasan wilayah kekuasaan pemerintah Belanda melalui tindakan militer, mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Joannes Benedictus

⁵ Serupa dengan kampanye atau tindakan militer yang dilancarkan dengan sukses terhadap Aceh (Harvey, Barbara S. 1989, *op., cit.*, hlm. 46). Untuk memperoleh gambaran lebih lanjut tentang penaklukan Aceh terdapat dalam karya Anthony Reid, 2007. *Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁶ Pada dasarnya isi *korte verklaring* itu, ialah pernyataan kesetiaan kepada Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, setuju untuk tidak mengadakan hubungan dengan kekuatan-kekuatan asing, dan berjanji untuk melaksanakan semua peraturan dan perintah yang sudah atau mungkin akan ditetapkan oleh Ratu, Gubernur Jenderal atau wakilnya. Dari pernyataan itu, tampak dengan jelas bahwa pemerintah Hindia Belanda bermaksud untuk menguasai secara langsung seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kroesen, C.A. 1906, *Memorie van Overgave van het Bestuur Over het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*, hlm. 9; Harvey, Barbara S. 1989, *op., cit.*, hlm. 46-47.

⁷ *Ibid.*; Itulah sebabnya setelah situasi di Aceh dapat dikendalikan, perhatian dialihkan ke Sulawesi Selatan pada awal tahun 1905, yang antara lain karena pemerintah Hindia Belanda ingin segera menyelesaikan hambatan yang dihadapinya dalam merealisasikan kebijakan wajib pajak di Sulawesi Selatan (Poelinggomang, Edward L., 2002. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 91-92; Harvey, 1989: 46-48).

van Heutzs (1904-1909). Sebab, ketika Van Heutzs tampil menggantikan W. Rooseboom (1899-1904) sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1 Oktober 1904, ia mulai mencanangkan suatu kebijakan baru ke arah penguasaan daerah jajahan yang lebih intensif, dengan tujuan pokok ialah menguasai secara langsung seluruh wilayah Kepulauan Indonesia (Hindia Belanda), yang antara lain agar supaya terhindar dari kemungkinan campur tangan bangsa asing lainnya.⁸

Sehubungan dengan kebijakan itu, Gubernur Sulawesi Kroesen, kemudian mengajukan saran kepada Gubernur Jenderal Van Heutzs pada April 1905, agar dilakukan tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang menolak tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda, termasuk terhadap Gowa karena dianggap tidak mentaati perjanjian yang telah ditandatangani dan mengirim sejumlah pasukan bersenjata untuk membantu Sawitto, suatu daerah yang bangkit memberontak terhadap kekuasaan pemerintah Belanda. Menanggapi usul itu, Gubernur Jenderal Van Heutzs dalam pertimbangan dan sasarannya, menyatakan bahwa harus bersikap hati-hati agar tidak memancing timbulnya perlawanan dan menghindari kesan bahwa pemerintah Belanda hanya mencari-cari alasan untuk menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan, dan tindakan militer yang pertama-tama harus dilakukan terhadap Bone karena dianggap sebagai "kerajaan yang paling kuat dan yang paling berbahaya" atau berpengaruh.⁹

Berdasarkan saran dan pertimbangan itu, Gubernur Sulawesi Kroesen setuju bahwa Bone merupakan kerajaan yang paling

⁸ Kies, Ch. 1935. *De Expeditie naar Zuid Celebes in 1905*. J.G. BGNI, hlm. 827-830; Kadir, 1984, *op. cit.*, hlm. 45.

⁹ Kroesen, 1906, *Memori van Overgave*; Harvey, 1989, *op. cit.*, hlm. 47-48.

kuat dan berpengaruh di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ketika itu. Selain itu, juga karena “sikapnya yang dianggap kurang ajar” yang didasarkan atas kenyataan bahwa kerajaan ini sesungguhnya berstatus sebagai kerajaan pinjam-an, namun berani menolak tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda untuk menguasai pelabuhan BajoE dan Pallime.¹⁰ Sebelum tindakan militer terhadap Bone dilaksanakan, Gubernur Kroesen terlebih dahulu menyampaikan surat kepada Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri (surat tertanggal 21 Juni 1905). Untuk menyampaikan surat itu, maka berangkatlah dengan kapal suatu rombongan dari Makassar menuju ke Bone. Rombongan yang terdiri dari Residen Brugman, Kontrolleur Goedhart, dan Cramer sebagai juru bahasa tiba di BajoE pada 22 Juni 1905. Dengan tiga buah kapal perang berjaga-jaga di lepas pantai, mereka segera menyampaikan surat itu kepada raja Bone, yaitu agar menandatangani penyerahan wilayahnya kepada pemerintah Belanda, menyetujui ganti rugi penarikan pajak ekspor dan impor, serta mengakui hak pemerintah Belanda untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi guna mengatur dan mengawasi pelabuhan.¹¹

Tuntutan pemerintah Belanda itu, bukan hanya ditolak dengan tegas oleh Bone, melainkan juga disambut dengan usaha mem-

¹⁰ Menurut Kroesen, bahwa demi untuk menegakkan dan mempertahankan kewibawaan pemerintah Belanda, dan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan para penguasa bumiputra, serta persetujuan terhadap tuntutan-tuntutan pemerintah Belanda harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan (Kroesen, 1906, *Memori van Overgave*, *op. cit.*, hlm. 9; Harvey, 1989, *op. cit.*, hlm. 48).

¹¹ Dalam hal penyerahan wilayah kekuasaan Kerajaan Bone kepada pemerintah Hindia Belanda tersebut, suatu kontrak baru, yaitu *korte verklaring* (pernyataan pendek) diajukan untuk diperiksa dengan teliti dan harus ditandatangani. Setelah tuntutan itu dipertimbangkan oleh raja Bone bersama dewan *Ade Pitu* serta para pembesar Kerajaan Bone lainnya, maka disampaikanlah surat balasan penolakan atas tuntutan itu kepada pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Juni 1905 (Harvey, 1989, *op. cit.*, hlm. 48; Poelinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 93; Abduh, 1985, *op. cit.*, hlm. 99-100).

persiapkan diri dan memperkuat posisi kekuatan laskarnya untuk menghadapi pasukan Belanda. Di samping sibuk membenahi pertahanan di dalam negeri, Abdul Hamid Petta Ponggowae juga segera menyampaikan seruan perang (*bila-bila musu'*) ke seluruh pelosok wilayah kekuasaan Bone. Bahkan *bila-bila musu'* itu, juga disampaikan kepada kerajaan-kerajaan tetangga antara lain Gowa, Soppeng, Wajo, Sidenreng, dan lain-lain. Kepada semua panglima pertahanan daerah (*dulung*), *arung palili* (raja bawahan atau taklukan), dan para pemimpin pasukan lainnya, diperintahkan segera berkumpul di Lalebbata-Watampone untuk menerima perintah penugasan. Sejumlah besar laskar Bone ditempatkan di sepanjang pesisir pantai, mulai dari Ujung Pattiro di bagian selatan sampai dengan muara Sungai Cenrana atau Pallime di sebelah utara. Selain itu, Bone juga segera melakukan mobilisasi umum untuk menggalang persatuan dan kesatuan rakyat dalam rangka menghadapi pasukan Belanda. Dukungan rakyat terhadap kebijakan raja dan para pemimpinnya itu tidak perlu diragukan lagi. Sebab, "budaya panutan" masih sangat kuat berperan dalam kehidupan masyarakat ketika itu, sebagaimana tercermin dalam ungkapan di masyarakat bahwa "*polo pang polo panni assaleng puakku mua, narekko naposiri'ni puatta, napomateni tu jowana*" (saya merelakan paha dan sayap atau tangan saya patah, asalkan di dalam membela rajaku atau pemimpinku, kalau rajaku atau pemimpinku sudah merasakan sesuatu yang memalukan, maka rakyat pengikutnya sudah harus bersedia mati).¹²

Penolakan Bone terhadap tuntutan yang diajukan kepadanya dan persiapan-persiapan dalam menyongsong perang melawan pasukan Belanda tersebut, mendorong pemerintah Belanda

¹² Gonggong, Anhar, 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 87; Abduh, 1985, *op. cit.*, hlm. 101; Ali, Muhammad, 1984. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Damai, hlm. 16.

segera memerintahkan persiapan pemberangkatan pasukan pendudukan atau ekspedisi militernya ke Sulawesi Selatan. Ekspedisi militer Belanda yang telah dibentuk sebelumnya itu bertujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang menolak tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda dan mendapat tugas pertama untuk menaklukkan Bone. Pasukan dari Jawa Barat diberangkatkan melalui Tanjung Priok, pasukan dari Jawa Tengah diberangkatkan melalui Semarang, dan pasukan dari Jawa Timur diberangkatkan melalui Surabaya. Semua armada pasukan yang diberangkatkan itu, berlayar menuju suatu tempat yang telah ditentukan, yaitu harus berkumpul di Pelabuhan Bulukumba. Kemudian, dari Bulukumba mereka meneruskan pelayaran menuju BajoE, sebuah pelabuhan yang cukup aman yang terletak di Teluk Bone.¹³

Ekspedisi militer Belanda di bawah pimpinan Kolonel Infantri C.A. van Loenen, dengan kekuatan puluhan kapal perang dan pengangkut pasukan tiba di perairan BajoE pada 18 Juli 1905. Keesokan harinya, pimpinan ekspedisi militer Belanda Kolonel C.A. van Loenen, mengirim utusan untuk menyampaikan ultimatum terakhir kepada raja Bone, agar menerima semua tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda dalam waktu 24 jam. Oleh karena batas waktu yang ditentukan berlalu tanpa ada jawaban yang memuaskan dari Bone, maka pimpinan ekspedisi militer Belanda segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan pendaratan pasukan yang disertai dengan tembakan-tembakan meriam untuk menaklukkan Bone pada 21 Juli 1905.¹⁴

¹³ Poelinggomang, Edward L., 1980. *Perlawanan Rakyat Gowa Terhadap Pendudukan Belanda*. Yogyakarta: Tesis Sarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 59; Kadir, 1984, *op. cit.*, hlm. 46.

¹⁴ Mattulada, 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, hlm. 373; Kadir, 1984, *op. cit.*, hlm. 47; ; Harvey, 1989, *op. cit.*, hlm.48.

Pendaratan pasukan Belanda itu mendapat perlawanan sengit dari laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae, sehingga terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Abdul Hamid harus memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin atau panglima perang (*petta ponggawa*) di mata rakyat yang dipimpinnya karena serangan militer yang dilancarkan oleh pasukan pemerintah Belanda terhadap bangsa dan tanah airnya. Dengan semangat perjuangan yang pantang menyerah, *kualleanggi tallanga na towalia* (lebih baik tenggelam daripada balik haluan), dan dukungan penuh dari rakyat yang dipimpinnya, Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama para pembesar kerajaan lainnya, tampil ke medan juang untuk melakukan perlawanan mati-matian hingga tetesan darah yang terakhir, demi untuk membela martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Laskar Bone di bawah pimpin Abdul Hamid Petta Ponggawae yang mendapat bantuan pasukan dari Gowa, Wajo, Soppeng, dan Sidenreng, memberikan perlawanan habis-habisan terhadap pendaratan dan serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda. Namun setelah pertarungan sengit antara kedua belah pihak berlangsung kurang lebih dua minggu, pasukan Belanda akhirnya berhasil merebut dan menduduki pertahanan Bone secara berturut-turut, yaitu Ujung Pattiro (21 Juli), BajoE (27 dan 28 Juli), Watampone (30 Juli), dan Pasempe (3 Agustus 1905). Kekalahan beruntun yang dialami oleh laskar Bone tersebut, memaksa dewan peperangan memutuskan untuk mengungsikan raja Bone ke daerah pedalaman yang lebih jauh. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama laskarnya yang setia terpaksa harus keluar dari wilayah kekuasaan Bone untuk melanjutkan perlawanan terhadap pasukan

Belanda.¹⁵

Meskipun pasukan Belanda telah berhasil merebut dan menguasai pusat pertahanan laskar Bone di BajoE, Watampone, dan Pasempe, tetapi mereka masih merasa belum mencapai sukses yang sepenuhnya. Sebab, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama para pembesar kerajaan lainnya belum berhasil ditawan dan dipaksa untuk mengakui kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, pimpinan ekspedisi militer Belanda, selain mempersiapkan pasukan khusus untuk mengejar dan menangkap raja Bone, juga mempersiapkan penyerangan ke daerah-daerah pedalaman. Pasukan Belanda yang melancarkan serangan ke daerah pedalaman, secara berturut-turut berhasil menduduki daerah Ulaweng (3 Agustus), Tanjung (4 Agustus), Otu, Manapotu, Amali, dan Palongki (5 Agustus), serta Laliku dan Kalu (6 Agustus 1905). Sementara pasukan khusus yang melakukan pengejaran terhadap raja Bone, berhasil merebut daerah Cinennung dan Gottang (5 Agustus 1905), setelah terlebih dahulu terlibat pertempuran dengan laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggowae yang senantiasa mengawal raja Bone dalam pengungsian. Kemudian pasukan Belanda terlibat pertempuran dengan laskar Bone di Pegunungan Ponre dan kehilangan jejak mengenai keberadaan raja Bone bersama pengawalinya sejak pertempuran itu. Lalu pasukan Belanda kembali ke Watampone pada 6 Agustus 1905.¹⁶

¹⁵ Daeng Patunru, Abd. Razak, dkk., 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 278-279; Kadir, 1984, *op. cit.*, hlm. 48; Arfah, Muhammad, 1977. *Baso Pagilingai Abdul Hamid Panglima Perang Kerajaan Bone Melawan Belanda*. Ujung Pandang: Depdikbud, hlm. 38-40; Ali, Muhammad, 1984, *op. cit.*, hlm. 21-27.

¹⁶ Arung Manadjeng, Andi Malla, 1967. *Transliterasi Lontarak Tolo Rumpakna Bone (Perang Bone 21 Juli 1905)*. Watampone: Tim Penelitian Sejarah Bone, hlm. 39-40; Daeng Patunru, 1989, *op. cit.*, hlm. 280; Kadir, 1984, *op. cit.*, hlm. 49; Arfah, 1977, *op. cit.*, hlm. 42-43; Ali, Muhammad, 1984, *op. cit.*, hlm. 30-31.

Pimpinan ekspedisi militer Belanda baru memperoleh berita yang pasti pada September 1905, bahwa raja Bone bersama pengikutnya sedang berada di daerah Wajo (Pitumpanua). Itulah sebabnya setelah pasukan Belanda berhasil menangkap anggota dewan *Ade Pitu* dan memaksa menandatangani “pernyataan pendek” serta mengakui pemerintah Belanda sebagai pemerintah yang sah atas Bone, pimpinan ekspedisi militer Belanda Kolonel C. A. van Loenen memindahkan pusat komando operasi militernya ke Pompanua pada 24 Agustus 1905. Selain bertujuan untuk mengejar dan menangkap raja Bone, juga untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya yang telah membantu Bone. Pasukan khusus Belanda yang melakukan pengejaran terhadap raja Bone akhirnya berhasil mengepung Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama pengawalnya di Pegunungan Awo, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat menentukan pada 18 November 1905. Pada pertempuran mati-matian hingga tetesan darah yang terakhir tersebut, Abdul Hamid Petta Ponggawae gugur sebagai kusuma bangsa bersama puluhan laskar Bone. Sementara raja Bone ditangkap dan kemudian diasingkan ke Bandung oleh pemerintah Belanda.¹⁷

Perlawanan laskar Bone di bawah pimpinan Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggawae dalam menentang pendudukan militer Belanda tersebut, kemudian dikenal dengan Perang Bone 1905. Perang ini bukan hanya merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dilakukan oleh Bone dalam menentang kekuasaan Belanda, tetapi juga merupakan salah satu mata rantai perjuangan dalam menentang

¹⁷ Patang, Lajadjdji, 1976. *Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia (YKGM), hlm. 26; Kadir, 1984, *op. cit.*, hlm. 50; Arfah, 1997, *op. cit.*, hlm. 45; Daeng Patunru, 1989, *op. cit.*, hlm. 285; Ali, Muhammad, 1984, *op. cit.*, hlm. 39.

pendudukan militer Belanda di daerah Sulawesi Selatan. Selain itu, juga merupakan suatu fakta bahwa upaya pemerintah Belanda dalam memperluas hegemoni kekuasaan di daerah ini, senantiasa mendapat perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan. Namun perlawanan yang dipimpin oleh kedua tokoh pejuang tersebut, masih kurang mendapat perhatian dari para penulis dan belum terungkap secara utuh,¹⁸ sehingga tidak menutup kemungkinan peranan Abdul Hamid Petta Ponggowae dalam peristiwa yang mempunyai makna penting dalam sejarah perjuangan bangsa menentang kekuasaan pemerintah Belanda, tidak lagi dikenal atau kurang diketahui secara luas di masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan dalam kajian ini, adalah mengapa Abdul Hamid Petta Ponggowae berani melawan pasukan militer Belanda dan bagaimana sesungguhnya peranan Abdul Hamid dalam perjuangan menentang kekuasaan pemerintah Belanda pada waktu itu? Dari rumusan persoalan tersebut, nampaklah dengan jelas bah-

¹⁸ Kendatipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa sudah ada beberapa penelitian tentang perjuangan Abdul Hamid dalam perjuangan menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, antara lain "Baso Pagilingi Abdul Hamid Panglima Besar Kerajaan Bone Melawan Belanda" oleh Muhammad Arfah dan Perjuangan Baso Pagilingi Abdul Hamid Menentang Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Kerajaan Bone Pada Tahun 1905. Tetapi karya-karya itu masih bersifat deskriptif yang masih terbatas atau belum memberikan gambaran secara kronologis sebagaimana mestinya. Maksudnya, sesungguhnya suatu karya biografi tidak hanya mengisahkan riwayat hidup, pekerjaan, dan kehidupan keluarganya, tetapi pada hakekatnya juga dapat memberikan gambaran menyangkut sejarah kehidupan masyarakat lingkungannya, komponen-komponen lain di masyarakat, kondisi politik pada waktu itu, sistem sosial di masyarakat ketika itu, dan lain-lain. Sebagai karya yang masih bersifat deskriptif, tentu saja tidak dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai latar belakang perlawanan Abdul Hamid dan jawaban atas pertanyaan "mengapa" ia berani menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Kajian-kajian lainnya mengenai Abdul Hamid juga, masih bersifat spasial, karena hanya merupakan bagian dari berbagai karya tulis, seperti Sejarah Perjuangan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan oleh Muhammad Abduh, dkk., Sejarah Bone oleh Abd. Razak Daeng Patunru, Rumpa'na Bone (Perang Bone) 1905 oleh Andi Muhammad Ali, Bone Selayang Pandang oleh Andi Muhammad Ali, Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya oleh Lahadjdji Patang, dan lain-lain.

wa kajian ini tidak hanya berusaha untuk mengungkapkan apa yang terjadi dan kapan terjadinya perjuangan Abdul Hamid Petta Ponggawae, tetapi juga berusaha untuk mengungkapkan dan menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu sesungguhnya. Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan sebab musabab serta faktor kondisional yang ada dan berkembang pada waktu itu atau yang mendasari terjadinya perjuangan atau perlawanan itu.

Sehubungan dengan itu, kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menghargai dan menghormati jasa-jasanya, tetapi juga bertujuan untuk menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para tokoh pejuang atau pemimpin yang berguna sebagai suri teladan bagi generasi penerus demi kesinambungan perjuangan bangsa dan negara dalam mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Patut dikemukakan bahwa penulisan riwayat hidup seorang tokoh pejuang, selain menuturkan secara kronologis kejadian-kejadian penting dalam kehidupan seseorang atau tidak hanya sekedar mengisahkan riwayat hidupnya, pekerjaan dan kehidupan keluarganya. Tetapi pada hakekatnya, juga menyangkut sejarah kehidupan masyarakat lingkungannya, komponen-komponen lain di masyarakat, kondisi politik pada waktu itu, peranannya sebagai pemimpin, sistem sosial yang berlaku pada masa itu, dan lain-lain. Dengan demikian, maka penelusuran kembali perjalanan hidup dan kehidupan seorang tokoh pejuang atau pemimpin, bertujuan untuk mengungkapkan tabir atau nilai-nilai

yang selama ini seolah-olah menutupi diri mereka yang sebenarnya, bagaimana mereka hidup, mengembangkan diri, berintegrasi dengan masyarakat zamannya, serta memberikan refleksi dan sumbangan kepada jalannya sejarah.

Sementara kegunaan kajian ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data kesejarahan, dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang masa lampau yang mempunyai makna penting dan amat berguna di dalam membangun kekinian dan hari esok. Dengan tersedianya data dan informasi kesejarahan mengenai perjuangan Abdul Hamid Petta Ponggowae dalam menentang pendudukan militer Belanda pada 1905, maka kegunaannya bukan hanya dapat melapangkan jalan bagi kajian lebih lanjut dan mendalam tentang perjuangan itu, tetapi juga sebagai bahan informasi kesejarahan di kalangan masyarakat pada umumnya.

Adapun ruang lingkup kajian ini adalah berlokasi di wilayah kekuasaan Bone ketika itu dan daerah-daerah lain yang ada kaitannya di wilayah Sulawesi Selatan. Sedangkan batasan temporalnya, ialah sejak lahirnya Abdul Hamid Petta Ponggowae sampai gugurnya sebagai kusuma bangsa pada pertempuran mati-matian di Pegunungan Awo (Tanah Toraja) pada 18 November 1905. Pembatasan yang jelas diperlukan karena suatu penelitian dan penulisan dapat bermanfaat jika dilakukan secara terbatas, baik dilihat dari segi geografis maupun dari waktu berlangsungnya perjuangan Abdul Hamid Petta Ponggowae dalam menentang pendudukan militer Belanda pada waktu itu. Dengan mengambil lokasi dan jarak waktu tertentu, maka kita dapat memperoleh batasan geografis dan temporal yang secara jelas.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penelusuran dari masa sebelumnya, yang merupakan proses historis tidak

dapat diabaikan. Oleh karena perjuangan Abdul Hamid Petta Ponggowae dalam menentang pendudukan militer Belanda ketika itu, adalah merupakan rangkaian dan akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Atau dengan perkataan lain bahwa perjuangan atau perlawanan itu terjadi, adalah sebagai akibat dari faktor kondisional yang mendahuluinya. Hal ini dimaksudkan agar sebab musabab dan faktor kondisional yang mendasari terjadinya perjuangan atau perlawanan itu dapat terungkap secara utuh.

Metode yang akan dipergunakan dalam kajian ini adalah metode historis, yaitu suatu proses penelitian dan penulisan sejarah kritis yang mencakup empat langkah.¹⁹ Pertama, *heuristik* (pengumpulan data) yaitu merupakan langkah awal yang harus ditempuh untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sebanyak mungkin data-data sejarah yang berkenaan dengan objek penelitian. Data-data sejarah yang dimaksud, baik berupa sumber primer maupun berupa sumber sekunder dan tidak hanya terbatas pada sumber tertulis, melainkan juga pada sumber lisan. Mengenai sumber tertulis itu berasal dari berbagai tulisan, baik berupa berbagai dokumen yang tersimpang pada arsip nasional, koleksi pribadi, dan berupa naskah *lontarak*, maupun dari berbagai buku, majalah, dan surat kabar. Sementara sumber-sumber lisan dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui atau menyimpan informasi mengenai objek penelitian, terutama yang menyangkut mengenai latar belakang kehidupan masyarakat.

¹⁹ Notosusanto, Nugroho 1978, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu, hlm. 17; Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Kedua, kritik sumber yaitu proses penyaringan untuk menguji dan menilai kebenaran data dengan melakukan kritik terhadap data-data sejarah yang telah berhasil dikumpulkan. Kritik ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan nilai kebenarannya dan menyingkirkan data yang tidak berguna. Dengan demikian, maka dapat diputuskan bahwa apakah data-data sejarah tersebut, layak atau tidak untuk dipakai sebagai dasar penulisan.

Ketiga, interpretasi yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah berhasil diperoleh dari dari berbagai sumber, baik lisan maupun tertulis yang telah diuji kebenaran dan keobjektifannya melalui kritik sumber. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pembuatan suatu deksripsi untuk merekonstruksi dan menjelaskan sebab musabab serta faktor kondisional atau keadaan yang memungkinkan perjuangan itu. Dengan demikian, maka dapat dilakukan suatu rekonstruksi sejarah mengenai objek penelitian, dengan merangkaikan berbagai fakta yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Keempat, historiografi yaitu merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian, ialah penyusunan dan penulisan sebuah kisah sejarah mengenai “Abdul Hamid Petta Ponggowae, Profil Panglima yang Pantang Menyerah”. Atau dengan kata lain penyajian hasil penelitian dengan merangkai berbagai fakta menjadi kisah sejarah. Penulisan karya ini, penyajiannya dilakukan dengan cara atau bersifat deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran dan penjelasan peristiwa atau perlawanan itu secara kritis.

SELAYANG PANDANG KERAJAAN BONE



Wilayah bekas Kerajaan Bone sekarang meliputi seluruh daerah Kabupaten Bone. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki paling banyak kecamatan jika dibandingkan daerah kabupaten lainnya. Wilayah ini diperkirakan mulai berkembang menjadi satu kerajaan pada akhir abad ke-14, ketika tujuh *wanua* di sekitar Watampone bersatu di bawah kekuasaan *Arumpone TomanurungE ri Matajang*, sebagai raja pertama. Dalam perkembangan sejarahnya yang panjang, Bone termasuk salah satu kerajaan yang berpengaruh dan sangat disegani di Sulawesi Selatan. Bahkan setelah kekalahan Gowa dalam perang melawan VOC pada tahun 1667-1669, Bone muncul sebagai satu-satunya kerajaan yang terkuat dan berpengaruh di daerah Sulawesi Selatan dan memiliki pengaruh kekuasaan besar.¹

Sejarah Singkat Kerajaan Bone

Berdasarkan sejumlah sumber disebutkan bahwa setelah ke-

¹ Kemenangan Bone bersama sekutunya Belanda (VOC), membuat Kerajaan Bone bebas menjadi Kerajaan merdeka, yang sebelumnya menjadi daerah taklukan Kerajaan Gowa. Kekuasaan yang dimiliki Kerajaan Bone sebagai sekutu Belanda dalam menjatuhkan Kerajaan Gowa adalah tidak diperbolehkannya raja-raja yang berada di daerah ini menghadap pada pemerintah VOC tanpa seizin raja Bone dan diberikan kekuasaan untuk memperluas pengaruh kekuasaannya di daerah Sulawesi Selatan. Untuk keterangan lanjut baca Perjanjian Bungaya 1667 dan Andaya, Leonard Y. 1981. *The Heritage of Arung Palakka*. The Hague: Martinus Nijhoff, hlm. 137-155.

turunan Sawerigading sudah tidak ada lagi, terjadilah kekacauan di dalam masyarakat. Sebab, hukum dan adat istiadat tidak lagi dihiraukan oleh anggota masyarakat. Pada waktu itu berlaku hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang menguasai yang lemah. Atau yang dikenal dengan istilah "*sianre baleni tauwe*", yaitu kehidupan manusia digambarkan bagaikan kehidupan dunia ikan. Ikan yang besar menjadikan ikan yang kecil sebagai makanannya. Pada dasarnya, zaman itu tidak terdapat tata tertib dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, yang kuat menguasai yang lemah. Persatuan dan kesatuan tidak didapatkan.²

Menyikapi situasi yang demikian itu, mereka memohon kepada *dewata* agar dapat menunjukkan jalan untuk mengatasi keadaan tersebut. Doa permohonan mereka itu, akhirnya terkabulkan dengan munculnya seorang manusia yang luar biasa yang tidak diketahui nama dan asal usulnya. Ia dianggap berasal dari kayangan dan turun ke dunia membawa berbagai ajaran demi keselamatan umat manusia. Diletakkannya dasar-dasar pandangan baru di bidang sosial budaya, politik, kepemimpinan, dan pemerintahan. Orang yang tidak diketahui namanya dan dianggap menjadi penyelamat itu, kemudian disebut dengan *Tomanurung ri Matajang*. Dasar pandangannya membuahkan suatu sistem pemerintahan yang disebut kerajaan. *Tomanurung ri Matajang* inilah yang dianggap menjadi peletak dasar Kerajaan Bone.³

Sehubungan dengan itu, perlu dikemukakan kesepakatan bersama antara *Tomanurung ri Matajang* dengan rakyat yang di-

² Ali, Andi Muhammad, 1986. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Damai, hlm.1; Daeng Patunru, Abd. Razak, dkk., 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 5-6.

³ Kadir, Harun, dkk., 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tk. I. Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin, hlm. 24; Ali, Andi Mauhammad, 1986. *Rumpa'na Bone (Perang Bone) 1905*. Watampone: Damai, hlm. 2.

wakili oleh Matowa Ujung, sebelum *Tomanurung ri Matajang* diangkat menjadi raja Bone, yaitu sebagai berikut :

- Matowa Ujung ;
"Iya mai kilaowang riko lamarupe' maelo'keng tamaseang tomaradde'na mai ri tanata aja'na tallajang, tudang ni' mai naridi'na kipopuang, elo'mu elo' rikkeng passurommu kuwa, na mau'na anammeng na pattatommeng rekkuwa muteai wi kiteai toi sa, narekko tudang menno mai na naiko na poatakkeng, iya kia ampirikkeng temmakkare, dongiri temmatippepeng, musalipurikkengtemmadinging (temmakkecce)

Artinya

"Kami datang kepadamu tuanku, kiranya engkau mengasihani kami untuk menetap di negeri ini dan janganlah pergi, duduklah bersama kami dan engkaulah yang kami pertuan atau angkat menjadi raja, segala kehendak dan peritahmu jadi atas diri kami, walaupun anak dan isteri kami kalau engkau tidak menyukainya – kamipun ikut tidak menyukainya, asalkan engkau mau menetap dan memimpin kami, akan tetapi engkau harus menjaga keselamatan dan harta benda kami, serta melindungi kami agar tidak menderita ".

- *Tomanurung ri Matajang;*
"Tedduwa' nawa-nawao, temmabellecekkong"?

Artinya

"Apakah engkau tidak mendua hati, dan tidak akan ingkar di kemudian hari?

- Matowa Ujung;
"Tedduwa, nawa-nawakkeng, temmabellecekkong" !

Artinya

"Kami tidak mendua hati, dan kami tidak akan ingkar di

kemudian hari" !

- *Tomanurung ri Matajang*
"Ujujunggi upari botto ulu, upate' ripaka-pakka ulaweng
ada-adammu tomaega, riwettu mabbulo sipeppa'mu maelo
pancajikka' arung".

Artinya

"Saya menjunjung tinggi di atas kepala saya dan menghargai kata-kata persatuanmu untuk mengangkat saya menjadi raja".⁴

Jika disimak sumber tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa antara rakyat dengan raja, telah terikat suatu kontrak pemerintahan atau perjanjian pemerintahan, yaitu suatu persetujuan bersama atas dasar mufakat antara rakyat dengan raja atau pemimpin yang memangku tampuk pemerintahan. Perjanjian pemerintahan itu, telah tercipta sejak masyarakat Bone membentuk organisasi kenegaraannya, yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Bone. Dalam perjanjian pemerintahan itu, telah diatur dan ditetapkan batas-batas antara kedua belah pihak, yaitu rakyat menyerahkan diri sepenuhnya serta memberi kepada pemimpin untuk mengaturnya, dan sebaliknya pemimpin berkewajiban menjaga melindungi serta memakmurkan dan mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Berdasarkan batas-batas yang telah disepakati antara raja dengan rakyat dalam perjanjian pemerintahan itu, maka tertutuplah kemungkinan bagi raja atau penguasa untuk mempunyai kekuasaan mutlak dan kemungkinan akan mempraktekkan sistem kekuasaan atau sistem politik yang bersifat sewenang-wenang.

⁴ Ali, Andi Muhammad, 1986, *op. cit.*, hlm. 2-3; Daeng Patunru, dkk., 1989, *op. cit.*, hlm. 14-16.

Misalnya, sikap raja atau penguasa yang mengidentikkan bahwa negara adalah miliknya, atau kelompok rakyat adalah identik dengan milik pribadinya yang dapat dipermainkan atau diperlakukan dengan seenak hatinya. Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang raja atau penguasa, hanyalah merupakan “sarana” untuk mengabdikan kepada rakyat, untuk kebahagiaan rakyat, dan untuk melindungi rakyat, dari segala ancaman yang dapat mengganggu ketentraman jiwa dan kehidupannya.⁵

Raja atau penguasa sesungguhnya memiliki beban sosial di masyarakat, yaitu harus memperlihatkan reputasi sosial yang baik, tingkah lakunya terpuji dan dapat diteladani oleh semua lapisan sosial di masyarakat. Itulah beban sosial atau tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya di masyarakat. Jika seorang raja atau pemimpin berhasil menunaikan beban sosial atau tanggung jawab sosial di masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa sang raja atau pemimpin mendapatkan simpati dari masyarakat yang dipimpinnya. Tetapi jika sang pemimpin gagal, maka konsekuensinya atau akibatnya adalah sikap anti pati dari masyarakat yang dipimpinnya.

Kembali kepada perjanjian pemerintahan antara rakyat dengan raja, bahwa pada hakekatnya perjanjian pemerintahan itu, merupakan suatu sumpah setia atau janji keramat yang diucapkan pada waktu penobatan *Tomanurung ri Matajang* menjadi raja pertama di Kerajaan Bone. Perjanjian pemerintahan itu senantiasa pula diucapkan dalam pelantikan raja-raja Bone berikutnya. *Tomanurung ri Matajang* diangkat menjadi *arumpone* atau raja Bone pertama, dan kemudian diberi gelar MatasilampoE. Ia memerintah selama kurang lebih 40 tahun, dari 1300 sam-

⁵ Abdullah, Hamid, 1991. *Andi Pangerang Petta Rani, Profil Pimpinan yang Manunggal dengan Rakyat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 43.

pai dengan tahun 1370. *Tomanurung ri Matajang* kawin dengan *Tomanurung ri Toro* yang bernama Tenriawaru. Dari hasil perkawinan antara MatasilompoE dengan Tenriawaru, lahirlah lima orang anak yang masing – masing bernama; La Umassa, Pattanra Wanua, Tenri Salago, We Arattiga, dan I Samateppa.⁶

Raja Bone pertama inilah yang meletakkan dasar-dasar dan perubahan bagi kehidupan dan perkembangan Kerajaan Bone selanjutnya. Pada mulanya, Kerajaan Bone mempunyai wilayah kekuasaan yang tidak begitu luas. Hanya merupakan gabungan dari beberapa *wanua* atau persekutuan masyarakat kaum yang disebut *anang*. *Anang* itu dipimpin oleh *Matowa Anang* atau ketua kaum. *Matowa Anang* itu bersama-sama menyerahkan kekuasaan pemerintahan *anang* kepada *Tomanurung ri Matajang* sebagai pemimpin pemerintahan sentral. Lambat laun, di bawah pimpinan *Tomanurung ri Matajang*, Kerajaan Bone meluas ke negeri-negeri sekitarnya, baik dengan penggabungan secara sukarela, maupun dengan tekanan atau penaklukan.⁷

Tomanurung ri Matajang di dalam melaksanakan tugas pemerintahana sehari-hari, ia dibantu oleh sejumlah orang ketua persekutuan masyarakat kaum yang pada waktu itu disebut dengan *Matowa Anang*. Adapun para *matowa* itu, antara lain Matowa Ujung, Matowa Ponceng, Matowa Tibojong, Matowa Tanete ri Attang, Matowa Macege, Matowa Ta', dan Matowa Tanete ri Awang. Mereka kemudian dikenal dengan *Matowa*

⁶ Menurut Abdul Razak Daeng Patunru dan Mattulada, bahwa *Tomanurung ri Matajang* mempunyai enam orang anak, yaitu La Umassa, I Pattanra Wanua, I Balonglele, I Tenre Ronrong, We Arattiga, dan We Tenri Solongengeng (Daeng Patunru, dkk., 1989, *op. cit.*, hlm. 17-18; Mattulada, 1998, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, hlm. 42). Ali, Andi Mahammad, 1986, *op. cit.*, hlm. 5.

⁷ Mattulada, 1985. *Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 71.

Pitu. Dengan bantuan dari para *matowa* inilah *Tomanurung ri Matajang* membuat peraturan-peraturan bagi rakyatnya. Langkah pertama yang dilakukan, ialah menentukan hak milik rakyat. Sebab, sebelumnya tidak ada peraturan-peraturan bagi rakyatnya. Selain itu, *Tomanurung ri Matajang* juga menegakkan hukum dan adat istiadat untuk mengatur ketertiban masyarakat.⁸

Kemudian *Tomanurung ri Matajang* digantikan oleh putranya, yaitu La Umassa menjadi raja Bone kedua. La Umassa kawin dengan rakyat biasa dan dari hasil perkawinan itu, lahirlah dua orang putra yang masing-masing bernama To Suwalle dan To Salawakka. Pada masa pemerintahan raja Bone kedua, terciptalah suasana tentram dan rakyat menikmati kemakmuran. La Umassa dikenal sebagai orang yang berbadan tinggi besar dan kuat serta gemar dalam pertukangan besi. Atas kegemaran itu, ia memelopori pembuatan dan penggunaan alat-alat persenjataan, pertanian, dan keperluan rumah tangga yang terbuat dari besi. Itulah sebabnya setelah La Umassa wafat, ia digelar "*Petta Panre BessiE*". La Umassa, berhasil pula memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Bone ke negeri-negeri sekitarnya, antara lain Biru, Cellu, dan Anro Biring.⁹

Berhubung karena Raja Bone La Umassa tidak mempunyai "*anak pattola*" (putra mahkota) untuk menggantikannya menjadi raja Bone, maka atas persetujuan *Matowa Pitu* diangkatlah kemenakannya yang bernama La Saliyu Karampeluwa menjadi raja Bone ketiga.¹⁰ Sementara kedua putra Raja Bone La Umassa, yaitu To Suwalle dan To Sawalakka, masing-masing ditunjuk

⁸ Ali, Andi Muhammad, 1986, *op. cit.*, hlm. 6.

⁹ Daeng Patunru, dkk., 1989, *op. cit.*, hlm. 21; Ali, Andi Muhammad, 1986, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁰ La Saliyu Karampeluwa adalah putra dari We Pattanra Wanua (saudari perempuan dari Raja Bone La Umassa) dari hasil perkawinannya dengan penguasa dari Palakka yang bernama La Pattingki.

untuk mendampingi sepupu sekalinya dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Bone. To Suwalle diangkat menjadi *Tomarilaleng*, dan To Sawalakka diangkat menjadi *Makkadang Tanah* Kerajaan Bone. Raja Bone La Saliyu Karampelua kawin dengan sepupu sekalinya yang bernama We Tenriropo, *anak pattola* dari Kerajaan Pacing. Dari hasil perkawinan itu, lahirlah dua orang anak yang masing-masing bernama We Benrigau dan La Mappasessu. Pada masa pemerintahan Raja Bone La Saliyu Karampeluwa, wilayah kekuasaan Bone semakin meluas ke negeri-negeri sekitarnya, antara lain Pallengoreng, Melle, Cerowali, Apala, Bakke, Tanete, Soga, Lampoko, Lamoape, Parrippung, Lompu, BabauwaE, Awampone, Barebbo, Pattiro, Cinnenung, Pasempe, Kaju, Ponre, dan Palakka.¹¹

Usaha-usaha perluasan wilayah kekuasaan Bone, dilakukan pula oleh raja-raja Bone sesudah La Saliyu Karampeluwa, yaitu raja Bone keempat, We Benrigau MakaleppiE Dammarowa, raja Bone kelima, La Tenri Sukki, dan raja Bone keenam, La Uliyo Bote'E. Oleh karena itu, lambat laun Kerajaan Bone tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Pada masa pemerintahan Raja Bone La Uliyo Bote'E didampingi oleh seorang cendikiawan terkenal yang bernama La Mellong atau Kajao Laliddong. Tercipta suatu perjanjian persahabatan dan kerja sama di bidang pertahanan dengan Gowa, yang dikenal dengan "*Ulu Ada* atau *Ulu Kanayari Tamalate*", yaitu "*Sitetton-genna Sudang na La Taeriduni*". Usaha Raja Bone La Uliyo Bote'E, dilanjutkan pula oleh raja Bone berikutnya, yaitu La Tenrirawe BongkangE, yang mengadakan perjanjian persahabatan dengan raja Gowa, yang dikenal dengan "*CappaE ri Caleppa* (Perjanjian Caleppa atau *Jori DewataE ri Tangka*)". Selain itu, mengadakan

¹¹ Ali, Andi Muhammad, 1984, *op. cit.*, hlm. 3; Daeng Patunru, dkk., 1989, *op. cit.*, hlm. 25.

pula perjanjian persahabatan dengan raja atau *datu* Luwu di Cenrana yang dikenal dengan "*Polo MalelaE ri Unyny*". Sementara untuk Wajo, dan Soppeng tercipta suatu perjanjian persahabatan yang dikenal dengan "*MallamumpatuE ri Timurung*", dan memberi nama kerajaan mereka dengan "*Kerajaan TellumpoccoE*" (Bone, Wajo, dan Soppeng).¹²

Pada masa pemerintahan raja Bone kesepuluh, We Tenri Tappu, terjadi suatu perubahan penting di bidang pemerintahan Kerajaan Bone, yaitu berubahnya *Matowa Pitu* menjadi *Ade Pitu*. Kalau pada masa sebelumnya, *Matowa Pitu* memegang jabatan rangkap, yaitu selain menjadi *matowa* pada daerahnya masing-masing, juga menjadi pembantu utama raja Bone pada pusat pemerintahan kerajaan. Maka pada masa *Ade Pitu*, mereka hanya bertugas pada pusat pemerintahan kerajaan. Jabatan sebagai anggota dewan *Ade Pitu* tidak boleh dipindahtangankan atau diwariskan kepada keturunannya sebagai mana halnya yang berlaku pada jabatan *Matowa Pitu*.¹³

Setelah Kerajaan Gowa-Tallo menerima Islam, maka kerajaan itu menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Politik islamisasi ke Seluruh Sulawesi Selatan dijalankan dengan hebatnya. Seruan peng-Islam-an diterima dengan baik oleh sejumlah kerajaan kecil. Tetapi kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat, seperti Bone, Wajo, dan Soppeng menolak ajakan Gowa, sehingga Gowa terpaksa memaklumkan perang. Empat kali Gowa mengirimkan pasukannya ke Tanah Bugis. Pertama kalinya dalam 1608, dan pasukan Gowa dikalahkan oleh gabungan pasukan persekutuan *Kerajaan TellumpoccoE*. Namun pada tahun-tahun

¹² Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 122-124; Ali, Muhammad, 1984, *op. cit.*, hlm. 4; Daeng Patunru, dkk., 1989, *op. cit.*, hlm. 38-57.

¹³ Ali, Andi Muhammad, 1984, *op. cit.*, hlm.5; Daeng Patunru, dkk., 1989, *op. cit.*, hlm. 102.

berikutnya, persekutuan *Kerajaan TellumpoccoE* ditaklukkan satu demi satu, Soppeng dalam tahun 1609, Wajo dalam 1610, dan Bone dalam 1611.¹⁴ Sejak itu, Bone berada di bawah kekuasaan Gowa.

Kerajaan Bone dalam perkembangan berikutnya, terutama pada masa kekuasaan La Tenritatta Arung Palakka berhasil menegakkan kembali kedaulatannya dari kekuasaan Gowa. Ia dengan sekuat tenaga mempersatukan kembali Tanah Bugis, terutama pemulihan kembali *Kerajaan TellumpoccoE*, berdasarkan perjanjian "*LamumpatuE ri Timurung*". Dalam usahanya itu, La Tenritatta Arung Palakka, akhirnya berhasil mempersatukan kembali Tanah Bugis di bawah kekuasaannya, setelah melalui peperangan yang sengit. Oleh karena itu, La Tenritatta Arung Palakka kemudian digelar "*Datu Tungke'na Tanah Ugi*" atau Raja Tunggal Tanah Bugis". Pihak Belanda menyebutnya "*Konink der Boeginezzen*" dan menghormati Bone sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang bersahabat dengan Belanda. Namun bersamaan dengan itu pula, terbuka babakan baru dalam lembara sejarah Sulawesi Selatan dengan masuknya kekuasaan Belanda.¹⁵

Geografi dan Demografi

Batasan geografis atau wilayah Bone dalam kajian ini, adalah wilayah kekuasaan pemerintahan Kerajaan Bone pada awal abad ke-20. Kerajaan Bone terletak di bagian timur jazirah selatan Sulawesi dengan pusat kerajaan atau pemerintahannya, dikenal dengan nama Lalebbata-Watampone, sekitar 174 kilometer di se-

¹⁴ Daeng Patunru, 1983, *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 20; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 152.

¹⁵ Daeng Patunru, dkk., 1989, *op. cit.*, hlm. 208; Shahib, M. Roem, 1980. *Bone Kartu Mati Bagi Perjuangan Merah Putih di Sulawesi Selatan Pada Tahun 1945-1950*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, hlm. 18.

belah timur Kota Makassar. Adapun wilayah kekuasaan pemerintahan Kerajaan Bone ketika itu, adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kerajaan Wajo dan Soppeng (sekarang termasuk Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng).
- Sebelah timur berbatasan dengan laut, yaitu Teluk Bone.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Tangka atau wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan *Distrik – Distrik* sebelah Timur (*Ooster Districten*), sekarang termasuk Kabupaten Sinjai.
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang disebut *Distrik – Distrik* sebelah Utara (*Noorder Districten*) dan Kerajaan Soppeng (sekarang termasuk Kabupaten Maros, Pangkep, dan Soppeng).¹⁶

Wilayah kekuasaan Bone pada awal abad ke-20, tampaknya kurang lebih atau meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone sekarang. Daerah Bone yang terletak di bagian timur jazirah selatan Sulawesi ini, membujur dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 100 km, serta lebarnya kurang lebih 67 km, dengan luas wilayahnya 4.530 km², yang terdiri atas tanah datar, daerah perbukitan, rawa-rawa, dan daerah pegunungan. Keadaan tanahnya subur, terutama daerah-daerah yang terletak di bagian pegunungan, sedang daerah-daerah yang terletak di bagian pesisir umumnya adalah tanah datar, seperti daerah Barebbo, Tanete Riattang, Mare, Tonra, Salamekko, dan sebagian lagi daerahnya datar dan berawa-rawa. Secara keseluruhan daerah Bone tidak sesuai untuk digunakan sebagai daerah persawahan karena tanahnya bermacam-pur batu. Selain itu, jenis tanah di daerah ini adalah tanah jenis

¹⁶ Kadir, Harun, dkk., 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 77.

alluvial hidrormorf glei yang berkadar humus rendah, *complex mediteren* coklat kekuningan.¹⁷

Wilayah Bone dapat dikatakan tidak memiliki gunung-gunung yang tinggi. Sungainya yang paling penting adalah Sungai WalanaE dan Sungai Cenrana. Sungai WalanaE berhulu di Gunung Bawakaraeng, mengalir dari bagian Tenggara Bone dan mengalir dataran Bengo dan daerah Soppeng. Beberapa bagian alirannya mengalir daerah Lamuru, berlanjut ke daerah-daerah Mario ri Wawo dan Mario ri Awa dan akhirnya bersatu dengan Sungai Cenrana di sebelah timur Danau Tempe (Sengakang). Jalur utama aliran sungai ini dari selatan ke utara. Sungai Cenrana berhulu di Gunung Lantimojong, di perbatasan Luwu dan Toraja. Gunung-gunung yang agak tinggi tidak terdapat di wilayah ini. Sebagian besar gunung-gunungnya terdapat di bagian selatan dan tenggara Kerajaan Bone, di antaranya: Ponce 757,25 meter, Tarapong 629 meter, Salakang 435 meter, Tanete dan Latempu masing-masing 338,6 meter, Gunung Lawi dan Ati Matiro masing-masing 290 meter, Gona 242 meter, BottoE 96,9 meter. Di bagian utara dan barat daya terdapat Buwa 483,7 meter, Tamping 435 meter, Kahu 338,6 meter, Kalling, Batu Lappa, Tjakkarene, Mampu, Sinri dan Lapitu masing-masing 290 meter, dan Silenrong 162 meter.¹⁸

Secara astoronomi, Bone terletak antara 119,49' 3" hingga 120, 25' 9" Bujur Timur dan antara 4,14' 43" hingga 5,08' 45 Lintang Selatan. Luas wilayah Bone yang kurang lebih 4.530 Kilometer persegi tersebut, meliputi sekitar 7,30 persen dari luas

¹⁷ Tideman, J. 1935. "*Het Landschap Bone*", dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde (TNAG)*, Bagian LII, hlm. 68; Perelaer, M.T. H., 1872. *De Bonische Expeditien Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860*. Leiden: Gualth. Kolff, eerste deel, hlm. 1-3. Hamzah, dkk. Aminah P. 1984. "*Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan*", Ujung Pandang: Pemda Tk.I. Sulawesi Selatan, hlm. 5.

¹⁸ Bakkers, J.A. 1866. "*Het Leenvorstendom Boni*," dalam *Tijdschrift voor Nederlandsche-Indie (TNI)*, XV, hlm. 12-13; Perelaer, 1872, *op. cit.*, hlm. 3.

daerah Sulawesi Selatan. Dari keseluruhan luas wilayah Bone tersebut, terdiri dari daerah pesisir atau pantai yang membentang dari utara ke selatan, dan daerah daratan, baik daratan rendah maupun daratan tinggi atau pegunungan yang cukup luas. Daratan rendah yang cukup luas terdapat di sepanjang pesisir pantai timur serta daerah sekitar aliran dan muara Sungai WalanaE dan Cenrana atau Pallime. Sedangkan daerah daratan tinggi atau pegunungan terdapat di bagian sebelah barat. Di antara keduanya terdapat daerah persawahan dan ladang yang cukup luas dan terkenal cukup subur.

Tofografi daerah Bone secara garis besarnya, dapat dibagi menjadi:

- Ketinggian antara 0 – 100 meter, meliputi daerah Cenrana, Tanete Riattang, Ajangngale, Awampone, dan Cina.
- Ketinggian 100 – 500 meter, meliputi daerah Kajua, Salomekko, Mare, SibuluE, Barebbo, Lappa Riaja, Palakka, Tellu SiattingE, dan Dua BoccoE.
- Ketinggian 500 – 1000 meter, meliputi daerah Kahu, Tonra, Libureng, Ponre, dan Ulaweng.
- Ketinggian diatas 1000 meter, meliputi daerah Bontocani dan Lamuru.¹⁹

Daerah Bone termasuk daerah yang beriklim tropis dan mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti. Musim hujan berlangsung antara bulan Februari sampai bulan Juni atau Juli. Sedangkan musim kemarau berlangsung antara bulan Agustus sampai bulan November. Suhu udara maksimum terjadi pada Desember, yaitu sekitar 35,5°C dan suhu udara minimum terjadi pada Agustus, yaitu sekitar 20,1°C.

¹⁹ Pemda, 1993. *Selayang Pandang Kabupaten Dati II Bone*. Watampone: Bappeda Tingkat II Bone, hlm. 5-6.

Sedangkan suhu udara rata-rata maksimum terjadi pada Desember, yaitu 30,9^o C dan suhu udara rata-rata minimum terjadi pada Agustus, yaitu sekitar 26^o C.²⁰

Kerajaan Bone mempunyai dua pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan BajoE dan Pelabuhan Pallime. Selain itu, terdapat pula pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya, seperti Pallette, Pattiro, Mare, Salomekko, Kajuara, dan daerah-daerah pantai lainnya. Kedua pelabuhan utama tersebut, merupakan sumber penghasil-an yang penting bagi Bone. Di samping itu, hal lain yang tidak kurang pentingnya untuk dikemukakan, ialah cukup banyaknya jalan setapak yang hanya dapat dilewati atau dilalui dengan jalan kaki atau naik kuda. Tambahan pula bahwa banyak tikungan-tikungan jalan pada daerah pegunungan. Keadaan yang demikian itu, amat penting artinya bagi pelaksanaan perang gerilya dan penyerangan secara tiba-tiba atau penghadangan yang dilakukan oleh laskar Bone terhadap pasukan Belanda.²¹

Daerah Bone seperti yang digambarkan tersebut, didiami oleh mayoritas suku atau etnis Bugis dengan jumlah penduduk pada awal abad ke-20, diperkirakan kurang lebih 250 ribu jiwa.²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6. Daerah Bone ini termasuk daerah tropis, karena itu hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di daerah ini tidak merata. pada bulan Maret hingga Juni curah hujan di daerah ini sangat lebat, sedangkan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November curah hujannya agak sedikit. Keadaan yang demikian ini mendorong penduduknya untuk menyandarkan kehidupannya lewat pertanian dan sebagai nelayan.

²¹ Kadir, Harun, dkk., 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 64; Ernawati, 1997. *Perjuangan Baso Pagilingi Abdul Hamid Menentang Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Kerajaan Bone Pada Tahun 1905*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana IAIN Alauddin, hlm. 18.

²² Ernawati, 1997, *op. cit.*, hlm. 19. Sesungguhnya data kependudukan Kerajaan Bone sampai pada tahun 1920 tidak diketahui dengan pasti. Data yang ditemukan pada tahun 1920 dan 1930 menunjukkan bahwa jumlah penduduk *Afdeling Bone* (meliputi Bone, Soppeng dan Wajo), pada tahun 1920 sebanyak 45.153 orang. Jumlah ini terdiri atas 29.968 orang laki-laki dan jumlah wanitanya sebanyak 15.185 orang, sedangkan data tahun 1930 menunjukkan bahwa jumlah penduduk *Afdeling Bone* sebanyak 346.000 orang dengan perincian laki-laki sebanyak 169.000 orang dan wanita sebanyak 177.000

Sebagian besar dari penduduk ini terbagi dalam kegiatan sebagai petani (baik sebagai petani lahan basah atau petani lahan kering), nelayan, industri rumah tangga, pelayaran dan perdagangan. Kegiatan penduduk itu, tentu tidak terlepas dari kondisi wilayah tersebut. Hamparan lahan persawahan dan ladang yang cukup luas dan subur, memungkinkan penduduknya untuk bertani, sehingga menjadikan wilayah ini sebagai penghasil beras yang cukup melimpah dan hasil-hasil pertanian lainnya.²³ Demikian pula wilayah pantainya yang membentang dari utara (Cenrana dan Pallime) ke selatan (Kajuara) di pesisir timur jazirah selatan Pulau Sulawesi, mendorong penduduknya turun ke laut.

Sehubungan dengan yang terakhir tersebut, Alfred Thayer Mahan, seorang ahli yang membahas pengaruh laut terhadap sejarah, menyatakan bahwa apabila keadaan pantai suatu negeri memungkinkan orang turun ke laut, maka penduduk negeri itu akan bergairah mencari hubungan ke luar untuk berdagang. Kecenderungan ini selanjutnya memunculkan kebutuhan untuk memproduksi komoditas. Menurut Edward L. Poelinggomang, pendapat Mahan tersebut mengacu pada dua hal penting, yaitu kondisi wilayah dan penduduk. Kondisi wilayah bukan hanya menyangkut letak dan keadaan alam, melainkan juga pendudukannya dalam dunia perdagangan. Sementara yang kedua me-

orang. Dari keseluruhan jumlah penduduk itu, terdapat 345.262 orang Bugis, 84 orang Eropa, 313 orang Cina dan 482 penduduk bangsa asing lainnya. Kepadatan penduduknya kurang lebih 160 orang per kilometer persegi, dan Bone Selatan kurang lebih 40 orang per kilometer persegi (Tideman, J., *op. cit.*, hlm. 72).

²³ Produksi utama dari daerah ini adalah beras, jagung dan ubi kayu, sementara produksi perkebunan antara lain kemiri dan sukun. Penduduk yang mendiami daerah pedalaman umumnya bergiat dalam pertanian ladang, tegalan dan perkebunan, sedangkan penduduk yang mendiami daerah pesisiran kebanyakan mengerjakan pertanian sawah. Hal ini dimungkinkan karena daerahnya datar dan dialiri oleh banyak sungai, sehingga pengairan dapat dengan mudah diperoleh. Selain itu, juga ada sebagian penduduknya yang menekuni dibidang pekerjaan menangkap ikan (nelayan), baik sebagai mata pencarian pokok maupun sambilan.

nyangkut mata pencaharian penduduk serta pemerintahan.²⁴

Kondisi wilayah Bone tersebut, menjadi sumber kemakmuran bagi penduduknya. Sekaligus menjadi ajang persaingan dan perseteruan antara Kerajaan Bone dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan dan pemerintah Belanda. Itulah sebabnya pemerintah Belanda pada permulaan abad ke-20, bukan hanya berusaha untuk menguasai Pelabuhan BajoE dan Pallime, tetapi juga untuk menguasai secara langsung seluruh wilayah Bone.

Penduduk Bone sebagian besar menganut agama Islam. Meskipun agama Islam telah dianut dan berkembang sejak awal abad ke-17, tetapi kepercayaan lama yang animis masih banyak sisa-sisanya, bahkan terjadi semacam akulturasi. Sebagian penganut agama Islam masih melakukan upacara-upacara, seperti dalam hal upacara kematian, naik rumah baru, kelahiran anak, dan lain-lain. "Ilmu Kebatinan" yang bersumber dari kepercayaan animisme berkembang dan bercampur dengan tasawuf dalam agama Islam, seperti ilmu kekebalan. Ilmu kekebalan sebagai "pakaian laki-laki" memberikan sugesti bagi penganutnya. Pada perlawanan terhadap pasukan Belanda ketika itu, ilmu kekebalan terhadap senjata tajam, menjadi pelengkap atau pendorong semangat sehingga kekurangan persenjataan dan pengetahuan tentang perang, dapat diatasi oleh mereka yang menganut kepercayaan seperti itu.

Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Keadaan sosial budaya masyarakat Bone yang diuraikan dalam pembahasan ini, ialah menyangkut masalah stratifikasi

²⁴ Poelinggomang, Edward L., 2002. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), hlm. 13 dan 216. Baca, Leur, J. C. van dan F. R. J. Veroeven, 1974. *Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia*. Jakarta: Bhratara.

sosial dan sistem kekerabatan serta pandangan dan sikap hidup masyarakat. Oleh karena masalah-masalah tersebut, dipandang mempunyai kaitan dengan perlawanan Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae terhadap pendudukan pasukan pemerintah Belanda ketika itu. Di samping itu, juga dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai dinamika intern kehidupan masyarakat yang memainkan peranan dalam peristiwa itu.

Mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan suatu masyarakat, diperlukan adanya pranata sosial yang digunakan untuk mengatur masyarakat tersebut. Sistem kekerabatan dan stratifikasi sosial yang merupakan dua bentuk pranata sosial yang digunakan di dalam mengatur kehidupan, ternyata mempunyai kedudukan yang cukup penting. Keduanya dapat memberikan berbagai hal yang menyangkut latar belakang pandangan hidup, watak, nilai-nilai, dan sistem kehidupan sosial yang terdapat di dalam masyarakat, termasuk kegiatan dan tingkah laku politik di dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka kedua pranata sosial itu tidak dapat diabaikan di dalam upaya untuk memperoleh gambaran yang menyangkut kehidupan suatu masyarakat.²⁵

Menyangkut masalah stratifikasi sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar, sesungguhnya telah diteliti oleh seorang sarjana Belanda, H. J. Friedericy. Ia telah berusaha untuk menggambarkan stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan sebelum daerah ini dikuasai secara langsung oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1905. menurut H. J. Friedericy, bahwa stratifikasi sosial masyarakat Sulawesi Selatan, pada hakekatnya hanya me-

²⁵ Gonggong, Anhar, 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 65.

ngenal dua tingkatan strata saja, yaitu *anakarung* (bangsawan) dan *tomaradeka* (orang merdeka). Sedangkan *ata* (hamba sahaya) hanya merupakan lapisan sekunder, yaitu terjadi karena mengikuti pertumbuhan sosial dalam kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, baik karena kalah perang maupun karena putusan pengadilan.²⁶

Demikian pula halnya di daerah Bone, sistem stratifikasi sosial telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Bone dengan konsep *tomanurung*. Dikatakan *tomanurung* karena tidak diketahui asal usulnya atau biasa juga digambarkan sebagai manusia yang turun langit atau kayangan. Yang terpenting dalam hal ini ia dianggap sebagai peletak dasar bagi Kerajaan Bone dan merupakan cikal bakal raja-raja Bone selanjutnya. Oleh karena dianggap mampu mengatur kelangsungan hidup kelompok manusia pada waktu itu, sehingga ia (*Tomanurung ri Matajang*) disepakati untuk diangkat menjadi pemimpin atau raja, guna mengatur pemerintahan dalam masyarakat Bone atau Kerajaan Bone. Semua raja-raja dan keturunan raja Bone dianggap berasal dari *Tomanurung ri Matajang*. Oleh karena sumber asal mereka dengan kekuasaan yang dimilikinya, maka raja beserta keluarganya disebut *arung* atau *anakarung*. Mereka merupakan golongan yang menempati lapisan paling atas. Sedangkan lapisan di bawahnya, yaitu anggota masyarakat pada umumnya disebut *tomaradeka* dan lapisan terbawah disebut dengan istilah *ata*.²⁷

Adapun gambaran secara singkat mengenai pelapisan sosial atau stratifikasi sosial masyarakat Bugis Bone, adalah sebagai berikut:

²⁶ Friedericy, H.J., 1933. "De Standen bij de Boeginezen en Makassaren", dalam *Bijdragen tot de Taal, Landen en Volkenkunde van Nederlandsche Indie (BKl)*, No. 90; Mattulada, 1985. *Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.29-30.

²⁷ Gonggong, 1992, *op. cit.*, hlm. 66; Mattulada, 1985, *op. cit.*, 30.

1. *Anakarung*, yaitu anak raja-raja dan merupakan golongan bangsawan yang dibedakan atas ; *anak pattola*, *anak rajeng*, *anak cerak*.
2. *Tomaradeka*, yaitu golongan orang merdeka atau orang bebas dan dibedakan dua golongan, yaitu *todeceng* (orang baik-baik) atau *tosama* (orang kebanyakan).
3. *Ata*, yaitu golongan budak atau hamba sahaya dan dibedakan atas dua golongan, *ata mana* dan *ata mabuang*. *Ata mana*, yaitu budak atau hamba sahaya warisan atau diwariskan atau pusaka dan biasa juga disebut *ata puppu*, yaitu budak atau hamba sahaya terus menerus atau turun temurun. Sedangkan *ata mabuang*, yaitu dijadikan budak atau hamba sahaya karena melakukan kesalahan berat, sehingga dijatuhi hukuman adat atau pengadilan, yaitu dicabut kebebasannya atau menjadi budak karena kalah perang.²⁸

Sehubungan dengan sistem stratifikasi sosial masyarakat Bugis Bone di atas, maka status kedudukan Abdul Hamid Petta Ponggowae dalam masyarakat adalah berada pada golongan bangsawan *anak karung* (keturunan *tomanurung*) yang berstatus sebagai *anak pattola* karena ayahnya adalah Raja Bone XXXI, La Pawawoi Karaeng Sigeri, dan ibunya bernama I Karimbo Daeng Tamene (Pette Mene) adalah permaisuri Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri. Dengan demikian, maka Abdul Hamid Petta Ponggowae adalah merupakan putra mahkota (*anak pattola*), yaitu calon raja yang sangat ideal dan paling memenuhi syarat untuk menduduki tahta kerajaan manakala La Pawawoi Karaeng Sigeri mangkat atau mengundurkan diri sebagai raja Bone.

²⁸ Mattulada, 1995, *op. cit.*, hlm. 30-31; Gonggong, 1992, *op. cit.*, hlm. 66-67; Sagimun MD, 1976, *La Pawawoi Karaeng Segeri Raja Bone XXXI*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 8-9.

Selain itu, pranata sosial masyarakat yang mempunyai arti penting dan memberi corak tertentu pada pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat adalah sistem kekerabatan. Orang Bugis yang hidup dalam satu keluarga atau satu rumah tangga disebut dengan istilah *siakkalabinengeng* atau *sianak maranak*, yang biasanya tidak hanya terdiri dari keluarga inti di dalam suatu rumah tangga. Sebab, ibu, bapak, saudara-saudari, dan keponakan mereka bisanya ikut menjadi tanggungan mereka. Sedangkan sistem kekerabatannya disebut dengan istilah *ade asseajingeng*. Hal ini merupakan bagian dari *pangadereng* yang dapat diartikan sebagai seluk beluk adat istiadat, dari perkawinan sampai agama. Di dalam kehidupan masyarakat Bugis, *ade asseajingeng* amat penting, tidak hanya di dalam hal pencarian jodoh, tetapi juga di dalam hal distribusi dan mempertahankan kekuasaan.²⁹

Menyangkut pencarian jodoh, bukan hanya bertujuan untuk mempertahankan kemurnian darah dan kekayaan yang mereka miliki, tetapi juga dalam hal distribusi dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini dapat disimak dari sistem perkawinan politik yang dijakankan oleh Arung Palakka yang menggunakan sistem perkawinan kerabat di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan yang di pimpinnya. Itulah sebabnya jaringan hubungan kekeluargaan (*asseajingeng*) Kerajaan Bone menjangkau beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, yaitu antara lain Gowa, Soppeng, Luwu, Wajo, Sidenreng, Barru, Suppa, Sawitto, dan Alitta. Ini sangat besar artinya di dalam perlawanan Bone yang dipimpin oleh Abdul Hamid Petta Ponggowae bersama ayahnya, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri terhadap pemerintah Belanda

²⁹ Gonggong, 1992, *op. cit.*, hlm. 79.

pada 1905. Sebab, hampir semua keluarganya yang memegang peranan penting pada kerajaan-kerajaan tersebut, mendukung dan membantunya dalam perjuangan menentang kekuasaan pemerintah Belanda.

Asseajingeng dibedakan atas dua jenis, yaitu *sompung lolo* atau *seajing* dan *assiteppa-teppangeng*. Yang dimaksud dengan *sompung lolo* ialah *seajing* yang lahir dari anggota kerabat yang ada hubungan darahnya. Sedangkan *assiteppa-teppangeng* ialah menyangkut hubungan keluarga yang lebih jauh dan tidak ada hubungan darah. Demikian pula halnya dengan *sompung lolo* atau *seajing* dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu *seajing mareppe* dan *seajing mabela*. *Seajing mareppe* ialah menunjukkan adanya hubungan keluarga yang dekat, misalnya sepupu sekali, sepupu dua kali, dan sepupu tiga kali. Sedangkan *seajing mabela* ialah menunjukkan masih adanya hubungan keluarga, namun sudah dianggap jauh.

Pada lingkungan masyarakat Bugis Bone digunakan berbagai istilah untuk menyebut salah satu unsur di dalam sistem kekerabatan. Tetapi untuk sebutan satu unsur yang dimaksud dapat lebih dari satu istilah yang digunakan, jika dikaitkan dengan sistem stratifikasi sosial atau pelapisan sosial yang berlaku. Sebagai contoh istilah untuk menyebut ayah dan ibu. Di kalangan bangsawan digunakan istilah *petta* dan *etta*, dan terkadang *puang*. Sedangkan untuk kalangan masyarakat umum atau bukan bangsawan digunakan istilah *ambo* atau *ambe*, dan *indo* atau *emma*. Untuk paman atau bibi digunakan istilah *amure*, kemenakan (*anaure*), kakak dan adik (*daeng* dan *anri* atau *andi*), kakek (*lato*), nenek (*nenek*), suami (*lakka*), isteri (*baine*), saudara laki-laki (*padarane* atau *sellesureng orowane*), saudara perempuan (*padakkunrai* atau *sellesureng makkunrai*), dan cucu (*eppo*).

Istilah untuk hubungan keluarga lainnya, seperti sepupu sekali digunakan istilah *sapposiseng*, sepupu dua kali (*sappokadua*), dan sepupu tiga kali (*sappokatellu*), serta ipar dan mertua digunakan istilah *ipa'* dan *matua*.

Gambaran secara singkat mengenai sistim kekerabatan tersebut, jika dikaitkan dengan perjuangan Abdul Hami Petta Ponggawae dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda, maka jaringan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan (*asseajjengeng*) mempunyai arti yang amat penting karena dipandang dapat menunjang dukungan dalam perjuangan. Sebagai contoh para pemimpin perang laskar Bone yang cukup besar perannya di dalam Perang Bone 1905, adalah keluarga dekat dari Abdul Hamid Petta Ponggawae dan Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri. Adapun para pemimpin itu, yaitu antara lain La Temmu Page Arung Labuaja adalah anak tiri dari Abdul Hamid Petta Ponggawae, I Muhammad Ali Arung Cenrana pimpinan pasukan inti atau khusus Kerajaan Bone yang digelar *MattanrasullaE* adalah kemenakan dari Raja Bone La Pawawoi, Arung Baringeng (putra Abdul Hamid Petta Ponggawae), Arung Segeri adalah sepupu Raja Bone, Arung Tonra (saudara Raja Bone), I Betta Daeng Mangkana Arung Maroanging (kemenakan dari Raja Bone), Senrima Daeng Majepu Arung Melle (menantu kemenakan dari Raja Bone), Senrima Daeng Mateppo Arung Bengo (*Anak Pattola* Dulung Ajangale), dan lain-lain. Demikian pula ketika Raja Bone dan Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama laskarnya meninggalkan atau keluar dari wilayah kekuasaan Bone menuju Soppeng, Wajo, dan Sidenreng untuk melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Kerajaan-kerajaan tersebut, memberikan bantuan pasukan dan perbekalan serta perlindungan dan dukungan kepada raja Bone bersama pengawalnya. Salah satu sebabnya, karena kerajaan-

kerajaan itu mempunyai hubungan kekeluargaan – kekerabatan (*asseajingeng*) dengan Kerajaan Bone.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan dalam kaitannya dengan perjuangan Abdul Hamid Petta Pong-gawae menentang pendudukan militer Belanda ketika itu, ialah pandangan dan sikap hidup masyarakat yang pada umumnya dilandasi dengan apa yang disebut *siri' na pesse*. Hal ini merupakan dua aspek yang saling mengisi dalam kehidupan masyarakat Bugis sebagai seorang manusia. Dua aspek kehidupan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya.

Siri' dalam pengertian bahasa atau harfiahnya adalah sama dengan rasa malu. Tetapi jika dipandang dari makna budaya atau kulturnya, maka kata *siri'* akan berarti kehormatan, harga diri, atau martabat. Bagi masyarakat Bugis (Bone), pengertian makna kulturnya dari kata *siri'* itulah yang lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari, apabila dia menyebut kata *siri'*. Sebab, esensi *siri'* adalah soal malu yang erat kaitannya dengan kehormatan diri, harga diri sebagai seorang manusia.³⁰

Sedangkan *pesse* dalam pengertian bahasa atau harfiahnya adalah pedih atau rasa sedih. Dalam pengertian budaya atau makna kulturnya, *pesse* juga berarti belas kasihan, perih kemanusiaan, rasa turut prihatin, berhasrat membantu, adalah pernyataan solidaritas atau rasa sedih yang terbit dalam kalbu yang dapat merangsang adanya suatu aktivitas atau tindakan. Ini merupakan etos atau sikap hidup orang Bugis sebagai pernyataan moralnya.³¹

³⁰ Kadir, Harun, dkk., 1984, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin, hlm. 36-37.

³¹ *Ibid.*, hlm. 37. Uraian lebih lanjut tentang *siri'* dan *pesse* dalam masyarakat Sulawesi Selatan terdapat dalam karya Anhar Gonggong, 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot*

Berdasarkan atas pengertian itu, maka *pesse* diarahkan ke luar diri seseorang. Sedangkan *siri'* diarahkan ke dalam diri seseorang. Melalui *siri' na pesse* mengarahkan tingkah laku seseorang atau masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, sebagai lokomotif atau motor penggerak dalam memanifestasikan pola-pola kebudayaan dan sistem sosialnya. Antara *siri'* dan *pesse* saling terjalin dalam kehidupannya, saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya.

Hubungan yang erat antara *siri'* dan *pesse*, tampak dalam ungkapan masyarakat Bugis yang menyatakan bahwa "*rekkuwa de'nanyai siri' na engka messa pessena*" (apabila seseorang tidak mempunyai *siri'* lagi, maka masih mempunyai *pesse*). *Siri'* dan *pesse* merupakan konsep budaya dasar yang menentukan organisme tingkah laku masyarakat Bugis, yang mempengaruhi tingkah laku dan hasil tingkah lakunya.

Menyangkut ekspresi tingkah laku, *siri'* sering nampak lebih menonjol dari pada *pesse*, tetapi juga sering *pesse* lebih menonjol dalam melaksanakan suatu peristiwa. Menegakkan *siri'* dan *pesse*, adalah merupakan syarat mutlak sebagai seorang manusia dalam kehidupan masyarakat, karena merupakan tuntutan dan dorongan nilai budaya yang diterima, ditaati, dan dipertahankan. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak menegakkan *siri'* dan *pesse*, akan dipandang rendah martabatnya. Itulah sebabnya orang Bugis rela berkorban demi untuk menegakkan *siri'* dan *pesse*.

Siri' dan *pesse* yang mempengaruhi segala tingkah laku seseorang dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat, tercermin sifat-sifat terbuka terhadap sesamanya, berani mempertahankan hak dan kewajiban, konsekuen dalam pendirian, tegas dalam tindak-

an, suka menolong sesamanya, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sikap penyerahan diri kepada Tuhan, tercermin dari ungkapan dalam kehidupan masyarakat Bugis yang menyatakan, bahwa "*de'nalabu mattana essoe ri tentangna bitarae*" yaitu bermakna "orang tidak akan mati sebelum ajalnya". Oleh karena itu, orang Bugis berpegang teguh pada pendirian semula, sebagaimana ungkapan dalam masyarakat yang menyatakan bahwa "lebih baik tenggelam daripada kembali ke darat", bila layar telah terkembang".³²

Jika pengertian-pengertian *siri'* dan *pesse* yang dikemukakan di atas, diperhatikan dalam konteks kaitannya dengan perlawanan Abdul Hamid Petta Ponggawae terhadap pendudukan militer Belanda, maka tampaknya merupakan salah satu faktor mendorong dan penopang dalam perjuangan ketika itu. Sebab, Abdul Hamid Petta Ponggawae, dan pemimpin-pemimpin lainnya, harus memperlihatkan tanggung jawab dan harga dirinya sebagai seorang pemimpin yang berwibawa di masyarakat atau di mata rakyat yang di pimpinnya karena serangan militer yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap bangsa dan tanah airnya. Dengan semangat perjuangan yang pantang menyerah dan dukungan penuh dari rakyat yang dipimpinnya, mereka tampil melakukan perlawanan dan pertarungan mati-matian hingga tetesan darah yang terakhir demi menegakkan harga diri mereka dan untuk membela martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Demikian pula dukungan rakyatnya tidak perlu diragukan lagi. Sebab, sikap rakyat tidak hanya sekedar memberikan atau memperoleh "simpati diam", melainkan juga dalam bentuk dukungan aktif yang diwujudkan dengan kesediaan mereka untuk berkorban. Hal ini tercermin dalam ungkapan di masyarakat

³² Gonggong, 2004, *loc. cit.*; Kadir, 1984, *op. cit.*, hlm. 37-38.

Bugis yang menyatakan bahwa "*Polo pang polo panni assaleng puakku mua, narekko naposiri'ni puatta, napomateni tu joana*" (saya merelakan paha dan sayap atau tangan saya patah, asal-kan di dalam membela rajaku atau pemimpin, kalau rajaku atau pemimpinku sudah merasakan sesuatu yang memalukan, maka rakyat pengikutnya sudah harus bersedia mati).³³ Demikianlah gambaran secara singkat mengenai pandangan dan sikap masyarakat, khususnya menyangkut masalah *siri'* dan *pesse* dalam kaitannya dengan perlawanan Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae terhadap pendudukan militer Belanda pada 1905.

Kehidupan Ekonomi dan Politik di Bone

Masalah kehidupan sosial ekonomi di daerah Bone, sebenarnya barulah dapat dikatakan stabil sesudah pulihnya keamanan di daerah itu. Jauh sebelum perang 1905, pergolakan-pergolakan silih berganti dan melanda hampir seluruh permukaan wilayah kekuasaan Kerajaan Bone. Misalnya, perang dengan pemerintahan Inggris pada 1914 – 1816 dan perang dengan pemerintah Belanda pada 1924 – 1825, perang pada 1857-1859, dan perang pada 1859-1860, serta beberapa peristiwa lainnya. Pergolakan-pergolakan di wilayah itu terus berlanjut hingga pemerintah Belanda melancarkan "politik pasifikasi" (politik perdamaian) atau penaklukan dengan kekuatan militer terhadap Bone pada 1905. Pergolakan-pergolakan itu tidak dapat disangkal bahwa telah mengakibatkan tidak stabil dan terhambatnya perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kekuasaan Kerajaan Bone.

³³ Gonggong, 1992, *op. cit.*, hlm. 87.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada umumnya penduduk daerah Bone adalah bermata pencaharian pokok sebagai petani, seperti halnya daerah-daerah di Sulawesi Selatan lainnya. Bahkan sampai dengan awal abad ke-20, mata pencaharian pokok penduduk daerah Bone adalah di bidang pertanian, sehingga tipe Kerajaan Bone digolongkan ke dalam tipe kerajaan agraris. Oleh karena makanan pokok penduduk Bone adalah beras dan jagung, sehingga produksi pertaniannya yang utama ialah kedua jenis komoditas itu dan produksinya cukup untuk memenuhi keperluan penduduk Bone. Hal ini dimungkinkan karena terdapatnya sawah dan ladang yang cukup luas dan terkenal subur. Di samping itu, dihasilkan pula berbagai jenis komoditas lainnya, seperti ubi-ubian, kacang-kacangan, dan keladi atau talas, serta berbagai jenis buah-buahan, seperti mangga, jambu, nangka, pepaya, kelapa, durian, langsung, dan sukun. Demikian pula gula aren atau enau banyak terdapat atau dihasilkan dari daerah Bone.³⁴

Selain itu, sebagian penduduk Bone bermata pencaharian di bidang perikanan dan peternakan. Ikan laut ditangkap sepanjang pesisir pantai Teluk Bone. Sementara ikan air tawar ditangkap di Sungai WalanaE dan Sungai Cenrana, serta sungai-sungai lainnya. Ikan kering yang telah diasingkan diangkut dengan kuda beban dari daerah-daerah di sepanjang pesisir pantai Teluk Bone ke daerah-daerah pedalaman di sebelah barat, sehingga kebutuhan ikan untuk seluruh daerah Bone dapat terpenuhi. Sedangkan di bidang peternakan, pada umumnya dilakukan secara sederhana dan kecil-kecilan dengan sistem melepas binatang ke alam bebas untuk mencari makanan sendiri dan pemiliknya hanya melihat sekali-sekali saja. Adapun jenis binatang peliharaan di daerah

³⁴ Kadir, Harun, dkk., 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 64.

Bone ketika itu, yaitu antara lain kerbau, kuda, kambing, ayam dan itik.³⁵

Untuk penerangan lampu rakyat mempergunakan minyak kemiri, minyak kelapa dan buah *pude* (sejenis tumbuhan yang buahnya bulat-bulat lebih besar sedikit dari pada kelereng dan mengandung minyak) yang dihasilkan dalam negeri sendiri dengan jumlah yang cukup. Kebutuhan akan alat-alat rumah tangga dan pakaian dipenuhi dengan hasil buatan sendiri. Dalam hal kebutuhan pangan, rakyat Bone tidak perlu tergantung dari luar, sebab sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ketika itu.

Kegiatan penduduk di bidang pelayaran dan perdagangan melalui pelabuhan BajoE, Pallime, Kajuara, Mare, Pattiro, Pallette, dan daerah-daerah pantai lainnya, telah membuka daerah Bone bagi dunia luar. Ketika itu, mereka telah terlibat dalam dunia pelayaran dan perdagangan, serta telah menjalin hubungan dagang negeri atau daerah, seperti Singapura, Jakarta (Batavia), Tegal, Surabaya, Makassar, dan daerah-daerah lainnya di Nusantara. Dari daerah-daerah itu, para pedagang membawa berbagai macam barang dagangan, seperti barang pecah belah, alat-alat rumah tangga, kain atau pakaian, dan lain-lain. Barang dagangan itu, diangkut dengan perahu yang pada umumnya berdaya muatan 50-80 ton dan menurunkannya di pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Bone. Kemudian, barang-barang impor tersebut, diangkut dengan kuda beban bersama kebutuhan lainnya, seperti ikan kering, garam, dan lain-lain ke daerah-daerah pedalaman.³⁶

Sedangkan kapal-kapal dari daerah lain dan negara-negara tetangga itu biasanya tidak sampai berlayar ke Bone, tetapi hanya sampai di Makassar. Di Makassar, Singapura, Malaka dan Filipina,

³⁵ Hamzah, Aminah P., 1984, *op. cit.*, hlm. 50; Kadir, 1978, *op. cit.*, hlm. 64.

³⁶ Kadir, 1978, *op. cit.*, hlm. 64-65.

orang Bone berkenalan dengan orang Cina, India, dan Arab untuk urusan dagang. Hubungan dengan sesama bangsa Indonesia dan Melayu tentu lebih mesra dari pada hubungan dengan orang Cina, India, dan Arab. Namun pada dasarnya hubungan-hubungan itu adalah hubungan dagang yang bersifat lugas.³⁷

Sampai dengan akhir abad ke-19, di daerah Bone belum ada pedati atau kereta kuda, jalanan dan jembatan modern juga belum dibuat. Semuanya masih bersifat serba darurat. Sungai Canrana dan Sungai WalanaE, yang menghubungkan negeri-negeri di sepanjang aliran sungai-sungai tersebut, mempunyai arti yang amat penting untuk penghidupan masyarakat.

Sementara mengenai masalah kehidupan politik di daerah Bone pada awal abad ke-20, diuraikan mengenai bangsawan dan kepemimpinan karena hal itu dipandang dapat menuntun untuk memahami tindakan dan dukungan rakyat Bone dalam perjuangan menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Berbicara tentang bangsawan dan kepemimpinan pada masa lampau, pada dasarnya tidak terlepas dari sistem stratifikasi sosial yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dari gambaran singkat tentang stratifikasi sosial sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Bugis Bone dikenal dengan adanya lapisan *anakarung*, *tomaradeka*, dan *ata*. Lapisan *anakarung* inilah yang disebut sebagai golongan bangsawan dan merupakan lapisan teratas dalam struktur sosial di masyarakat serta memiliki kedudukan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan lapisan *tomaradeka* dan *ata*, merupakan lapisan orang kebanyakan yang berada di bawah pengaruh golongan bangsawan. Seseorang yang dilahirkan dari lapisan atau golongan bangsawan cenderung untuk

³⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

menjadi pemimpin.³⁸

Namun tidak semua anggota dari lapisan bangsawan dapat menduduki jabatan puncak atau pimpinan tertinggi di masyarakat. Sebab, dalam hal ini harus didasarkan pada derajat kebangsawanan yang melekat pada dirinya. Pengukuran derajat kebangsawanan didasarkan atas hubungan perkawinan, dan derajat keturunan dihitung berdasarkan derajat kebangsawanan ayah dan ibu. Salah satu contoh, seorang bangsawan tinggi yang menikah dengan putri bangsawan yang tinggi pula, maka dipandang masih memiliki kemurnian darah bangsawan yang mengalir dalam tubuh keturunannya. Tetapi jika seorang bangsawan tinggi yang menikah dengan seorang putri dari lapisan *tomaradeka*, maka kemurnian darah keturunannya berkurang dan derajat kebangsawannya pun lebih rendah dari ayahnya.³⁹

Semakin murni darah kebangsawanan seseorang, semakin tinggi derajat kebangsawannya, dan ini menentukan kedudukan kepangkatan kekuasaan, dan hak-hak istimewa yang dimilikinya. Dalam hubungan ini, baik dalam politik maupun sosial, derajat kebangsawanan menentukan hubungan perintah. Bangsawan yang memiliki derajat lebih rendah tidak diperkenankan melaksanakan kekuasaan atau perintah kepada bangsawan yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bang-

³⁸ Paeni, Mukhlis, 1986. "Landasan Kultur Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar", dalam *Dinamika Bugis Makassar*. Ujung Pandang: PLPIIS, hlm. 23. Namun demikian tidak berarti bahwa lapisan di luar golongan bangsawan, seperti *tomaradeka* tertutup peluang untuk menempati kedudukan sosial yang lebih tinggi. Sebab, dengan prestasi atau reputasi sosial, misalnya *topanrita*, *towarani*, *tosugi*, dan *tosulesana*, seseorang dapat menjadi pemimpin, yang berarti orang yang akan diikuti perintahnya. Bahkan dari lapisan *ata* atau budak dapat mencapai tingkatan yang lebih tinggi di bidang-bidang tersebut di atas dan dapat pula menjadi *tomaradeka*. Dengan demikian dalam status sosial atau sistem kepemimpinan Bugis-Makassar ada keluesan dalam mobilitas sosial secara horisontal yang diakui dalam tradisi (Gonggong, 1992, *op. cit.*, hlm. 67).

³⁹ Gonggong, 1992, *op. cit.*, hlm. 66-67; Paeni, Mukhlis, 1986, *op. cit.*, hlm. 24.

sawan yang patut dipilih untuk menduduki kepangkatan tertinggi atau sebagai pemimpin adalah mereka yang berdarah murni bangsawan.⁴⁰ Di Bone misalnya yang dipilih sebagai pimpinan kerajaan (*raja* atau *mangkau*) adalah yang berada pada lapisan *anak arung matase* atau *anak arung pattola sengengeng* dan *anak pattola manganre*. Sehubungan dengan itu, perlu dikemukakan disini komentar dari Andi Mappasissi, bahwa "*Naiya Bone tenatola rajeng, tennakarungi cerak*" yang berarti bahwa "Kerajaan Bone, jabatan *raja* atau *mangkau* tidak boleh diduduki oleh *ra-jeng* (*anak rajeng*), dan tidak boleh diperintah oleh *cerak* (*anak cerak*)".⁴¹

Meskipun bangsawan dan derajat kebangsawanan memegang peranan penting dalam kedudukan kepemimpinan dan pengaruh, namun bukanlah merupakan satu-satunya persyaratan dalam kepemimpinan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai persyaratan dalam kedudukan kepemimpinan adalah sifat-sifat pribadi yang menunjukkan keunggulan pribadi, yang dikaitkan dengan kedudukan dan peranan kepemimpinan dalam masyarakat bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, sifat-sifat pribadi yang diharapkan merupakan panutan. Persyaratan yang berhubungan dengan sifat-sifat pribadi itu, dapat diketahui dari pesan Kajao Laliddong, yang menyatakan bahwa ada empat syarat seseorang dapat dipilih menjadi pemimpin atau pemegang kekuasaan. *Pertama* adalah memiliki karsa (*kanawa-nawa' pi*). Tandanya dari orang yang memiliki karsa, yaitu takut kepada dewata, takut berkata buruk, takut berbuat aniaya, dan takut tidak jujur. *Kedua* adalah jujur (*malempu' pi*). Tandanya dari orang yang jujur ialah bekerja dengan cermat, melakukan perbuatan yang

⁴⁰ Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 32.

⁴¹ Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir, 1993. *Biorafi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim*. Ujung Pandang Depdikbud, hlm. 57.

benar, melakukan hal yang baik, dan berbuat hal yang sungguh-sungguh. *Ketiga* adalah berani (*waranipi*). Tandanya orang berani adalah tidak takut dikedepankan, tidak takut dibelakangkan, tidak takut mendengar berita, dan tidak takut menjumpai lawan. *Keempat* adalah kaya (*sugi' pi*). Tandanya dari orang yang kaya ialah tidak kekurangan akal budinya, tidak kekurangan jawaban dan jawaban yang tepat selalu digunakan, mahir dalam semua pekerjaan, dan tidak berkekurangan dalam mengajukan pikiran yang berguna.⁴²

Jika disimak dari pesan Kajao Laliddong tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa kepemimpinan yang didambakan atau kedudukan kepangkatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh derajat kebangsawanannya, tetapi juga pada sifat-sifat pribadi menunjukkan keunggulan pribadi atau reputasi sosial, seperti kejujuran, kepandaian, keberanian, kemanusiaan, dan keadilan. Dari semua itu, kejujuranlah yang merupakan pangkal dari semua persyaratan lain yang dikehendaki harus dimiliki seorang pemimpin. Sebab, sumber kepandaian, keberanian, kemanusiaan, dan keadilan adalah kejujuran.⁴³

Itulah sebabnya tidak secara otomatis seorang anak raja atau penguasa dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja atau penguasa. Apabila sang anak raja telah terpilih untuk dijadikan calon pengganti ayahnya, yang umumnya melalui pertimbangan dewan adat atau kerabat terdekat, maka sang anak raja itu diwajibkan mencari atau memperkaya pengalamannya di masyarakat. Ini dimaksudkan agar jika tiba saatnya menjadi seorang pemimpin di masyarakat, maka ia dapat mengetahui dengan baik apa yang menjadi keinginan rakyatnya, kerisauan

⁴² Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 33.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 34-35.

hati rakyatnya dan masalah-masalah yang dihadapi rakyatnya. Tentu saja ia harus memperlihatkan tingkah laku yang terpuji di masyarakat, termasuk apa yang dipesankan oleh Kajao Laliddong tersebut, apabila ia ingin mendapat dukungan atau simpati dari masyarakat.⁴⁴

Tingkah laku atau moral seorang raja atau pemimpin, jelas merupakan faktor yang sangat menentukan berhasil tidaknya seorang pemimpin di masyarakat. Sebab, moral seorang pemimpin merupakan sasaran penilaian yang utama dari rakyat yang dipimpinnya. Apabila moral seorang pemimpin atau raja telah dinilai terpuji oleh rakyatnya, maka tidak diragukan lagi bahwa adat akan mendukungnya, dan tidak diragukan pula simpati rakyat kepadanya. Kesediaan berkorban dari anggota masyarakat termasuk kerelaan untuk mengorbankan harta benda dan jiwanya yang paling berharga, dan terus mendukung apabila moral seorang pemimpin atau penguasa memperlihatkan pula kesediaan berkorban guna melindungi kepentingan rakyatnya. Maksudnya, sang pemimpin menjadi pelindung dan tidak memperkosa hak serta menyayangi rakyat yang dipimpinnya seperti sang pemimpin menyayangi diri dan keluarganya sendiri. Namun jika moral sang pemimpin itu justru sebaliknya, seperti hanya mementingkan diri dan keluarganya saja, atau tidak adil dalam memutuskan perkara di masyarakat, egois, serakah (korup), tidak memperjuangkan nasib rakyatnya, dikuasai oleh nafsu angkara murka, maka dapat dipastikan bahwa sang pemimpin yang bersangkutan dibenci oleh masyarakat yang dipimpinnya.⁴⁵

Selain itu, masalah semangat demokrasi juga harus dimiliki oleh seorang raja atau pemimpin dalam memimpin rakyatnya. Se-

⁴⁴ Abdullah, Hamid, 1991, *op. cit.*, hlm. 77.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

bab, unsur demokrasi ini menyangkut hak manusia untuk membela dirinya dari perbuatan yang tidak adil dari pemimpinnya. Melalui demokrasi, rakyat dapat melakukan kontrol langsung terhadap semua kebijakan rajanya, menyampaikan keinginannya, mengungkapkan aspirasinya, dapat melakukan pilihan terbaik dalam hidupnya. Oleh karena itu, meskipun raja dan kelompok bangsawan menduduki posisi sebagai lapisan teratas dalam struktur sosial di masyarakat, dan sebagai pemimpin puncak dalam struktur politik atau kekuasaan, tetapi tidak memiliki kekuasaan yang bersifat mutlak. Dengan kata lain raja dan kelompok bangsawan tidak dapat menjalankan sistem politik yang bersifat sewenang-wenang terhadap rakyat, sebagaimana tercermin dalam ungkapan yang merupakan konsensus di masyarakat yang menyatakan bahwa :

*"Rusa taro arung, terrusa taro ade
Rusa taro ade, tenrusa taro anang
Rusa taro anang, tenrusa taro ta maega"*

Artinya :

Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat
Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum
Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat.⁴⁶

Konsensus tersebut menunjukkan bahwa raja atau penguasa dalam menjalankan kepemimpinannya harus bermuara kepada kepentingan rakyat. Berbeda halnya dengan kebanyakan pemimpin sekarang yang tidak melindungi dan menyayangi rakyatnya. Bahkan lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya atau kelompoknya, memperkosa hak rakyat yang dipimpinnya, tidak adil, egois, serakah (korup), tidak memperjuangkan nasib

⁴⁶ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 87-88; Abdullah, Hamid, 1991, *op. cit.*, hlm. 81.

rakyatnya, dikuasai oleh nafsu angkara murka, dan sebagainya. Itulah sebabnya tidak sedikit pemimpin dewasa ini, yang tidak ditaati atau dibenci oleh rakyat yang dipimpinnya.

Kemudian, jika dikaitkan dengan sejarah perjuangan dalam melawan penjajahan, baik ketika melawan Kompeni (VOC), maupun ketika melawan pemerintahan Inggris dan pemerintah Belanda, maka pihak raja-raja Bone dan kelompok bangsawan yang selalu memimpin perlawanan tersebut. Demikian pula rakyat senantiasa mendukung dan membantunya secara langsung dalam perjuangan yang dilakukan oleh raja-raja mereka dan kelompok bangsawannya. Artinya raja dan kaum bangsawan dengan rakyat, ada ikatan historis yang kokoh dalam perjuangan melawan Belanda, yang menyebabkan kedua kelompok ini selalu bahu membahu atau melakukan kerjasama yang harmonis dalam kaitannya untuk mengusir penjajahan Belanda dari tanah air mereka. Kedua kekuatan itu terpadu dalam kehidupan masyarakat, dan semakin kuat ikatannya pada saat mereka menghadapi ancaman dari pemerintah Hindia Belanda. Inilah yang menyebabkan semangat perlawanan dalam perjuangan melawan Belanda, tidak pernah padam dalam suatu periode tertentu. Mereka tidak pernah patuh sepenuhnya atau taat diperintah seenaknya oleh pemerintah Belanda, tanpa melakukan reaksi terhadap Belanda yang menjajah bangsa dan tanah airnya.⁴⁷

Buktinya bahwa semangat perjuangan mereka senantiasa berkobar, dapat dilihat dari rentetan peperangan antara Bone dengan pemerintah Belanda, yaitu perang dalam tahun 1824-1825, dan perang dalam tahun 1857-1859, perang dalam tahun 1859-1860, dan perang dalam tahun 1905. Tentu saja yang

⁴⁷ Abdullah, Hamid, 1991, *op. cit.*, hlm. 48-50.

menjadi pelopor dalam rentetan perlawanan tersebut, adalah raja-raja mereka dan kelompok bangsawannya, yang merasa terhina karena tanah airnya terancam atau direbut dan dijajah oleh Belanda. Semangat perlawanan yang tidak pernah padam tersebut, tentu tidak terlepas dari budaya *siri*' yang mereka miliki, yaitu budaya yang menanamkan unsur harga diri dan martabat yang harus dipertahankan oleh setiap orang atau kelompok sosial di masyarakat. Raja-raja dan kelompok bangsawan mereka telah memperlihatkan unsur harga diri itu dalam perjuangan melawan Belanda. Meskipun mereka mengalami kekalahan berkali-kali dari Belanda yang memiliki persenjataan yang jauh lebih baik, tetapi semangat perjuangan mereka tidak pernah padam. Kekalahan-kekalahan yang mereka alami tidak membuat mereka jera, apalagi takut menghadapi Belanda. Justru dari kekalahan demi kekalahan yang mereka alami, membuat mereka semakin teguh dalam pendirian untuk terus melakukan perlawanan atau pertarungan dengan Belanda.

**LATAR BELAKANG KELUARGA
DAN PERLAWANAN
ABDUL HAMID PETTA PONGGAWAE**



Perlawanan Bone terhadap Belanda, tampaknya bukanlah hal yang baru tampak ketika pemerintah Belanda berusaha memperluas wilayah dan memperkuat kedudukan kekuasaannya di daerah Sulawesi Selatan pada abad ke-20. Jauh sebelumnya, yaitu menjelang berakhirnya kekuasaan *VOC* (*Verenigde Oost Indche Compagnie*) pada penghujung abad ke-18, telah terjadi tindak perlawanan atau konflik antara kedua belah pihak. Benih-benih konflik itu kembali bergelorah ketika pemerintah Belanda yang menggantikan kedudukan *VOC* berusaha memulihkan kembali kedudukan kekuasaannya dan mendesak Bone untuk menandatangani Kontrak Bungaya yang diperbaharui pada 1824. Pembaharuan kontrak inilah yang memicu terjadi konflik terbuka berupa perang antara Bone dengan Belanda. Konflik antara kedua belah pihak kembali memuncak ketika pemerintah Belanda hendak menguasai secara langsung seluruh daerah Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang itu, maka dalam pembahasan bab ini terlebih dahulu difokuskan pada uraian mengenai latar belakang keluarga Abdul Hamid Petta Ponggawae, sekilas hubungan Bone dengan Belanda, campur tangan Belanda terhadap Bone, munculnya antipati terhadap pemerintah Belanda, dan persiapan dalam menyongsong perang.

Lingkungan Keluarga

Abdul Hamid adalah putra sulung dari La Pawawoi Karaeng Segeri, Raja Bone XXXI, dari hasil perkawinan dengan isterinya yang bernama I Karimbo Daeng Tamene (Pette Mene). Sedangkan La Pawawoi Karaeng Sigeri adalah putra dari Singkeru Rukka Arung Palakka Sultan Ahmad Idris Matinroe ri Topaccing, Raja Bone XXIX.¹ Dengan demikian, maka Abdul Hamid adalah keturunan raja-raja dari Kerajaan Bone, karena baik ayahnya maupun kakeknya adalah pernah menjadi *mangkau ri Bone* atau raja Bone. Sementara ibu Abdul Hamid bernama I Karimbo Daeng Tamene atau Pette Mene, adalah putri dari Arung Mangempang (Barru).² Latar belakang keluarga Abdul Hamid dari garis keturunannya ibunya, agak sulit untuk diketahui lebih lanjut karena catatan yang ada hanya menyebut nama gelarnya. Meskipun demikian, dapat dipastikan bahwa garis keturunan Abdul Hamid dari pihak ibunya adalah merupakan keturunan raja-raja dari Kerajaan Barru.

Adapun saudara kandung Abdul Hamid adalah bernama I Munca (Petta Sagala). Sementara saudara Abdul Hamid dari istri La Pawawoi Karaeng Sigeri yang kedua yang bernama I Kalau atau Daeng Kalau adalah Mappegau Arung Sijelling, Muhammad Tahir Kapitang Kaju, Yabe Arung Ajjalireng, Tassakka Petta Sonna. Saudara yang lainnya, yaitu dari istri La Pawawoi Karaeng Sigeri yang ketiga, ketika ia diasingkan ke Bandung yang bernama Fatimah adalah Sitti Halijah Petta Tungke.³

¹ Hamzah, Aminah P., dkk., 1993. *Biografi Pahlawan La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone XXXI*. Ujung Pandang: Depdikbud, hlm. 34.

² Latar belakang keluarga Abdul Hamid Petta Ponggaewae berdasarkan Silsilah raja-raja Bone. Koleksi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.

³ Arfah, Muhammad, 1977. *Baso Pagilingi Abdul Hamid Panglima Besar Kerajaan Bone Melawan Belanda*, Ujung Pandang: Depdikbud, hlm. 29.

Latar belakang keluarga Abdul Hamid yang menari disimak dari pihak ayahnya sebagai keturunan raja-raja Bone adalah perlawanannya terhadap pemerintah Belanda. Dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, raja-raja Bone bersama rakyatnya, telah tercatat dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan di daerah ini, sebanyak empat kali terlibat perang besar dengan Belanda. *Pertama*, yaitu Perang Bone 1824-1825. Dalam peperangan ini, Raja Bone We Maniratu Arung Data MatinroE ri Kessi (Raja Bone XXV), memimpin rakyatnya melakukan pellawanan terhadap pasukan Belanda yang dipimpin oleh *General Major* (Mayor Jenderal) J. J. van Geen. Pada mulanya laskar Bone melancarkan serangan terhadap kedudukan pemerintah Belanda dan berhasil mengalahkan pasukan Belanda di Pangkajene, Labbakkang, Sigeri, Tanete, dan Maros pada September dan Oktober 1824.⁴ Tetapi pada akhirnya daerah-daerah tersebut berhasil direbut kembali oleh pasukan Belanda dan bahkan pertahanan Bone di BajoE berhasil pula direbut pada Maret 1825. Kemudian, menyusul pula Ibukota Kerajaan Bone, Lalebbata (Watampone) direbut oleh pasukan Belanda, setelah terlebih dahulu raja Bone bersama pembesar Kerajaan Bone meninggalkan ibukota dan mengungsi ke daerah pedalaman.⁵

Usaha pasukan Belanda mengikuti jejak laskar Bone ke daerah pedalaman tidak berhasil, karena tidak mengetahui dimana raja Bone dan pengikutnya berada. Sementara di lain pihak, untuk mengimbangi pasukan Belanda, laskar Bone menjalankan taktik dan strategi perang gerilyah, karena siasat ini dianggap le-

⁴ Abduh, Muhammad,dkk., 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 51-52.

⁵ Mappangara, Suriadi, 1996. *Kerajaan Bone Abad XIX, Konflik Kerajaan Bone – Belanda 1816-1860*. Yogyakarta: Tesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. ...; Abduh, 1985, *op. cit.*, hlm. 53-54.

bih ampuh dalam menghadapi pasukan Belanda yang lebih kuat persenjataannya. Oleh karena semakin gencarnya taktik perang gerilya yang dilancarkan oleh laskar Bone dan banyaknya serdadu Belanda yang terserang penyakit, sehingga Mayor Jenderal van Geen bersama pasukannya dipanggil kembali ke Batavia dan meninggalkan Pelabuhan BajoE pada 11 April 1825. Di samping itu, juga karena di Pulau Jawa mulai perlawanan Pangerang Diponegoro.⁶ Dengan demikian, untuk sementara waktu pemerintahan Belanda menghentikan serangannya terhadap Bone.

Kedua, yaitu Perang Bone pada 1959. Dalam peperangan ini, Raja Bone XXVIII, Pancai Tana Besse Kajuara, memimpin rakyatnya melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang dipimpin oleh *General Major* (Mayor Jenderal) E. C. C. Steinmetz.⁷ Raja Bone yang mendapat dukungan dari segenap rakyatnya, memberikan perlawanan mati-matian, tetapi akhirnya benteng pertahanan Bone di BajoE dapat direbut oleh pasukan Belanda. Kemudian, menyusul Watampone, Ibukota Kerajaan Bone, setelah terlebih dahulu raja Bone bersama pasukannya meninggalkan istana menuju benteng pertahanan di daerah pedalaman, yaitu di daerah Pasempe. Benteng pertahanan ini letaknya sangat strategis karena dikelilingi oleh pegunungan dan merupakan benteng pertahanan Kerajaan Bone yang terakhir. Karena kuatnya benteng pertahanan ini dan semakin gencarnya taktik perang gerilya yang dilakukan oleh laskar Bone, sehingga Mayor Jenderal E. C. C. Steinmetz bersama pasukannya kembali

⁶ Morris, D. F. van Braam, 1890, *Het Landschap Loehoe, Getrokken uit een rapport van den Gouverneur van Celebes, den her* (diterjemahkan oleh Mappasanda, H.A.M., 1992. *Kerajaan Luwu, Menurut Catatan Van Braam Morris*). Ujung Pandang: Depdikbud, hlm. 12; Abduh, 1985, *op. cit.*, hlm. 54-55.

⁷ Sagium MD., 1982. *Andi Pagerang Petta Rani, Hasil Karya dan Pengabdian*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 33; Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir, 1993. *Biografi Pahlawan Andi Mappayukki Sultan Ibrahim*. Ujungpandang: Depdikbud, hlm. 61.

ke Makassar.⁸ Dengan demikian serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda secara besar-besaran terhadap Bone kembali mengalami kegagalan.

Ketiga, yaitu Perang Bone pada 1859-1860. Dalam peperang ini, Raja Bone Pancai Tana Besse Kajuara kembali memimpin rakyatnya melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang dipimpin oleh *Luttenant General* (Letnan Jenderal) Swieten.⁹ Sebelum pemerintah Belanda melakukan serangan besar-besaran terhadap Bone, mereka terlebih dahulu menguasai daerah-daerah sekitarnya yang dianggap dapat memberikan bantuan terhadap Bone.¹⁰ Setelah itu, barulah ibukota kerajaan diserang, sehingga terjadi pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran itu, tidak sedikit jatuh korban di kedua belah pihak, antara lain Putra Mahkota Pamandeng Rukka di pihak Bone dan Mayor Kroesen di pihak pasukan Belanda.¹¹ Namun pasukan Belanda berhasil merebut Lalebbata-Watampone, sehingga raja Bone bersama laskarnya mengungsi ke Pasempe. Pasukan Belanda terus mengikutinya, sehingga kembali terjadi pertempuran sengit di Pasempe. Dengan semakin gencarnya, serangan pasukan Belanda dan untuk menghindari jangan sampai terlalu banyak rakyat yang gugur serta menderita kerugian harta benda, akhirnya raja Bone bersama pengikutnya yang setia meninggalkan Pasempe dan selanjutnya menuju Suppa.¹²

⁸ Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir, 1993, *op. cit.*, hlm. 61-62; Daeng Patunru, Abdul. Razak, dkk., 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 261.

⁹ Ali, Andi Muhammad, 1986. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Damai, hlm. 53; Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir, 1993, *op. cit.*, hlm. 63.

¹⁰ Daeng Patunru, Abd. Razak, dkk., 1989, *op. cit.*, hlm. 263-264.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 265; Ali, Andi Muhammad, *op. cit.*, hlm. 63.

¹² Daeng Patunru, Abd. Razak, dkk., 1989, *op. cit.*, hlm. 266; Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir, 1993, *op. cit.*, hlm. 59.

Keempat, yaitu Perang Bone pada 1905. Dalam peperangan ini Raja Bone XXXI, La Pawawoi Karaeng Sigeri, tampil memimpin rakyatnya melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel C. van Loenen.¹³ Meskipun raja Bone yang mendapat dukungan penuh dari rakyatnya memberikan perlawanan mati-matian, tetapi pada penghujung pertarungan habis-habisan itu, pihak pasukan Belanda yang keluar sebagai pemenang. Pada perang Bone inilah, Abdul Hamid memegang peranan penting sebagai Panglima Perang Tertinggi (*Petta Pong-gawae*) Kerajaan Bone dan senantiasa mendampingi ayahnya hingga ia gugur sebagai kusuma bangsa dalam pertempuran yang sangat menentukan di Pegunungan Awo pada 18 November 1905.¹⁴

Jika disimak perjuangan raja-raja Bone dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa asal usul Abdul Hamid sebagai keturunan raja-raja Bone adalah keluarga pejuang yang pantang menyerah dan rela mengorbankan segala-galanya. Sebab, bukan hanya harta benda yang bersedia dikorbankan dalam perjuangan melawan Belanda, tetapi juga mahkota kerajaan dan bahkan nyawanya sekalipun rela dikorbankan dalam perjuangan menegakkan, membela, dan mempertahankan kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Abdul Hamid dilahirkan di Lalebbata-Watampone sekitar 1849.¹⁵ Kedua orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya serta lingkungan masyarakatnya, senantiasa mendoakan dan menumpahkan harapan kepada Abdul Hamid, agar kelak men-

¹³ Hamzah, Aminah, P., dkk., 1993, *op.cit.*, hlm. 65-81; Ali, A. Muh. 1984. *Rumpa'na Bone (Perang Bone)*. Watampone: Damai.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 39; Arfah, Muhammad, 1977, *Baso Pagilingi Abdul Hamid Panglima Besar Kerajaan Bone Melawan Penjajahan Belanda*, *op.cit.*, hlm. 45.

¹⁵ Ali, A. Muh, 1984, *op. cit.*, hlm. 29; Amir, Muhammad, 2003. *Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905*. Makassar: Eramedia.

jadi manusia yang dapat berbakti kepada orang tua dan terpuji tingkah lakunya serta menjadi pemimpin yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka sejak masa kanak-kanak Abdul Hamid selalu ditempah oleh orang tuanya dan segenap anggota kerabat yang terdekat yang berada dalam siklus kehidupannya.

Adapun yang menjadi penekanan dalam pembinaan mental terhadap Abdul Hamid, adalah menyangkut tingkah laku yang terpuji dalam pergaulan sosial di masyarakat. Termasuk dalam hal ini yang menyangkut etika dan moral manusia dalam kehidupan masyarakat. Sebab, penilaian masyarakat terhadap seseorang, baik yang menyangkut masalah moral dan etika maupun yang menyangkut masalah kehidupan religius, merupakan patokan untuk memperoleh simpati atau dukungan dari masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Masalah kepemimpinan juga merupakan pembinaan utama dari orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya. Ini dapat dipahami kalau Abdul Hamid ditempah oleh keluarganya sedemikian rupa, agar kelak di masyarakat dapat menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, melekat di hati rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena Abdul Hamid adalah seorang putra dan cucu dari raja Bone yang berstatus sebagai *anak pattola* atau *anak arung matase* (putra mahkota) di Bone, sehingga sewajarnya kalau ditempah menjadi seorang pemimpin yang mengayomi masyarakat atau rakyat yang hendak dipimpinnya. Dalam konsep kepemimpinan Bugis, seperti yang banyak tercatat dalam tradisi *lontarak*, seseorang pemimpin (meskipun bukan pemimpin puncak) mutlak kepemimpinannya harus

¹⁶ Arfah, Muhammad dkk., 1993, *op. cit.*, hlm. 62.

berorientasi kepada kehidupan demokrasi.¹⁷ Dalam hal ini terkandung makna bahwa seseorang pemimpin harus dapat menerima pandangan atau keinginan dari masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin tidak menutup diri dalam kehidupan masyarakat dan pemimpin pun harus dapat memelihara dialog dengan rakyatnya. Tugas melindungi atau mengayomi kehidupan rakyat atau masyarakat, adalah suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin.

Selain itu, masalah *siri`* dan *pesse* yang merupakan konsep budaya dasar bagi masyarakat Bugis-Makassar, juga selalu menjadi penekanan dalam pembinaan mental terhadap Abdul Hamid yang dilakukan oleh orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya. Budaya *siri`* dan *pesse*, jika diartikan secara harfiah maka bermakna rasa malu dan pedih atau perasan yang sedih yang mengandung unsur solidaritas terhadap orang lain. Bukan hanya itu, karena budaya *siri`* dan *pesse* juga mengandung kehormatan, harga diri atau martabat dan kesediaan berkorban atau mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk membantu kehidupan orang lain yang terkena musibah atau bencana. Seseorang yang telah mengamalkan budaya *siri`* dan *pesse* merupakan syarat mutlak sebagai seorang manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, mereka yang tidak menegakkan *siri`* dan *pesse* dipandang rendah martabatnya.¹⁸

Semua pembinaan mental yang dilakukan oleh orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya, sejak masa kanak-kanak telah

¹⁷ Farid, A. Zainal Abidin, 1973. *Beberapa Ungkapan Dalam Lontarak Tentang Kepemimpinan dan Pemerintahan*. (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, hlm. 6-24.

¹⁸ Abdullah, Hamid, 1991. *Andi Panerang Petta Rani, Profil Pimpinan yang Manunggal dengan Rakyat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Andi Mappasissi dan Andi Muh. Ali serta Andi Amir Sessu, *Wawancara* di Watampone pada tanggal 20 dan 21 serta 22 Januari 1997.

tertanam dengan baik dalam diri Abdul Hamid. Ia telah ditempah dengan norma-norma sosial dalam kehidupan keluarganya dan telah dimatangkan oleh kondisi kehidupan masyarakat sekitarnya. Jika disimak sifat-sifat Abdul Hamid dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerendahan hatinya dalam pergaulan sosial di masyarakat, berlaku adil terhadap masyarakat yang dipimpinnya, kerelaan melepaskan kedudukan dan jabatannya dari pada harus bekerjasama dengan Belanda yang ingin memeras dan menindas bangsanya, dan suka memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan (misalnya membantu Tanah Toraja),¹⁹ serta kerelaannya mengorbankan jiwanya demi untuk membela kehormatan bangsa dan tanah airnya, maka itu semua merupakan rahmat dari Tuhan. Sebab walaupun bagaimana karakter yang asli yang dimiliki seseorang, ikut pula membentuk kepribadiannya di masyarakat. Itulah sebabnya, tidak secara otomatis seorang anak manusia langsung dapat mewarisi sifat-sifat orang tuanya yang berbudi luhur. Adakalanya terjadi penyimpangan yang bersifat kontradiktif. Namun bagi Abdul Hamid, di samping memperoleh pembinaan mental yang intensif dari orang tuanya dan anggota kerabatnya, juga sifat-sifat asli yang dimilikinya sejak lahir mendukung hal tersebut.²⁰

Kehidupan pada masa kanak-kanak Abdul Hamid yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan adalah kehidupannya pada usia sekitar sepuluh tahun atau sebelas tahun. Sebab, ketika itu terjadi perang antara Bone dengan Belanda, yaitu perang pada tahun 1859 dan 1860.²¹ Meskipun rakyat Bone di bawah pimpin-

¹⁹ Ketika itu orang-orang Enrekang selalu menangkap orang-orang Toraja untuk dijual sebagai budak belia.

²⁰ Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 30. Hamzah, Aminah, P., dkk., 1993, *op. cit.*, hlm. 67.

²¹ Abdullah, Hamid, 1991, *op. cit.*, hlm. 14; Ali, A. Muh, 1984, *op. cit.*, hlm. 29.

an raja-rajaanya memberikan perlawanan mati-matian dalam peperangan itu, tetapi penghujung pertarungan habis-habisan itu, pihak pasukan Belanda yang keluar sebagai pemenang. Atas kekalahan itu, raja Bone bersama anggota dewan *Ade Pitu* terpaksa harus menandatangani kontrak politik, sebagai negeri pinjaman dari pemerintah Belanda.²² Dengan demikian, maka tidak dapat disangkal jika situasi politik yang dialami oleh Bone juga turut mempengaruhi kehidupan keluarga Abdul Hamid dan sikap permusuhan terhadap pemerintah Belanda turut membentuk kepribadiannya.

Pembinaan mental terhadap Abdul Hamid yang dilakukan orang tuanya dan segenap anggota kerabatnya berlangsung terus hingga ia memasuki usia remaja. Di samping itu, juga dilakukan pembinaan fisik. Salah satu pembinaan fisik di kalangan putra-putra kaum bangsawan sebagaimana lazimnya ketika itu, ialah perlombaan pacuan kuda dan berburu rusa. Oleh karena itu, sejak memasuki usia remaja, ia selalu ikut atau diikutkan pada lomba pacuan kuda dan berburu rusa sebagai penunggang kuda. Karena sifatnya yang nekat dan cepat mengambil keputusan ketika melakukan olah raga yang sangat menuntut keterampilan atau ketangkasan dan keberanian itu, sehingga ia nampak menonjol di antara putra-putra kaum bangsawan sebayanya. Adapun perlombaan pacuan kuda yang diadakan setiap tahun di Bone ketika itu adalah di SalekkoE. Sedangkan tempat pemburuan rusa yang terkenal adalah TellulimpoE.²³ Dengan demikian, maka dapat di-

²² Dalam Kontrak Politik itu, antara lain disebutkan bahwa Bone bersama Lamuru yang sejak dahulu termasuk daerah Pemerintahan Bone diubah dari statusnya sebagai anggota sekutu berdasarkan Perjanjian Bugaya tahun 1667 dan 1669, menjadi negeri pinjaman (Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 268).

²³ Fredercy, H. J., 1991. *Sang Jenderal*. Jakarta: Grafiti, Cetakan I; Arfah, Muhammad dkk., 1993. *Biografi Andi Mappanyukki*, *op. cit.*, hlm. 251; Andi Mappasissi, *Wawancara* di Watampone pada tanggal 20 Januari 1997.

katakan bahwa kedua olah raga tersebut, bukan hanya sekedar hiburan belaka, tetapi merupakan salah satu sarana pembinaan fisik untuk meningkatkan prestasi atau reputasi sosial seseorang di masyarakat.

Setelah memasuki usia dewasa, Abdul Hamid kawin dengan I Ceppi Arung Panyili. Dari hasil perkawinan itu lahir dua orang putra, yaitu Parenrengi dan Muhammad Siji. Dalam perkembangan kemudian, Abdul Hamid kawin lagi dengan I Kamendini Arung Kahu. Meskipun dari perkawinan itu, mereka tidak dikaruniai keturunan, tetapi ia mempunyai anak tiri yang bernama La Temmu Page Arung La Buaja. La Temmu Page kelak menjadi salah seorang panglima perang Bone dalam Perang Bone 1905. Sementara dari istri Abdul Hamid yang ketiga bernama I Cendra Datu Cinnong, dan mereka pun dikaruniai oleh Tuhan empat orang anak, yaitu La Pabbenteng, Tanra, Batari, Pakkale.²⁴

Romantika perjalanan hidup dan kehidupan Abdul Hamid, sejak masa kanak-kanak hingga dewasa telah menempahnya menjadi seorang manusia yang mengenal dan memahami lingkungan masyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Meskipun Abdul Hamid hidup dan ditempah di dalam lingkungan kaum bangsawan atau tembok feodalisme, tetapi tidak meyerapnya sebagai seorang manusia yang bersifat dingin terhadap dunia luar atau kehidupan lingkungan masyarakatnya. Bahkan di masa-masa selanjutnya, ia telah memperlihatkan tingkah laku yang terpuji di masyarakat, dan reputasi sosial yang mengagumkan, serta prinsip perjuangannya dalam melepaskan bangsanya dari cengkraman kaum penjajah kolonial.

Berkat pembinaan mental yang dilakukan oleh orang tuanya, dan anggota kerabatnya, termasuk kelompok pemangku adat, se-

²⁴ Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 29.

jak usia muda (kanak-kanak) terhadap Abdul Hamid telah tertanam dengan baik. Selain itu, juga pembinaan fisik yang dilakukan secara tekun, sehingga memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dipilih menjadi seorang pemimpin atau raja. Oleh karena itu, ketika Abdul Hamid baru berumur sekitar tujuh belas tahun (1866), ia telah diangkat menjadi Arung Lita.²⁵

Karier Abdul Hamid dalam perkembangan selanjutnya, ialah diangkat menjadi Arung Palakka. Ketika ia diangkat menjadi Arung Palakka, maka karier Abdul Hamid ke jenjang yang lebih tinggi semakin terbuka. Sebab berdasarkan adat kebiasaan, seorang putra bangsawan *anak pattola* yang berkedudukan sebagai Arung Palakka atau diberi gelar Arung Palakka, maka dapat dipastikan bahwa sesungguhnya ia dipersiapkan untuk menduduki tahta kerajaan.²⁶ Atau dengan perkataan lain bahwa apabila seseorang mendapat kedudukan dan gelar Arung Palakka, dalam perkembangan kemudian pada umumnya diangkat menjadi raja Bone. Ada beberapa bukti putra bangsawan yang dapat kedudukan dan gelaran Arung Palakka yang kemudian diangkat menjadi raja Bone, seperti La Tenrirua Arung Palakka diangkat menjadi Raja Bone XI, La Tenri Tatta Arung Palakka diangkat menjadi Raja Bone XV, La Padassajati Arung Palakka diangkat menjadi Raja Bone XVIII, To Appatunru Arung Palakka diangkat menjadi Raja Bone XXVI, dan La Singkeru Rukka Arung Palakka diangkat menjadi Raja Bone XIX.²⁷ Dengan demikian, maka sekiranya Abdul Hamid tidak gugur sebagai kusuma bangsa dalam

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30; Ernawati, 1997, *Perjuangan Baso Pagilingi Abdul Hamid Menentang Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Kerajaan Bone Pada Tahun 1905*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana IAIN Alauddin, hlm. 37.

²⁶ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 124.

²⁷ Ali, A. Muh. 1986, *op. cit.*, hlm. 90-92; Daeng Patunru, Abd. Razak, *op. cit.*, hlm. 106-269. Kecuali terhadap I Bengkung Karaeng Popo Arung Palakka, karena tidak direstui oleh pemerintah Hindia Belanda.

suatu pertempuran yang sangat menentukan dengan pasukan Belanda di Pegunungan Awo pada 18 November 1905, tentulah perjalanan sejarah hidupnya, tidak menutup kemungkinan kelak diangkat menjadi raja Bone menggantikan ayahnya La Pawawoi Karaeng Sigeri, Raja Bone XXXI.

Abdul Hamid kemudian diangkat lagi menjadi Arung Macege, yaitu salah satu anggota dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone.²⁸ Adapun ketujuh anggota dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone tersebut, adalah Arung Macege, Arung Pongceng, Arung Tibojong, Arung Tanete ri Awang, Arung Tanete ri Attang, Arung Ta`, dan Arung Ujung. Selain sebagai anggota dewan yang berhak memilih dan mengangkat raja Bone, mereka juga menangani bidang-bidang tertentu dalam pemerintahan, misalnya Arung Macege menangani Urusan Pemerintahan Umum, Arung Pongceng menangani Urusan Keamanan dan Pertahanan, Arung Tibojong menangani Urusan Kehakiman, Arung Tanete ri Attang menangani Urusan Pembangunan dan Pekerjaan Umum, Arung Ta` menangani Urusan Pengajaran dan Pendidikan, dan Arung Ujung menangani Urusan Penerangan dan Kerohanian.²⁹

Ketika La Pawawoi Karaeng Segeri diangkat menjadi raja Bone pada 1896, menggantikan saudaranya We Benringau Fatimah Banri (Raja Bone XXX), Abdul Hamid kemudian diangkat dan dilantik menjadi *pongawa* (panglima perang) Kerajaan Bone.³⁰ Abdul Hamid menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu La Pawawoi Karaeng Segeri sebagai *pongawa* Kerajaan Bone yang telah diangkat menjadi raja Bone.

²⁸ Muh. Arfah, 1977, *lo. cit*; Ernawati, 1997, *op. cit.*, hlm. 38.

²⁹ Ali, A. Muh. 1986, *op. cit.*, hlm. 79-81; Arfah, Muhammad,dkk., 1993, Biografi Pahlawan Andi Mappanyukki, *op. cit.*, hlm. 100.

³⁰ Abd. Razak Daeng Patunru, *op. cit.*, hlm. 272; Hamzah, Aminah, dkk., 1993, *op. cit.*, hlm. 36; Arfah, Muhammad, 1977, Baso Pagilingi Abdul Hamid, *loc. cit.*

Setahun setelah Abdul Hamid diangkat menjadi *pongawa* kerajaan, yaitu pada 1897, ia bersama laskarnya berangkat ke Tanah Toraja untuk membantu rakyat di sana yang sedang melakukan perlawanan terhadap orang-orang Enrekang yang sejak lama selalu masuk ke daerah Tanah Toraja menangkap orang-orang Toraja untuk dijual sebagai budak belian. Dalam peperangan ini Abdul Hamid bersama pasukannya berhasil menang dengan sangat memuaskan dan sangat menyenangkan bagi orang-orang Toraja. Demikian juga bagi mereka yang anti perbudakan.³¹

Dalam perkembangan kemudian, timbul suatu perselisihan antara Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dengan La Oddang Datu Larompong Arung Peneki yang menghalang-halangi pemasukan garam raja Bone ke Wajo melalui Sungai Cenrana. Karena penyelesaian perselisihan secara damai antara kedua belah pihak mengalami kegagalan, sehingga terjadi pertempuran. Ketika itu, Abdul Hamid bersama pasukannya memasuki Peneki untuk menyerang La Oddang Datu La Rompong, tetapi kebetulan tidak ada di sana. Kemudian, Abdul Hamid bersama pasukannya menyusul ke Sengkang, karena La Oddang Datu Larompong telah berada di Sengkang dan memperkuat benteng pertahanannya di sana. Oleh karena itu, maka terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Abdul Hamid di satu pihak dengan La Oddang Datu Larompong Arung Peneki bersama pasukannya pada pihak lain. Pada pertempuran itu, pasukan Kerajaan Bone yang dipimpin Abdul Hamid Petta Ponggawae membakar Kota Sengkang.³² Demikian secara singkat tentang berbagai jabatan yang pernah diduduki oleh Abdul Hamid dalam lingkungan Kerajaan Bone

³¹ Arfah, Muhammad, 1977, hlm. 30-31; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 273-274.

³² Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 274; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 31.

sampai kepada jenjang kariernya yang tinggi, sebagai *pongawa* Kerajaan Bone dan peranannya ketika itu. Sedangkan peranannya di dalam perang antara Bone dengan Belanda pada 1905, akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Sekilas Hubungan Bone Dengan Belanda

Hubungan baik antara Bone (Kerajaan Bone) dengan Belanda (*VOC*), yang telah dirintis dan dibina oleh Raja Bone La Tenritatta Arung Palakka, mulai mengalami keretakan pada masa pemerintahan Raja Bone La Tenritappu. Keretakan itu berawal ketika Batara Gowa Amas Madinah ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Sailon pada 1767. Atas tindakan Belanda itu, La Tenritappu sebagai keluarga dekat dari Batara Gowa, mengajukan keberatan dan mendesak kepada pemerintah Belanda di Makassar, supaya Batara Gowa dikembalikan ke Gowa. Di samping itu, La Tenritappu berusaha pula mempengaruhi Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu, agar mendesak Belanda supaya membebaskan Batara Gowa Amas Madinah dari pengasingan.³³

Tuntutan raja Bone dan raja Gowa terhadap Belanda itu mengalami kegagalan. Bahkan Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu mengundurkan diri sebagai raja Gowa. Ia kemudian digantikan oleh Temmasongeng Karaeng Katangka Sultan Zainuddin. Raja Bone La Tenritappu tidak senang terhadap pengangkatan Sultan Zainuddin sebagai raja Gowa. Oleh karena itu, ketika I Sangkilang³⁴ melancarkan perlawanan secara terbuka terhadap

³³ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 218. PaEni, Mukhlis, dkk., 2002, *Batara Gowa, Messianisme Dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjag Mada University Press, hlm. 129.

³⁴ Gerakan I Sangkilang muncul pada 1776, dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Batara Gowa yang dahulu pernah ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Sailon, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Batara Gowa I Sangkilang. Ia berhasil memperoleh pengikut-pengikut yang banyak. Ketika Kompeni Belanda (*VOC*)

Belanda dan Gowa, La Tenritappu memberikan bantuan secara tidak langsung kepada I Sangkilang dan pasukannya. I Sangkilang akhirnya berhasil menduduki tahta Kerajaan Gowa dan benda-benda *kalompoang* Kerajaan Gowa, termasuk di antaranya *Sudanga* jatuh ke tangannya. Ketika I Sangkilang wafat pada 1785, benda-benda *kalompoang* Kerajaan Gowa tersebut, diserahkan oleh pengikut-pengikutnya kepada mantan Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu. Selanjutnya, Arung Mampu menyerahkan *kalompoang* itu kepada Raja Bone La Tenritappu.³⁵

Sehubungan dengan itu, Gubernur Belanda di Makassar, Reijke, menyampaikan beberapa kali protes kepada Raja Bone La Tenritappu tentang campur tangannya dalam persoalan-

mengetahui gerakan I Sangkilang, segera memerintahkan Brugman untuk menangkapnya hidup atau mati. Akan tetapi I Sangkilang bersama kurang lebih 300 pengikutnya, ternyata lebih dahulu menyerang Brugman dan pasukannya, sehingga terjadilah pertempuran yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak. Sejak itu pertempuran antara I Sangkilang dengan pihak Belanda senantiasa terjadi. Gerakan I Sangkilang makin hari semakin bertambah jumlah pengikutnya. Bahkan ia berhasil memperoleh banyak dukungan dari beberapa pembesar Kerajaan Gowa dan bangsawan-bangsawan terkemuka, antara lain mantan Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu, Karaeng Kanjilo, Karaeng Sapanang, Karaeng Ballasari (ibu dari Batara Gowa Amas Madinah), dan Arung Palakka (nenek dari Amas Madinah). Oleh karena itu, ketika I Sangkilang bersama laskarnya menyerbu Ibukota Kerajaan Gowa pada 1777, mereka tidak menjumpai perlawanan yang berarti. Rakyat Gowa lalu menurunkan Raja Gowa Sulatan Zainuddin dari tahtanya dan mengangkat I Sangkilang menjadi Sultan Kerajaan Gowa. Sejak itu semua benda-benda *kalompoang* Kerajaan Gowa jatuh ke tangannya, sehingga kekuasaan dan pengaruhnya semakin bertambah besar, karena menurut pandangan rakyat siapa yang memegang *kalompoang* Gowa dialah raja yang sah di Kerajaan Gowa. Beberapa kali Sultan Zainuddin bersama pasukan Belanda mencoba menyerang dan mengusir Batara Gowa I Sangkilang dari Ibukota Kerajaan Gowa, tetapi tidak berhasil. Baru setelah memperoleh bala bantuan yang kuat dari Jawa, pihak Belanda berhasil merebut dan menduduki Ibukota Kerajaan Gowa dari tangan I Sangkilang pada 1778. I Sangkilang bersama pengikut-pengikutnya mengundurkan diri ke pegunungan dan membawa benda-benda *kalompoang* Gowa. Pada 1785 Batara Gowa I Sangkilang wafat di pegunungan karena diracun orang. Benda-benda *kalompoang* Gowa diserahkan oleh pengikut-pengikutnya kepada mantan Raja Gowa Mallisujawa Arung Mampu, yang kemudian diserahkan kepada Raja Bone La Tenritappu (Daeng Patunru, Abd. Razak, 1983, *op. cit.*, hlm. 85-88); PaEni, Mukhlis, dkk., 2002, *op. cit.*, hlm. 127.

³⁵ Mattulada, 1998, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press, hlm. 304; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1983, *op. cit.*, hlm. 88-90.

persoalan Gowa serta mendesak mengembalikan benda-benda *kalompoang* Gowa, tetapi tidak berhasil. Raja Bone La Tenritappu berpendapat bahwa Arung Mampu lebih berhak menduduki tahta Kerajaan Gowa daripada Sultan Zainuddin. Bahkan menurut raja Bone, bahwa selain dari Arung Mampu, Batara Gowa Amas Madinah, ia pun juga mempunyai hak atas tahta Kerajaan Gowa. Itulah sebabnya pemerintah Belanda di Batavia mengambil keputusan untuk melakukan ancaman dengan kekuatan senjata terhadap raja Bone, supaya bersedia menyerahkan benda-benda *kalompoang* Gowa dan berhenti mengambil tindakan-tindakan yang bersifat permusuhan terhadap pemerintah Belanda.³⁶

Untuk mewujudkan keputusan itu, sebuah armada yang berkekuatan satu divisi tentara pendaratan dikerahkan oleh Belanda ke perairan Bone. Armada itu tidak melakukan pendaratan dan penyerangan, hanya mondar-mandir di Teluk Bone sebagai ancaman. Pihak Belanda menganggap bahwa ancaman itu adalah cukup untuk memaksa raja Bone memenuhi tuntutan Belanda. Akan tetapi anggapan itu ternyata keliru karena raja Bone tidak gentar sedikit pun terhadap ancaman itu. Setelah kurang lebih tujuh bulan lamanya, akhirnya mereka kembali ke Makassar dengan tidak memperoleh hasil. Hal itu menunjukkan semakin merosotnya kekuatan Belanda, terutama dalam pandangan raja-raja di Sulawesi Selatan.³⁷

Kemerosotan kekuatan Belanda tersebut, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Raja Bone La Tenritappu untuk memperluas kembali daerah kekuasaan dan pengaruh Bone di Sulawesi Selatan, terutama terhadap negeri-negeri yang pernah dikuasai

³⁶ Paeni, Mukhlis, dkk., 2002, *op. cit.*, hlm. 153; Daeng Patunru, Abd Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 220.

³⁷ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 306; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 220-221.

oleh Raja Bone La Tenritatta Arung Palakka. Sebab, semenjak wafatnya Raja Bone La Tenritatta Arung Palakka, negeri-negeri di sebelah timur yang biasa disebut "*oosterdistricten*" oleh Belanda telah diambil dari kekuasaan Bone. Tindakan Belanda itu dianggap oleh Raja Bone La Tenritappu bersama rakyatnya sebagai perbuatan sewenang-wenang dari Belanda. Oleh karena itu, Raja Bone La Tenritappu berusaha merebut kembali dari kekuasaan Belanda. Dalam upaya itu, La Tenritappu akhirnya berhasil menguasai kembali negeri-negeri yang telah dikuasai Belanda, seperti Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng.³⁸

Kemudian, La Tenritappu melakukan pula perluasan wilayah ke daerah-daerah di sebelah utara Makassar yang lazim disebut "*noorderdistricten*" oleh Belanda, seperti Maros dan Pangkajene. Daerah-daerah itu diperintah langsung oleh Belanda berdasarkan Perjanjian Bungaya. Selain itu, Raja Bone La Tenritappu juga mempergunakan tempat kediamannya di Bontoala, sebagai pangkalan untuk mengambil bagian dalam pemungutan bea cukai atas pemasukan barang-barang dagangan di Pelabuhan Makassar. Bahkan La Tenritappu melarang para petani di Maros dan Pangkajene membayar pajak *vertiening* (pajak 10 persen dari hasil padi tiap tahun) kepada Belanda. Oleh karena pada waktu itu sudah banyak orang Bone di bawah pimpinan anak-anak bangsawan yang tinggal dan membuka usaha-usaha yang luas di daerah-daerah itu, sehingga Belanda tidak berhak atas pajak tersebut.³⁹

Oleh karena itu, pemerintah Belanda di Makassar beberapa kali mengajukan protes kepada raja Bone, atas sikap dan

³⁸ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 221; Kadir, Harun, 1978, *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 77; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 306-307.

³⁹ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 306; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 221.

tindakan-tindakannya tersebut. Namun raja Bone tidak menghiraukannya, sehingga pertentangan antara Bone dengan Belanda berlanjut terus hingga masuknya kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan pada 1812. Ketika pemerintah Belanda di Makassar menyerahkan kekuasaannya kepada Residen Philips (Inggris), Raja Bone La Tenritappu sama sekali tidak menyetujuinya. Bahkan ia mempersalahkan wakil pemerintah Belanda di Makassar yang menyerahkan Makassar dan daerah-daerah yang menjadi anggota sekutu menurut Perjanjian Bungaya kepada Inggris tanpa melakukan perlawanan. Padahal berdasarkan Pasal 6 dari Perjanjian Bungaya, antara lain disebutkan bahwa orang-orang Inggris harus diusir dari Sulawesi Selatan.⁴⁰

Pada masa kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan, Bone tetap menampakkan sikap permusuhannya. Salah satu sebabnya, karena tuntutan raja Bone untuk menjadi perantara terhadap setiap raja-raja di Sulawesi Selatan yang hendak berhubungan dengan pemerintahan Inggris di Makassar, ditolak oleh Residen Philips. Akibatnya, Bone beberapa kali terlibat pertempuran dengan pihak Inggris. Bahkan dapat dikatakan bahwa, daerah Bone tidak pernah dikuasai oleh Inggris selama masa kekuasaannya di Sulawesi Selatan pada 1812-1816. Setelah masa kekuasaan Inggris berakhir dan kekuasaannya diserahkan kembali kepada pemerintah Belanda, sikap permusuhan Bone bukannya telah berakhir. Sebab, hubungan antara Bone dengan Belanda semakin retak dan pertentangan antara keduanya semakin meruncing.⁴¹

Pertentangan itu mulai tampak ketika Komisaris Belanda, Chasses, mengundang raja-raja di Sulawesi Selatan untuk

⁴⁰ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 222; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 309; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1983, *op. cit.*, hlm. 52.

⁴¹ Latif, Abd., 1997. *Yang Menentang dan Yang Bersahabat Inggris di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Tesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 231.

menguatkan kesetiaannya kepada pemerintah Belanda, To Appatunru yang tampil menggantikan La Tenritappu sebagai raja Bone tidak memenuhi undangan itu. Raja Bone To Appatunru hanya mengirimkan utusan untuk menyampaikan salam persahabatan dan tuntutan kepada pemerintah Belanda di Makassar. Ia menuntut supaya seluruh haknya yang telah dihapuskan oleh pemerintahan Inggris dipulihkan kembali, terutama mengenai haknya untuk berdiam di Makassar dan mengenai kebiasaan yang berlaku semenjak Raja Bone La Tenritatta Arung Palakka, bahwa tidak ada seorang raja di Sulawesi Selatan yang boleh berhubungan dengan pemerintah Belanda tanpa perantaraan dari raja Bone. Tuntutan Raja Bone To Appatunru itu tidak dapat dikabulkan oleh Komisaris Belanda. Akibatnya, raja Bone semakin menunjukkan sikap permusuhannya terhadap Belanda. Keadaan itu berlangsung terus hingga kunjungan Gubernur Jenderal Baron van der Capellen di Makassar pada 1824.⁴²

Setelah To Appatunru mangkat dan dewan *Ade Pitu* memilih dan mengangkat We Maniratu Arung Data menjadi raja Bone, pemerintah Belanda berharap pertentangan antara Bone dengan Belanda dapat diselesaikan secara damai. Untuk itu, maka diadakanlah perundingan antara Bone yang diwakili La Mappaewa Arung Lompu dengan pemerintah Belanda di Makassar pada Juli 1824. Perundingan yang dilakukan dalam rangka Pembaharuan Perjanjian Bungaya itu, La Mappalewa tetap mempertahankan tuntutan dan pendirian Bone, bahwa tidak ada seorang raja di Sulawesi Selatan yang boleh menghadap wakil pemerintah Belanda di Makassar, jika tidak dengan perantaraan raja Bone atau wakilnya. Tuntutan raja Bone itu ditolak oleh pihak Belanda

⁴² Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 333-335; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 235).

dan diberi waktu 15 hari untuk berpikir. Setelah batas waktu itu berakhir dan raja Bone tetap pada tuntutananya, maka pemerintah Belanda mulai melakukan perjanjian baru dengan raja-raja di Sulawesi Selatan pada 30 Juli 1824, tanpa persetujuan atau keikutsertaan raja Bone. Perjanjian itu disebut "*Verniewd Bongaisch Contract*" (Kontrak Bungaya yang diperbaharui). Raja Bone diberi ultimatum bahwa apabila ia tidak menandatangani kontrak itu dalam jangka dua bulan, maka kedudukannya sebagai sekutu tua Belanda di Sulawesi Selatan akan hilang.⁴³

Penolakan raja Bone terhadap pembaharuan kontrak tersebut, merupakan sebab utama terjadinya perang antara Bone dengan Belanda pada 1824-1825. Dalam peperangan itu, Raja Bone We Maniratu Arung Data memimpin rakyatnya dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Laskar Bone yang melancarkan serangan terhadap kedudukan Belanda, berhasil mengalahkan pasukan Belanda di Pangkajene, Labakkang, Segeri, Tanete, dan Maros, serta di Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng pada September dan Oktober 1824. Namun daerah-daerah itu berhasil direbut kembali oleh pasukan Belanda setelah mendapat bantuan pasukan dari Batavia. Bahkan benteng pertahanan Bone di BajoE dan Lalebbata-Watampone, Ibukota Kerajaan Bone, berhasil pula direbut oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal J. J. van Geen pada Maret 1825. Raja Bone bersama pasukannya mengundurkan diri ke pedalaman untuk melanjutkan perlawanan. Oleh karena pasukan Belanda kehilangan jejak mengenai keberadaan raja Bone bersama pasukannya, serta meletusnya Perang Diponegoro, sehingga Mayor Jenderal J. J. van Geen bersama pasukannya dipanggil kembali ke

⁴³ Poelinggomang, Edward L., 2005. *Sejarah Tanete, Dari Angangnionjo Hingga Kabupaten Barru*. Pemda Barru: Laporan Penelitian; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 240-241; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 335-337.

Batavia pada April 1825.⁴⁴

Perang antara Bone dengan Belanda tersebut, baru berakhir pada 1835, setelah pengganti Raja Bone We Maniratu Arung Data, yaitu La Mappaseling Arung Pannyili menandatangani gencatan senjata. Gencatan senjata itu, kemudian disusul dengan suatu perjanjian perdamaian pada 13 Agustus 1835. Namun dalam perkembangan kemudian, setelah La Parenrengi Arumpugi tampil menggantikan La Mappaseling sebagai raja Bone, hubungan antara Bone dengan Belanda kembali memburuk. Sebab, Raja Bone La Parenrengi Arumpugi berusaha merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaan Bone yang telah direbut oleh Belanda di satu pihak. Sementara di lain pihak, pemerintah Belanda berusaha pula mengadu domba di antara pembesar-pembesar dan anak-anak bangsawan Bone. Setelah La Parenrengi wafat dan digantikam oleh permaisurinya, yaitu Tenriawaru Besse Kajuara sebagai raja Bone, maka hubungan antara Bone dengan Belanda semakin memburuk. Oleh karena Besse Kajuara tetap melanjutkan kebijakan pendahulunya, bahkan menunjukkan sikap permusuhan yang lebih keras dari pada suaminya terhadap Belanda.⁴⁵

Menanggapi sikap dan kebijakan-kebijakan Raja Bone Besse Kajuara tersebut, maka pemerintah Belanda memutuskan untuk menaklukkan Bone. Untuk itu diberangkatkanlah sebuah ekspedisi militer Belanda yang kuat di bawah pimpinan Mayor Jenderal E. C. C. Steinmetz dari Jawa pada Januari 1859. Ekspedisi itu diperkuat pula dengan pasukan yang ada di Makassar. Mere-

⁴⁴ Abduh, Muhammad, 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 51-54; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 338-341; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 236-251.

⁴⁵ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 338; Abduh, Muhamad, 1985, *op. cit.*, hlm. 55; Daeng Patunru, Abdul Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 257.

ka tiba di perairan BajoE pada 6 Februari 1859, dan segera mengirim utusan untuk menyampaikan ultimatum terakhir kepada raja Bone.⁴⁶ Setelah batas waktu ultimatum itu berakhir, pasukan Belanda mulai melakukan pendaratan di pantai BajoE pada 11 Februari 1859, yang disertai dengan tembakan-tembakan meriam hebat dari kapal perang Belanda. Laskar Bone membalas pula dengan tembakan-tembakan meriam yang tidak kalah hebatnya. Pendaratan pasukan Belanda itu, mendapat perlawanan sengit dari laskar Bone di bawah pimpinan Raja Bone Besse Kajuara, sehingga di kedua belah pihak jatuh korban jiwa manusia yang tidak sedikit. Walaupun serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda itu, mendapat perlawanan mati-matian dari laskar Bone, tetapi benteng pertahanan Bone di BajoE, akhirnya dapat direbut oleh pasukan Belanda. Demikian pula Lalebbata – Watampone, Ibukota Kerajaan Bone berhasil direbut dan dikuasai oleh pasukan Belanda pada Maret 1859, setelah raja Bone bersama pasukannya terlebih dahulu mengundurkan diri ke Pasempe untuk melanjutkan perlawanan gerilya. Oleh karena hebatnya perang gerilya yang dilancarkan oleh laskar Bone dan banyaknya serdadu Belanda yang terserang penyakit, sehingga Mayor Jenderal E. C. C. Steinmetz bersama pasukannya kembali ke Makassar pada April

⁴⁶ Adapun bunyi isi ultimatum yang disampaikan kepada *Arumpone* (Raja Bone) itu, adalah sebagai berikut: (1) menuntut supaya *Arumpone* beserta pembesar-pembesar nya meminta ampun kepada wakil pemerintah Belanda atas tindakan-tindakannya yang sangat anti Belanda dan supaya *Arumpone* bersama rakyatnya mengakui Ratu Belanda sebagai rajanya yang tertinggi, (2) agar supaya pemerintah dan rakyat Kerajaan Bone mengibarkan bendera Belanda dan menghormatinya dengan tembakan meriam 21 kali, bilamana Jenderal Steinmetz sebagai wakil pemerintah Belanda mendarat di BajoE sampai di Watampone, Ibukota Kerajaan Bone, (3) agar supaya *Arumpone* bersama dewan pemerintahannya (*Arung Pitu*) menandatangani Kontrak Bungaya yang telah diperbaharui pada tahun 1824, (4) *Arumpone* diberi waktu 3 x 24 jam untuk menjawab dan menerima ultimatum. Namun *Arumpone* sama sekali tidak sudi memberi jawaban atas ultimatum itu, bahkan ia segera memerintahkan rakyat untuk melakukan perlawanan mati-matian terhadap Belanda (Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 259); Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 190.

1859.⁴⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa serangan yang dilakukan secara besar-besaran oleh Belanda untuk menaklukkan Bone mengalami kegagalan.

Kemudian, pada November 1859, pemerintah Belanda di Batavia mengirimkan lagi sebuah ekspedisi militer yang lebih besar dan kuat di bawah pimpinan Letnan Jenderal Van Swieten, untuk menaklukkan Bone. Namun sebelum melakukan penyerangan terhadap pusat kerajaan itu, mereka terlebih dahulu merebut Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Setelah itu, pasukan Belanda mulai melancarkan serangan secara besar-besaran terhadap Watampone pada 6 Desember 1859. Akibat serangan itu, Raja Bone Besse Kajuara kembali memimpin rakyatnya dalam melakukan perlawanan, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran sengit antara kedua belah pihak di BajoE dan daerah sekitarnya, yang menelan korban jiwa manusia yang tidak sedikit. Meskipun Raja Bone Besse Kajuara yang mendapat dukungan penuh dari segenap rakyatnya, memberikan perlawanan habis-habisan demi membela martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya. Namun pada penghujung peperangan itu, pihak Belandalah yang keluar sebagai pemenang, setelah Raja Bone Besse Kajuara bersama pengikut-pengikutnya yang setia terlebih dahulu meninggalkan Watampone, Pasempe dan daerah Bone menuju Suppa.⁴⁸

Kekalahan itu merupakan pukulan berat bagi Bone dan harus menerima kenyataan pahit tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Sesuai persetujuan pemerintah Belanda, dewan

⁴⁷ Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 197; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 258 – 262; Morris, van Braam, 1992, *op. cit.*, hlm. 11-12.

⁴⁸ Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 57-58; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 262-266; Ali, A. Muh., 1986, *op. cit.*, hlm. 62- 63; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 363-366.

Ade Pitu Kerajaan Bone memilih dan mengangkat Singkeru Rukka menjadi raja Bone, menggantikan Besse Kajuara. Raja Bone Singkeru Rukka bersama dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone, menandatangani “kontrak politik” pada 13 Februari 1860, yang menetapkan bahwa Kerajaan Bone berubah dari statusnya sebagai anggota sekutu (*bondgenootschap*) berdasarkan pembaharuan Kontrak Bungaya, menjadi negeri pinjaman (*leevorstendom*). Kalau Raja Bone Besse Kajuara sebagai anggota sekutu masih mempunyai kekuasaan yang sangat luas, maka Raja Bone Singkeru Rukka merupakan seorang raja pinjaman dari pemerintah Belanda, sehingga kekuasaannya sudah sangat terbatas. Walaupun demikian, selama masa pemerintahan Raja Bone Singkeru Rukka, hubungan antara Bone dengan pemerintah Belanda berlangsung dengan baik.⁴⁹

Hubungan baik antara kedua belah pihak tersebut, tetap berlangsung hingga masa pemerintahan Raja Bone Benri Gau Arung Timurung, yang tampil menggantikan Singkeru Rukka sebagai raja Bone. Namun setelah Benri Gau Arung Timurung wafat pada 1893, hubungan antara Bone dengan pemerintah Belanda kembali memburuk. Sebab, ketika dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone memilih Bungasutera Arung Apala untuk menggantikan ibunya dalam memangkuk jabatan sebagai raja Bone, ternyata Gubernur Celebes dan Daerah Takluknya Braam Morris tidak menyetujuinya.⁵⁰ Campur tangan pemerintah Belanda mengenai persoalan-persoalan dalam negeri Bone, merupakan salah satu sebab bergolakannya kembali sikap permusuhan Bone terhadap pemerintah Belanda dalam perkembangan selanjutnya. Sikap permusuhan Bone terhadap pemerintah Belanda yang telah menyebabkan ter-

⁴⁹ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 268; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 366; Mappangara, 1996, *op. cit.*, hlm. 214.

⁵⁰ Arfah, Muhammad dan Muhammad Amir, 1993, *op. cit.*, hlm. 76.

jadinya rentetan peperangan sebagaimana yang telah dikemukakan, merupakan salah satu faktor penyebab terciptanya kondisi yang memungkinkan terjadinya perlawanan Abdul Hamid pada 1905.

Campur Tangan Belanda Terhadap Bone

Untuk memantapkan kekuasaannya di Sulawesi Selatan, pemerintah Belanda selalu berusaha melibatkan diri di dalam urusan kenegaraan kerajaan-kerajaan di daerah ini. Campur tangan Belanda itu, bukan hanya dimaksudkan untuk menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam kehidupan kenegaraan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan atau yang lebih dikenal dengan politik *divide et impera* (pecah belah dan dikuasai atau adu domba). Namun yang tidak kalah pentingnya adalah dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai raja-raja di Sulawesi Selatan bersatu dan menjadi kuat, khususnya Bone dan Gowa, baik karena hubungan kekeluargaan maupun karena hubungan politik. Itulah sebabnya ketika dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone memilih Bungasutera Arung Apala untuk menggantikan ibunya, Benrigau Arung Timurung sebagai raja Bone, Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya, Braam Morris tidak menyetujuinya. Padahal menurut adat, Bungasutera Arung Apala berhak untuk menduduki tahta kerajaan, karena merupakan *anak pattola* atau keturunan bangsawan tinggi Bone.⁵¹

Sehubungan dengan itu, setelah Raja Bone Benriagau Arung Timurung wafat pada 1893, timbul suasana politik yang agak

⁵¹ Setelah Raja Bone Singkeru Rukka wafat pada tahun 1871, ia digantikan oleh putrinya, yang bernama Benriagau Arung Timurung sebagai raja Bone. Berkat anjuran dari La Pawawoi Karaeng Segeri, Benrigau Arung Timurung kawin dengan Bangkung Karaeng Popo, saudara kandung dari Raja Gowa I Makkalau Karaeng Lembangparang. Dari perkawinan itu lahirlah seorang putri yang kemudian diberi nama Bungasutera Arung Apala (Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 368; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 97-98).

tegang di kalangan anggota-anggota dewan pemerintahan dan golongan bangsawan tinggi di Bone, khususnya mengenai pergantian raja Bone. Oleh karena suami Benrigau Arung Timurung, yakni Bangkung Karaeng Popo merasa berhak pula untuk menduduki tahta kerajaan berdasarkan keturunan dari pihak ibunya, yaitu Tenripadang Arung Barru yang bersaudara kandung dengan Raja Bone Singkeru Arung Rukka, sehingga ia berusaha untuk menjadi raja Bone sebagai pengganti almarhumah istrinya. Akan tetapi ia ditentang atau tidak disetujui oleh La Pawawoi Karaeng Segeri yang pada waktu itu memangku jabatan sebagai *poggawa* dan *tomarilaleng* Kerajaan Bone. Untuk mengambil jalan tengah mengenai persoalan itu, dewan *Ade Pitu* memilih Bungasutera Arung Apala, yang baru berumur 13 tahun untuk menjadi raja Bone. Namun Gubernur Braam Morris tidak dapat menyetujui pilihan dewan *Ade Pitu* tersebut, karena ada kekhawatiran kalau Bangkung Karaeng Popo, sebagai ayah dari calon raja itu akan terlalu banyak berpengaruh di Bone.⁵²

Setelah dewan *Ade Pitu* mengadakan perundingan dengan Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya, Braam Morris tentang pengangkatan raja Bone yang baru, tercapailah kesepakatan untuk membatalkan pilihan dewan *Ade Pitu* atas Bungasutera Arung Apala dan mengangkat La Pawawoi Karaeng Segeri menjadi raja Bone yang pada waktu itu telah berusia kurang lebih 60 tahun. Sementara Bangkung Karaeng Popo tidak diizinkan untuk tetap tinggal di Bone dan ia harus kembali ke Gowa. Menurut pemerintah Belanda, bahwa pengangkatan Bungasutera Arung Apala ataupun Bangkung Karaeng Popo untuk menduduki tahta kerajaan, memungkinkan bersatunya Bone dan Gowa. Hal yang

⁵² Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 270; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 367.

demikian tidak diinginkan dan sangat ditakuti oleh Belanda. Itulah sebabnya pemerintah Belanda ketika itu, mendukung pengangkatan La Pawawoi Karaeng Segeri sebagai raja Bone, yang menurut perkiraan Belanda dapat diajak kerjasama daripada Bungasutera Arung Apala atau Bangkung Karaeng Popo.⁵³

La Pawawoi Karaeng Segeri diangkat dan dilantik menjadi raja Bone pada 1896, dan ia kemudian menandatangani perjanjian yang mengatur hubungan Bone dengan Belanda pada 16 Februari 1896. Berkat jasa-jasanya terhadap pemerintah Belanda, ia kemudian dianugerahi “Bintang Emas Agung” (*De Groote Goulden Ster van Verdienste*) pada 31 Agustus 1896. Oleh karena itu, Kerajaan Bone diakui kembali statusnya sebagai sekutu dan sahabat Belanda. Jika disimak lebih dalam mengenai pemberian bintang penghargaan kepada La Pawawoi Karaeng Segeri tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemberian bintang penghargaan itu, bukan hanya dimaksudkan sebagai penghargaan atas jasa-jasa baiknya terhadap Belanda, tetapi juga dimaksudkan untuk mengambil hati La Pawawoi Karaeng Segeri, agar ia tetap mau bekerjasama dengan Belanda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian bintang penghargaan itu, hanya-

⁵³ La Pawawoi Karaeng Segeri diangkat menjadi Arung Bulu-Bulu (Sinjai) pada 1857, atas persetujuan pemerintah Belanda di Makassar dan ayahnya (Singkeru Rukka). Pada 1862 La Pawawoi Karaeng Segeri diangkat menjadi Dulung Ajangale dan pada 1870 diangkat menjadi Arung Mampu dan Arung Sijelling. Pada tahun 1876, La Pawawoi diangkat menjadi *Ponggawa* Kerajaan Bone dan pada tahun itu juga, ia bersama laskar Bugisnya ke Turatea (Binamu, Bangkala, dan lain-lain) untuk membantu tentara Belanda dalam menumpas pemberontakan rakyat di daerah itu. Pada 1877, La Pawawoi bersama laskarnya membantu tentara Belanda dalam menumpas pemberontakan Maru Karaeng Bonto-Bonto di Labakkang dan sekitarnya. Kemudian La Pawawoi diutus oleh Gubernur Bekker ke Luwu untuk mengusahakan agar supaya Datu Luwu Andi Baru Sultan Abdul Karim, mau menandatangani Perjanjian Bungaya yang telah diperbaharui dan usaha La Pawawoi itu berhasil dengan baik. Sehubungan dengan jasa-jasa baik La Pawawoi Karaeng Segeri tersebut, maka kepercayaan pemerintah Hindia Belanda terhadapnya semakin bertambah besar. Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 98; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 272; Hamzah, Aminah, 1993, *op. cit.*, hlm. 49.

lah salah satu cara atau taktik untuk menggalang La Pawawoi Karaeng Segeri, agar tetap mau bekerjasama atau minimal agar tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap Belanda.⁵⁴

Harapan pemerintah Belanda untuk tetap dapat menjalin hubungan baik dengan Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri, ternyata meleset karena kurang lebih satu tahun kemudian, hubungan antara Bone dengan Belanda mulai memburuk. Sebab, Belanda senantiasa mencampuri urusan dalam negeri Bone dan berusaha memperluas kekuasaannya. Sebaliknya memperkecil hak-hak dan kekuasaan Bone. Oleh karena itu, sewajarnya jika Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri, sebagai seorang raja harus memperlihatkan tanggungjawabnya untuk mempertahankan martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya, terpaksa juga mengambil tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Belanda. Misalnya, pada 1897 Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri tanpa persetujuan dari pemerintah Belanda di Makassar, memerintahkan kepada Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama laskarnya berangkat ke Tanah Toraja untuk membantu rakyat di sana yang sedang melakukan perlawanan terhadap orang-orang Enrekang. Selain itu, ia juga memerintahkan Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama laskarnya untuk menyerang Datu Larompong di Peneki dan Sengkang.⁵⁵

Kemudian pada awal ke-20, pemerintah Belanda semakin bergiat untuk memperluas wilayah kekuasaannya di daerah Sulawesi Selatan. Usaha perluasan wilayah kekuasaan tersebut, bukan hanya dimaksudkan untuk menguasai daerah-daerah potensial bagi usaha pertanian, perkebunan, dan pertambang-

⁵⁴ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 273; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 98.

⁵⁵ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 369-370; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 274.

an dalam rangka perluasan upaya penanaman modal swasta Belanda di wilayah Sulawesi Selatan. Tetapi juga dimaksudkan untuk menciptakan “ketertiban dan ketentraman” guna menjamin keberhasilan usaha penanaman modal swasta Belanda tersebut. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mencegah pengaruh politik bangsa asing lainnya pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk di Bone.⁵⁶

Wilayah kekuasaan Bone yang sejak lama telah menjadi salah satu pusat perhatian Belanda, tidak luput dari sasaran usaha perluasan wilayah kekuasaan pemerintah Belanda ketika itu. Kerajaan ini di bawah pimpinan raja-raja terkenal sebagai penentang yang gigih terhadap kekuasaan pemerintah Belanda, terbukti dengan beberapa kali terjadi perang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Perlawanan Bone dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda, mulai bergolak kembali ketika pemerintah Belanda menuntut kepada Bone pada permulaan 1900, supaya menyerahkan Pelabuhan BajoE dan Pallime bersama hak-hak pemungutan bea cukai terhadapnya. Jika tuntutan itu diterima, maka pemerintah Belanda akan memberikan ganti kerugian kepada Bone. Berulang-ulang kali pemerintah Belanda mendesak kepada raja Bone untuk memenuhi tuntutan itu, tetapi raja Bone bersama dewan pemerintahannya tetap menolaknya dengan tegas.⁵⁷

Tuntutan pemerintah Belanda terhadap Bone atas penguasaan Pelabuhan BajoE dan Pallime tersebut, tidak terlepas dari rencana Belanda untuk menghapuskan kebijakan pelabuhan bebas dan pelaksanaan kebijakan pelabuhan wajib pajak. Rencana

⁵⁶ Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 96; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 370-371.

⁵⁷ Poelinggomang, Edward L., 2002, *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 89-90; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 275.

itu mulai tampak ketika pemerintah Belanda di Makassar pada 1900, menyebabkan informasi kepada kerajaan-kerajaan sekutu dan sahabat di Sulawesi Selatan, bahwa kebijakan pelabuhan bebas akan dihapuskan, dan kepada mereka akan dibebankan uang ganti rugi atas pungutan-pungutan pajak impor-ekspor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pelayaran dan perdagangan. Ganti rugi tersebut, pada dasarnya merupakan langkah politik untuk menegaskan bahwa wilayah-wilayah kerajaan sekutu dan sahabat di Sulawesi Selatan berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda.⁵⁸

Kebijakan pemerintah Belanda itu, mendapat penolakan tegas dari kerajaan-kerajaan yang berdaulat di Sulawesi Selatan karena akan melenyapkan sumber pendapatan dan wilayah kekuasaan mereka, termasuk Bone. Kendatipun Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya yang menginformasikan rencana kebijakan itu dengan berkunjung langsung ke Bone. Kemudian masih dijelaskan lagi oleh Residen Belanda yang ditempatkan di Bone (sesuai surat gubernur tertanggal 19 Maret 1900). Sikap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, khususnya Bone itulah yang antara lain menyebabkan penghapusan kebijakan pelabuhan bebas dan pelaksanaan kebijakan pelabuhan wajib pajak tertunda, serta dilancarkan ekspedisi militer Belanda untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berdaulat di Sulawesi Selatan pada 1905.⁵⁹

⁵⁸ Kebijakan pelabuhan bebas mulai dilaksanakan pada 1 Januari 1847 dan berubah menjadi pelabuhan wajib pajak mulai pada 1 Agustus 1906 (Poelinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 90).

⁵⁹ Sebab-sebab lain tertundahnya pelaksanaan wajib pajak di Makassar: *Pertama*, menurut hasil penelitian Vermeulen (1896) dan laporan Gubernur Sulawesi Gerrit W.W.C. Baron van Hoevell (1898-1903) pada 1900, bahwa penduduk Sulawesi Selatan memegang peran penting dalam kegiatan niaga di wilayah Kepulauan Hindia-Belanda bagian timur. Kedua laporan ini menyebabkan pemerintah meragukan keterangan bahwa kebijakan pelabuhan wajib pajak hanya akan mengurangi volume perdagangan di Makassar sebesar 22 persen. *Kedua*, kerajaan-kerajaan bumiputra dapat memblokir pelayaran penduduk ke bandar niaga pemerintah. *Ketiga*, diperkirakan pendapatan dari kerajaan-kerajaan bumiputra

Oleh karena itu, dalam rangka perluasan wilayah kekuasaannya di Sulawesi Selatan, pemerintah Belanda berkesimpulan bahwa satu-satunya pemecahan terhadap pembangkangan Bone dan “keresahan” yang menyusahkan Belanda dan sudah berlangsung bertahun-tahun di daerah Sulawesi Selatan, ialah “kampanye pasifikasi” (perdamaian) atau penaklukan secara militer, serupa dengan apa yang baru saja diselesaikan di Aceh.⁶⁰ Usaha perluasan wilayah kekuasaan melalui penaklukan militer, mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz (1904-1909). Ketika J. B. van Heutsz tampil menggantikan W. Rooseboom sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1 Oktober 1904, ia mulai mencanangkan suatu kebijaksanaan baru ke arah penguasaan daerah jajahan yang lebih intensif, dengan tujuan pokok ialah menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia), agar supaya terhindar dari kemungkinan campur tangan bangsa asing lainnya.⁶¹

Setelah situasi di Aceh dapat dikendalikan, perhatian dialihkan ke Sulawesi Selatan yang antara lain karena pemerintah Belanda ingin segera menyelesaikan hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan kebijakan wajib pajak di Makassar. Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya, Cornelis Alexander

tidak dapat terpenuhi. *Keempat*, kerajaan-kerajaan bumi putra dapat mengembangkan bandar niaga mereka untuk bersaing dengan bandar niaga pemerintah sehingga muncul perdagangan gelap. *Kelima*, kerajaan-kerajaan bumiputra dapat meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan negara asing sehingga mengancam kedudukan politik dan ekonomi pemerintah (Polinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 90-91).

⁶⁰ Harvey, Barbara Sillars, 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar, Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utta Grafiti, hlm. 46; Reid Anthony, 2007. *Asal Mula Konflik Aceh, Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁶¹ Kies, Ch., 1935. *De Expeditie naar Zuid Celebes in 1905*. J. G. BGN. I, hlm. 827; Kadir, Harun, dkk., 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Unhas, hlm. 45.

Kroesen (1903-1906), memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat di Batavia, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (surat tertanggal 11 Februari 1904) untuk melakukan tindakan militer terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang menentang rencana kebijakan pelaksanaan wajib pajak, khususnya terhadap Bone dan Luwu. Kedua kerajaan itu memiliki pengaruh kuat di Sulawesi Selatan dan gigih menentang kebijakan ganti rugi pemungutan pajak.⁶²

Sehubungan dengan saran dari Gubernur Sulawesi C. A. Kroesen tersebut, Menteri Koloni menanggapi dan menyatakan bahwa apabila perundingan dengan kerajaan-kerajaan berdaulat di Sulawesi Selatan tentang jumlah ganti rugi tidak terselesaikan, ia sama sekali tidak melihat motif untuk menyudahi perundingan penyelesaian berbagai kesulitan yang dihadapi dengan Bone dan Luwu. Mengikuti pernyataan Menteri Koloni tersebut, Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz dalam suratnya kepada Direktur Departemen Keuangan pada 25 Januari 1905, menyatakan bahwa sesuai dengan keinginan Menteri Koloni, maka secepat mungkin kontrak dengan para penguasa kerajaan-kerajaan berdaulat di Sulawesi Selatan diselesaikan untuk mengambil alih hak-hak pajak perdagangan dan semua yang berkaitan dengan masalah itu secepat mungkin dipersiapkan agar pelaksanaan pemungutan pajak perdagangan dapat dilaksanakan pada 1 Januari 1906. Direktur Departemen Keuangan, dalam pertimbangan dan sarannya, menyatakan bahwa demi menjamin kepentingan perdagangan, maka kerajaan-kerajaan berdaulat di Sulawesi Selatan yang bersedia mengakui hak pemerintah Belanda untuk memungut pajak perdagangan di wilayah kekuasaan mereka.⁶³

⁶² Poelinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 91.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 92.

Kegagalan perundingan yang terus dialami, mendorong Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz mencanangkan suatu kebijakan ke arah penguasaan daerah jajahan yang lebih intensif, yang secara halus disebut sebagai *pacificatie politiek* (politik perdamaian), dengan tujuan pokok menguasai secara langsung seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, termasuk daerah Sulawesi Selatan, yang antara lain agar terhindar dari kemungkinan campur tangan bangsa asing lainnya. Kebijakan itu erat kaitannya dengan pandangan, bahwa “raja-raja bumiputra bukanlah kekuasaan asing, melainkan pemerintah bumiputra berpemerintahan sendiri dan bebas dalam wilayah Hindia Belanda, yang mengakui kedaulatan Ratu Belanda dan menjadi *vasalnya*”. Itulah sebabnya penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan yang dinyatakan sebagai kerajaan sekutu atau sahabat dan pinjaman di Sulawesi Selatan, dipandang sebagai usaha untuk menciptakan “ketertiban dan ketenteraman”.⁶⁴

Berdasarkan kebijaksanaan itu, Gubernur Sulawesi dan Daerah Takluknya, C. A. Kroesen, mengajukan usul kepada Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz, pada April 1905, agar dilakukan tindakan penaklukan terhadap seluruh wilayah Sulawesi Selatan, terutama terhadap Bone dan Gowa. Usul dari Gubernur Kroesen itu, akhirnya mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda. Hal ini jelas dinyatakan dalam surat resmi yang dikirimkan kepada gubernur Sulawesi pada 14 Juni 1905. Pada intinya, isi surat tersebut merupakan perintah kepada Gubernur Kroesen, agar memaksa raja-raja di Sulawesi Selatan untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahannya, yaitu tunduk, patuh, dan taat kepada pemerintah Belanda sepenuhnya dengan menandatangani “pernyataan pendek” (*korte verklaring*). Rumusan *korte verklaring*

⁶⁴ Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 46; Poelinggoman, 2002, *op. cit.*, hlm. 92-93.

ing ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan politik pemerintah Belanda berdasarkan Pidato Takhta (*Troon Rede*) Ratu Belanda pada 1901, landasan Politik Etis di Hindia Belanda sekaligus pernyataan diplomatis untuk membenarkan penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan bumiputra.⁶⁵

Untuk mewujudkan kebijaksanaan Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz tersebut, maka dipersiapkanlah suatu pasukan pendudukan atau ekspedisi militer, guna melaksanakan tindakan penaklukan, apabila raja-raja di Sulawesi Selatan menolak menanda tangani *korte verklaring* yang telah dipersiapkan. Tindakan penaklukan yang pertama-tama harus dilakukan terhadap Bone, karena dianggap sebagai “kerajaan yang paling kuat dan yang paling berbahaya”. Gubernur Kroesen setuju bahwa Bone adalah paling berbahaya di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ketika itu. Di samping itu, juga karena “sikapnya yang kurang ajar”, yaitu berani menolak tuntutan pemerintah Belanda yang hendak menguasai pelabuhan BajoE dan Pallime. Menurut Gubernur Kroesen bahwa demi untuk menegakkan dan mempertahankan kewibawaan pemerintah Belanda, serta untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan para penguasa, persetujuan-persetujuan terhadap tuntutan-tuntutan pemerintah Belanda harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan.⁶⁶

Berkaitan dengan itu tidak berlebihan jika Dirk Fock, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1921-1926), menyatakan bahwa ekspedisi militer Belanda tersebut dilakukan karena para raja atau penguasa dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tidak menaati perjanjian yang telah ditan-

⁶⁵ Polinggoman, 2002, *op. cit.*, hlm. 92; Harvey, 1989, *op. cit.*, hlm. 48.

⁶⁶ Kroesen, 1906, *op. cit.*, hlm. 9; Harvey, 1989, *op. cit.* hlm. 48-49.

datanganinya dan bersikap tidak adil terhadap rakyatnya. Pernyataan-pernyataan itu seakan-akan membenarkan tindakan militer Belanda yang dilancarkan ketika itu, sebagai tugas suci untuk mengadabkan, memajukan, dan memasalahkan penduduk bumiputra, seperti rumusan "Politik Etis" Kabinet A. Kuiper pada 1901.⁶⁷

Kebijakan *pacificatie politiek* tersebut, tentu saja sebuah ke-dok belaka. Hal ini tampak dari pernyataan H. van Kol dan E.B. Kielstra, dan tuntutan yang diajukan kepada penguasa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kepada Bone misalnya, dituntut tiga hal, yaitu Bone diharuskan menandatangani penyerahan wilayahnya kepada pemerintah Belanda, menyetujui ganti rugi penarikan pajak ekspor dan inpor, dan mengakui hak pemerintah Belanda untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi di pelabuhan itu. Oleh karena Bone menolak tuntutan itu, sehingga pemerintah Belanda melancarkan ekspedisi militernya untuk menaklukkan kerajaan itu pada 1905.⁶⁸

Dalam sumber lain disebutkan bahwa sejak berakhirnya Perang Makassar, Kerajaan Gowa berangsur-angsur mengalami kemunduran dan menjelang abad ke-19 semakin ditekan agar tidak berdaya menunjukkan kekuasaannya. Sebaliknya Kerajaan Bone semakin berkembang, sehingga kedudukannya lebih kuat dan merupakan kerajaan terkuat pada waktu itu. Itulah sebabnya Bone dijadikan sebagai sasaran pertama tindakan pasukan pendudukan atau ekspedisi militer ketika itu, dengan pertimbangan bahwa apabila Bone berhasil ditaklukkan, maka kerajaan-kerajaan yang lain akan mudah ditaklukkan atau tidak akan melakukan perlawanan jika dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan peme-

⁶⁷ Polinggomang, 2002, *op. cit.*, hlm. 93.

⁶⁸ *Ibid.*

rintahannya kepada pemerintah Belanda.⁶⁹

Namun sebelum tindakan penaklukan terhadap Bone itu dilaksanakan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memperingatkan bahwa harus bersikap hati-hati agar tidak memancing timbulnya perlawanan dan menghindari kesan bahwa pemerintah Belanda hanya mencari-cari alasan untuk menguasai Bone. Untuk itu, maka pada 21 Juni 1905, berangkatlah dari Makassar suatu rombongan dengan penumpang kapal laut menuju ke Bone untuk menyampaikan surat dari Gubernur C. A. Kroesen, kepada raja Bone. Rombongan itu terdiri atas Residen Brugman bersama Kontrolleur Goedhart serta Cramer sebagai juru bahasa dan mereka tiba di BajoE pada 22 Juni 1905. Dengan tiga buah kapal perang berjaga-jaga di lepas pantai Teluk Bone, mereka segera mengirim utusan untuk menyampaikan surat itu kepada raja Bone, yang isinya menuntut raja Bone membayar ganti rugi, dan para pejabat Belanda ditempatkan di Bone untuk melaksanakan pemerintahan guna mengatur dan mengawasi pelabuhan. Dalam hal itu, suatu kontrak baru, yaitu *korte verklaring* (pernyataan pendek) diajukan untuk “diperiksa dengan teliti” atau ditandatangani. Setelah isi dan maksud surat itu dipahami dan dipertimbangkan masak-masak oleh raja Bone bersama dewan *Ade Pitu*, disampaikanlah surat balasan penolakan atas tuntutan itu kepada pemerintah Belanda pada 29 Juni 1905.⁷⁰

Munculnya Antipati Terhadap Belanda

Sebenarnya antipati rakyat Sulawesi Selatan terhadap pemerintah Belanda, khususnya rakyat Bone bukanlah suatu hal baru

⁶⁹ Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 47; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 382..

⁷⁰ Harvey, 1989, *op. cit.*, hlm. 48; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 100; Amir, Muhammad, 2003. *Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905*. Makassar: Eramedia, hlm. 63.

tampak setelah pemerintah Belanda berusaha menguasai secara langsung seluruh wilayah Sulawesi selatan pada awal abad ke-20. Jauh sebelumnya, sejak kehadiran Belanda (*VOC*) yang berusaha menguasai atau memonopoli perdagangan di kawasan ini, telah menimbulkan rasa antipati rakyat terhadapnya. Antipati rakyat itu kemudian tumbuh dan berkembang menjadi penolakan atau perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda. Ketika pemerintah Belanda mulai menampakkan keinginannya untuk menguasai seluruh wilayah Sulawesi selatan pada akhir abad ke-19, telah timbul banyak sekali gerakan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya menjelang akhir abad ke 19, daerah Sulawesi Selatan dijuluki “pulau keonaran” (*de onrust eiland*) oleh pemerintah Belanda.⁷¹

Perlawanan rakyat Bone di bawah pimpinan raja-raja nya terhadap pemerintah Belanda, bukan hanya merupakan reaksi terhadap kehadiran mereka sebagai kelompok luar yang dipandang akan mengancam kelembagaan dan pranata masyarakat, tetapi juga karena sikap dan tindakan pemerintah Belanda pada waktu itu yang ingin mendominasi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi serta merusak jalinan hubungan antarkerajaan yang berada di Sulawesi Selatan. Penyerobotan sebagian wilayah kekuasaan Bone, seperti Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng, serta Maros dan Pangkajene yang dilakukan oleh Belanda semenjak wafatnya Raja Bone La Tenritatta Arung Palakka, merupakan suatu bukti yang tidak dapat dipungkiri. Tindakan Belanda itu dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang oleh Raja Bone La Tenritappu bersama rakyatnya. Oleh karena itu, ia memerintahkan rakyatnya menyusup atau menyerbu ke daerah Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Maros serta melarang mereka dan rakyat di daerah-daerah itu

⁷¹ PaEni, Mukhlis, dkk., 2002, *op. cit.*, hlm. 2; Kadir, Harun, 1984, *op. cit.* hlm. 61.

untuk tidak membayar pajak "*vertiening*" (10 persen dari hasil panen) kepada pemerintah Belanda.⁷²

Dengan demikian, sejak masa pemerintahan Raja Bone La Tenritappu, antipati atau kebencian rakyat Bone terhadap pemerintah Belanda yang sudah tertanam jauh sebelumnya mulai bergolak kembali. Kebencian itu kemudian tumbuh dan berkembang, sehingga mendorong terjadinya perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda dan berlanjut terus hingga masuknya kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan. Bahkan ketika pemerintah Belanda terpaksa harus menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris pada 1812, perlawanan rakyat Bone pun beralih ke pihak Inggris dan berlangsung hingga berakhirnya masa kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan pada 1816. Setelah kekuasaan Inggris berakhir dan kekuasaannya diserahkan kembali kepada pemerintah Belanda, perlawanan rakyat Bone terhadap pemerintah Belanda pun kembali berkobar dan senantiasa terjadi, misalnya perang pada 1824-1825, perang pada 1857-1859, dan perang pada 1859-1860.⁷³

Rentetan peperangan itu merupakan suatu bukti, bahwa perlawanan rakyat Bone di bawah pimpinan raja-raja dan pemimpin-pemimpinnya, tidak pernah padam semangat perjuangannya menentang kekuasaan pemerintah Belanda. Walaupun rakyat Bone bersama raja-raja dan pemimpin-pemimpinnya, memberikan perlawanan mati-matian dalam setiap peperangan itu, tetapi pada penghujung pertarungan yang menelan korban jiwa manusia yang tidak sedikit itu, pihak Belanda yang akhirnya yang keluar sebagai pemenang. Namun kekalahan demi

⁷² Kadir, Harun, 1978, *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 47.

⁷³ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 235-267; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 50-58.

kekalahan yang mereka alami, tidak juga membuat mereka jera, apalagi takut menghadapi Belanda. Justru dari kekalahan yang satu kekalahan yang lainnya membuat mereka semakin teguh dalam pendiriannya untuk terus menerus melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Oleh karena itu, ketika pemerintah Belanda mulai menampakkan keinginannya untuk menguasai secara langsung Bone pada akhir abad ke-19, antipati atau sikap permusuhan rakyat Bone yang redup sekian tahun kembali berkobar. Selain itu, sikap permusuhan rakyat Bone tersebut, bukan hanya disebabkan karena sikap dan tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang selalu mencampuri urusan-urusan dalam negeri kerajaan itu, misalnya di dalam pengangkatan raja Bone, tetapi juga karena pemerintah Belanda selalu memecah belah di antara pembesar-pembesar dan anak-anak bangsawan Bone, sehingga tidak jarang terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu, juga karena semenjak kekalahan Bone dalam perang pada 1859-1860, pemerintah Belanda merasa berhak memperlakukan rakyat Bone menurut kehendaknya dan berbuat terhadap rakyat Bone menurut kesukaannya.⁷⁴ Sikap dan tindakan-tindakan pemerintah Belanda tersebut, tidak mengherankan jika semakin menimbulkan rasa antipati di kalangan rakyat Bone yang memang sudah lama tidak senang terhadap kekuasaan pemerintah Belanda.

Sikap permusuhan rakyat Bone terhadap Belanda, semakin memuncak ketika pemerintah Belanda dengan berbagai cara berusaha untuk menguasai secara langsung Bone pada awal abad ke-20, termasuk penguasaan dan pengelolaan terhadap pelabuhan BajoE dan Pallime.⁷⁵ Oleh karena kedua pelabuhan itu, sejak

⁷⁴ Kadir, Harun, 1978, *op. cit.*, hlm. 56.

⁷⁵ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 274.

dahulu merupakan sumber penghasilan yang utama bagi Bone, sehingga maksud dari pemerintah Belanda itu ditentang oleh Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama rakyatnya. Tambahan pula bahwa maksud dari pemerintah Belanda tersebut, juga dipandang sebagai ancaman kedaulatan bagi Bone. Berkat dukungan penuh dari segenap rakyat yang dipimpinnya, pemerintah kerajaan itu mulai menabuh genderang perang kembali menentang kekuasaan pemerintah Belanda.

Genderang perang dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda, semakin bergema ke seluruh pelosok wilayah kekuasaan Bone, semenjak pemerintah Belanda menyampaikan tuntutan kepada Bone pada 22 Juni 1905. Isi tuntutan itu, supaya pemerintah kerajaan itu menyerahkan kekuasaannya, yaitu tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya kepada pemerintah Belanda dengan menandatangani *korte verklaring*.⁷⁶ Oleh karena tuntutan dari pemerintah Belanda itu, dianggap sebagai suatu penghinaan bagi raja Bone bersama rakyatnya, sehingga genderang perang yang ditabuh oleh pemerintah Kerajaan Bone disambut dengan gembira dan mendapat dukungan penuh dari segenap rakyat yang dipimpinnya. Mereka siap bahu membahu dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, demi untuk mempertahankan martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya. Kebulatan tekad rakyat Bone bersama pemimpin-pemimpinnya dalam menyongsong perang melawan pasukan Belanda, dapat disimak dari pernyataan sikap dan ikrar atau sumpah yang disampaikan oleh mereka pada pertemuan yang diselenggarakan di Lalebbata-Watampone, yaitu beberapa hari sebelum pasukan ekspedisi militer Belanda melakukan pendaratan untuk menaklukkan Bone.

⁷⁶ Harvey, 1989, *op. cit.*, hlm. 48; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 100; Amir, 2003, *op. cit.*, hlm. 64-65.

Persiapan dalam Menyongsong Perang

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa La Pawawoi Karaeng Segeri diangkat dan dilantik menjadi raja Bone pada 1896. Pada tahun itu juga, Abdul Hamid diangkat dan dilantik menjadi *pongawa* Kerajaan Bone, yaitu Panglima Tertinggi Angkatan Perang Kerajaan Bone. Abdul Hamid menggantikan kedudukan ayahnya, La Pawawoi Karaeng Segeri sebagai *pongawa* Kerajaan Bone, yang telah diangkat menjadi raja Bone.⁷⁷

Ketika tuntutan pemerintah Belanda untuk menguasai secara langsung Bone, terutama terhadap pelabuhan BajoE dan Pallime, ditolak oleh raja Bone pada 29 Juni 1905. Pemerintah Belanda merasa kecewa dan mencari-cari alasan untuk dapat menyerang Bone, yaitu antara lain: (1) Pemerintah Belanda menuduh Bone terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan tetangganya serta menghasut mereka atau raja-raja tersebut untuk menentang kekuasaan pemerintah Belanda. (2) Pemerintah Kerajaan Bone tidak mentaati perjanjian yang pernah ditandatangani.⁷⁸

Tuduhan pemerintah Belanda tersebut, dianggap sebagai alasan untuk menyerang Bone. Oleh karena itu, sebagai suatu kerajaan yang masih merasa memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas daerahnya, maka pemerintah kerajaan itu bersiap-siap untuk menghadapi serangan pasukan Belanda. Persiapan-persiapan di bidang pertahanan, antara lain meliputi: (1) Mengaktifkan latihan-latihan militer bagi laskar Bone. Pemusatan latihan-latihan militer itu, ditempatkan di Pammusureng yang terletak di daerah

⁷⁷ Amir, Muhammad, 2001. *Baso Pagilingi Abdul Hamid (Petta Pongawae) Profil Patriotik yang Konsekuensi Hingga Tetesan Darah Terakhir*. Makassar: Buletin Bosara, No. 17 Thn. VIII, hlm. 62-73.

⁷⁸ Sagimun, 1964, *Perang Sulawesi Selatan*. Jakarta: Museum Sejarah Tugu Nasional, hlm. 522.

Bone Selatan, Lalebbata-Watampone, dan beberapa daerah lainnya. (2) Mengutus H. Daeng Matteru untuk membeli alat perlengkapan perang ke Singapura dengan menggunakan perahu "*Ellungmangenre*". (3) Penegasan kembali wilayah penguasaan para Panglima Daerah yang disebut "*Dulung*".⁷⁹

Kerajaan Bone sebenarnya tidak mempunyai pasukan dalam arti tentara yang digaji tiap bulan. Seluruh rakyat wajib merasa menjadi pasukan jika kerajaan atau negara menghendaki, dan merasa terpanggil untuk menjadi pasukan jika kerajaan atau negara terancam bahaya perang, serta siap untuk membela dan mempertahankan kehormatan bangsa dan tanah air jika musuh datang menyerang. Meskipun demikian, sudah ada pimpinan-pimpinan ketentaraan atau pasukan tertentu, misalnya *Petta PonggawaE* (Pimpinan atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang Kerajaan Bone), *Petta Anregurunna AnakarungE* (Pimpinan Pasukan Kesatria), *Petta Pangulunna JowaE* (Pimpinan Pengawal Khusus), dan Panglima Daerah yang disebut *Dulung*.⁸⁰

Adapun tanggung jawab wilayah kekuasaan para *Dulung* atau Panglima Daerah pada waktu itu, adalah sebagai berikut :

1. *Dulung Awang Tangka*, yaitu bertanggung jawab atas wilayah pertahanan Kerajaan Bone bagian selatan (Bone Selatan) yang meliputi daerah Mare ke selatan sampai perbatasan Sinjai, termasuk juga Kahu dan Bontocani untuk mengawasi pasukan Belanda di Balangnipa (Sinjai).
2. *Dulung Lamuru*, yaitu bertanggung jawab atas wilayah pertahanan Kerajaan bagian barat (Bone Barat) yang meliputi daerah Bengo ke barat sampai perbatasan Camba dan Soppeng,

⁷⁹ Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 99; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 33.

⁸⁰ Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 33-34; Hamzah, Aminah, 1993, *op. cit.*, hlm. 57.

termasuk Libureng dan Lamuru.

3. *Dulung Ajangale*, yaitu bertanggung jawab atas wilayah pertahanan Bone bagian utara (Bone Utara) yang meliputi daerah Timurung, Sailong dan Cenrana, sampai ke perbatasan Wajo.
4. *Petta PonggawaE* didampingi oleh *Petta Anregurunna AnakarungE* dan *Petta Pangalunna JowaE*, bertanggung jawab atas wilayah pertahanan Kerajaan Bone bagian tengah (Bone Tengah) yang biasa juga disebut dengan "*lise pajung*" (di bawah naungan payung), yang meliputi daerah Cina ke utara sampai Awangpone, termasuk Palakka dan Pattiro.⁸¹

Sementara itu, pasukan ekspedisi militer Belanda yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk menyerang dan menaklukkan terhadap kerajaan-kerajaan yang tidak bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda, segera diperintahkan ke Sulawesi Selatan dan mendapat tugas pertama untuk menaklukkan Bone. Mereka tiba di perairan pantai BajoE pada 18 Juli 1905. Pimpinan pasukan ekspedisi militer tersebut, lalu mengutus Karaeng Maros untuk menyampaikan ultimatum terakhir kepada raja Bone pada 19 Juli 1905. Isi ultimatum itu, yaitu agar Bone bersedia menerima segala tuntutan pemerintah Belanda dan diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 24 jam. Kemudian, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri menyampaikan kepada perutusan Belanda itu, bahwa sesuai dengan adat yang berlaku di Bone, baik untuk kepentingan raja maupun untuk kepentingan rakyat Bone, tidak ditentukan oleh raja sendiri. Akan tetapi harus melalui musyawarah yang disepakati oleh dewan *Ade Pitu*.⁸²

⁸¹ Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 12; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 99.

⁸² Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 100; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.* hlm. 14.

Setelah perutusan Belanda kembali ke kapal, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama dewan *Ade Pitu*, Abdul Hamid Petta Ponggawae, dan para pembesar kerajaan lainnya, segera mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai tuntutan pemerintah Belanda tersebut. Pada pertemuan itu, raja Bone meminta tanggapan dan pertimbangan serta sikap mereka semua mengenai tuntutan pemerintah Belanda dan kedatangan pasukan ekspedisi militer Belanda yang sedang berada di perairan pantai BajoE. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh raja Bone, dan disaksikan anggota-anggota dewan *Ade Pitu* serta para pembesar kerajaan, Abdul Hamid Petta Ponggawae, kemudian menjawab dengan ucapan sebagai berikut:

"... Taroi sia mattonrong kompania Balandae apa masiri wegganga utaroanngi pau temmete wataku ri padakku sulangali, padakku lebba ri sompa, tuneke to riabusungi, rekkuwa tekkuewai BalandaE ri launa Cellu..."

Artinya :

Biarlah Kompeni Belanda mendarat atau menyerang, sebab saya malu sekali meninggalkan kesan yang memalukan terhadap sesamaku pemimpin, sesamaku yang disembah, kalau tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda di sebelah timur Cellu....

Lebih lanjut, Abdul Hamid Petta Ponggawae berkata lagi:

"... Tellu memengngi ponratu kutoddo kuteya lara, atame-mengnga ri Bone, kurilantiksi ponggawa mangkauk ri tengnga padang, tajajiyangnga parimeng ri nyameng perrina Bone."

Artinya :

Ada tiga hal tuanku, kujadikan pegangan (yang mengikat saya) sehingga pantang mundur selangkah pun, saya adalah hamba di Bone, lalu saya diangkat dan dilantik menjadi

Ponggawa..., serta saya dilahirkan oleh tuanku ditengah suka dukanya Bone.⁸³

Sesudah mendengar ucapan Abdul Hamid Petta Ponggawae, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri kemudian mengucapkan sebagai berikut:

" ... Siri agana kuwa labela assenna langi mani ri wawona Siri tenriyallinoang, ri madimenna labela janiralekna Bettawi malai sia manatta akkarungekku ri Bone. Iko mani kurrenuang kuwala passampo siri lolang ri wanuwa lino. Sellukni ri lapi tanae biritta pawawoikku rekkuwa temmatumpuk kannae paddenrin sungeкта mai ri libukna Bone (ri tennga padang).

Artinya:

Malu apalah namanya yang hanya langit saja di atasnya. Malu yang tidak ada di dunia, tentang keinginan Jenderal Betawi untuk mengambil warisan kerajaanku ri Bone. Hanya engkaulah yang kuandalkan kujadikan penutup malu hidup di dunia ini. Sudah terkubur dalam tanah berita ketinggianku kalau nanti tak berlaga senjata pelindung nyawa kita di daerah Bone (ditengah medan perang)".⁸⁴

Jika disimak lebih dalam lagi makna kata *sirɔʔ* dalam pernyataan-pernyataan tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa salah satu faktor pendorong perjuangan Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggawae dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda, ialah faktor sosial budaya yang bertolak dari *sirɔʔ*, yang berarti kehormatan, harga diri dan martabat. Hal ini mengandung makna bahwa kebulatan tekad kedua pemimpin itu untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan

⁸³ Salim, Muhammad, 1991. *Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Tolok Rumpakna Bone*. Ujung Pandang: Depdikbud, hlm. 17-18.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 18-19.

pemerintah Belanda, bukan hanya karena dorongan “perasaan malu sekali” demi kehormatan dan harga dirinya sendiri, tetapi juga karena tuntutan dan dorongan nilai budaya yang diterima, ditaati, dan dipertahankan. Dalam hubungan ini konsep *siri'* hendaknya diterjemahkan sebagai suatu konsep budaya.⁸⁵ Maksudnya, bahwa La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid telah menghayati dan menjadikan sebagai pegangan di dalam menjalani kehidupannya baik sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin maupun sebagai pribadi. Sebab, jika tidak menegakkan *siri'*, maka akan dipandang rendah martabatnya, bagaikan hidup di dunia yang tak berarti yang hanya merupakan bayang-bayang belaka. Oleh karena kedua pemimpin itu tidak mau dipandang demikian, terutama di kalangan para pemimpin dan sesamanya yang disembah, maka ia pun rela untuk berkorban hingga tetesan darah yang terakhir, demi kehormatan dan harga dirinya serta demi membela martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya dari ancaman pemerintah Belanda.

Selain faktor sosial budaya tersebut, faktor ekonomi dan politik tidak dapat diabaikan karena turut pula menentukan. Sebab jika disimak pernyataan dari Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri pada kutipan tersebut, yang makna harfiahnya berarti, bahwa “Malu yang tidak ada di dunia, tentang keinginan pemerintah Belanda untuk mengambil warisan kerajaanku di Bone”. Hal ini dapat mengandung makna bahwa perlawanan terhadap pemerintah Belanda, bukan hanya karena tuntutan dan dorongan malu yang tidak ada bandingnya di dunia, tetapi juga karena dorongan untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan dari ancaman dominasi politik atau kekuasaan pemerintah Be-

⁸⁵ PaEni, Mukhlis, 1986. “Landasan Kultur Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar”, dalam *Dinamika Bugis Makassar*. Ujung Pandang: PLPIIS, hlm. 21.

landa. Sebagaimana kita ketahui, bahwa La Pawawoi Karaeng Segeri memangku jabatan sebagai raja Bone, dan putranya Abdul Hamid sebagai *Ponggawa* Kerajaan Bone, mereka berdua adalah pewaris yang sah atas tahta dan mahkota Kerajaan Bone. Terlebih jika disimak tuntutan dari pemerintah Belanda terhadap Bone untuk menyerahkan kekuasaannya, yaitu tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya kepada pemerintah Belanda. Demikian pula tuntutan pemerintah Belanda terhadap Bone, supaya menyerahkan pelabuhan BajoE dan Pallime yang merupakan sumber penghasilan yang utama bagi Bone. Oleh karena itu, maka dapatlah dikatakan bahwa faktor ekonomi dan politik juga merupakan salah satu faktor pendorong perjuangan kedua pemimpin itu dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda.

Sikap Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggawae pada pertemuan tersebut, mendapat dukungan penuh dari para anggota dewan *Ade Pitu* dan para pembesar kerajaan. Karena itu, tuntutan pemerintah Belanda itu ditolak dengan tegas oleh pemerintah kerajaan itu. Dengan demikian ancaman pasukan ekspedisi militer Belanda dengan jumlah armada yang cukup besar yang sedang bertebaran di perairan pantai BajoE, tidak membuat mereka gentar sedikit pun, apalagi takut menghadapi pasukan Belanda. Bahkan kedatangan pasukan Belanda tersebut, justru membuat mereka semakin teguh dalam pendirian untuk melakukan perlawanan atau pertarungan dengan pasukan Belanda. Dukungan rakyat Bone terhadap kebijakan raja dan pemimpin-pemimpinnya itu tidak perlu diragukan lagi. Sebab, "budaya panutan" masih sangat kuat peranannya dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Budaya panutan yang dimaksud, yaitu ada ungkapan dalam masyarakat "*polo pang polo panni assaleng puakku mua, narekko naposiri'ni puatta, napomateni tu*

jowana", artinya; saya merelakan paha dan sayap atau tangan saya patah, asal di dalam membela rajaku atau pemimpinku, kalau rajaku atau pemimpinku sudah merasakan sesuatu yang memalukan, maka rakyat pengikutnya sudah harus bersedia mati.⁸⁶

Oleh karena itu, pemerintah Kerajaan Bone segera menyatakan bahwa Bone dalam keadaan bahaya. Perintah atau seruan perang (*bila-bila musuk*) diumumkan dan disebarkan ke seluruh pelosok wilayah kekuasaan kerajaan. Bahkan *bila-bila musu'* itu, juga disampaikan kepada kerajaan-kerajaan tetangga, antara lain Gowa, Soppeng, Wajo, Luwu, dan Sidenreng. Kepada semua *dulung* atau panglima pertahanan daerah, *arung palili* (raja bawahan), dan pimpinan kelaskaran lainnya, diperintahkan datang dengan segera berkumpul di Lalebbata-Watampone, Ibukota Kerajaan Bone, untuk menerima perintah penugasan. Selain itu, pemerintah Kerajaan Bone juga segera melakukan mobilisasi umum (penggalangan massa) untuk menggalang persatuan dan kesatuan rakyat dalam rangka menghadapi pasukan pemerintah Belanda atau dalam upaya membela dan mempertahankan kehormatan bangsa dan negara.⁸⁷

Sejak itu, bunyi genderang perang yang ditabuh oleh pemerintah Kerajaan Bone, bergema ke seluruh pelosok wilayah kekuasaan kerajaan. Demikian pula tentang adanya kapal perang Belanda yang bertebaran di Teluk Bone untuk menyerang Bone. Kedua berita penting itu, disambut dengan berbagai reaksi dari rakyat Bone. Ada yang berangkat ke gunung, masuk hutan, untuk mempersiapkan tempat pengungsian, ada pula yang mempersiapkan senjata pusaka yang dimilikinya, untuk melakukan perlawanan atau pertarungan dengan pasukan Belanda. Para *dulung*,

⁸⁶ Gonggong, Anhar, 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 87.

⁸⁷ Ernawati, 1997, *op. cit.*, hlm. 64; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 101.

arung palili, dan pemimpin lainnya, sibuk pula mempersiapkan diri dan laskarnya untuk menghadapi pasukan Belanda. Demikian pula para penjaga pantai di bawah koordinator Arung Tanete Riattang, senantiasa memperhatikan gerak-gerik kapal perang Belanda yang bertebaran di Teluk Bone, mulai dari Tanjung Pattiro di selatan sampai Pallime di bagian utara.⁸⁸

Kemudian, pada hari Kamis 20 Juli 1905, setelah para *dulung*, *arung palili*, dan pimpinan kelaskaran-kelaskaran berdatangan, Abdul Hamid Petta Ponggawae menyampaikan tugas bagi para *dulung* dan selanjutnya memerintahkan mobilisasi umum dengan memperlengkapi rakyat untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Lanjut dari pada itu, Abdul Hamid Petta Ponggawae sekali lagi di hadapan raja Bone, anggota dewan *Ade Pitu*, dan para pembesar kerajaan, serta para pemimpin kelaskaran dan rakyat banyak, sambil menghunus kerisnya dan mengangkatnya ke atas lalu mengucapkan ikrar atau sumpah setia (*mangaru* atau *mosong*), sebagai berikut:

“Lihatlah saya wahai tuanku raja Bone, perhatikanlah dengan baik wahai sekalian aparat, tengoklah juga wahai sekalian rakyat banyak. Sayalah pemberani terkenal yang tak menyayangi jiwaku untuk meninggalkan tubuhku berangkat menuju tempat yang baka, setelah ayahandaku mengumumkan perang. Saya akan memperlihatkan satunya kata dengan perbuatan dan untuk tidak menyalahkan harapan serta pemeliharaan ayahanda-Raja Bone bersama asuhan dari sekalian orang banyak. Meskipun saya hidup di antara orang yang berambut pirang serta bermata putih berarti kehidupanku ini tidak ada gunanya lagi melainkan hanya merupakan bayang-bayang belaka.”⁸⁹

⁸⁸ Ali, Andi Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 15-16; Amir, Muhammad, 2003, *op. cit.*, hlm. 74.

⁸⁹ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967. *Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Tolok Rumpakna Bone (Perang Bone)*. Ujung Pandang: Tim Penelitian Sejarah Bone, hlm. 7.

Ikrar atau sumpah setia yang diucapkan Abdul Hamid Petta Ponggawae tersebut, bukan hanya sebagai pernyataan kebulatan tekadnya dalam menghadapi pasukan pemerintah Belanda, tetapi yang lebih penting ialah dimaksudkan untuk membangkitkan serta memperkuat jiwa dan semangat perjuangan rakyat Bone dalam rangka melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda, atau demi membela dan mempertahankan kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Setelah Abdul Hamid Petta Ponggawae mengucapkan ikrar atau sumpah, kemudian disusul pula oleh pemimpin pasukan inti atau pasukan khusus Kerajaan Bone (*Petta Pangulunna JowaE*) yang digelar *MattanrasulaE*, yang bernama Muhammad Ali Arung Cenrana dan juga sebagai pemimpin rakyat Mampu, mengucapkan ikrar atau sumpah setia. Lalu disusul *To Marilaleng* Kerajaan Bone yang bernama Kappi PawelaiE ri Larappi. Berikutnya para anggota dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone, yaitu Arung Macege – pimpinan rakyat Macege (Masakkirang Daeng Patappe), Arung Tanete Riattang – pimpinan rakyat Tanete Riattang (Parakkasi Daeng Pawawo), Arung Tanete Riawang – pimpinan rakyat Tanete Riawang (Manireng Daeng Matteru), Arung Ponceng – pimpinan rakyat Ponceng (Daeng Silale), Arung Tibojong – pimpinan rakyat Tibojong, Arung Ta' – pimpinan rakyat Ta' (Mallawang Daeng Mattawang), dan Arung Ujung – pimpinan rakyat Ujung, secara berurutan mengucapkan ikrar atau sumpah. Selanjutnya, tampil pula mengucapkan ikrar atau sumpah, antara lain *Petta Anre-gurunna AnakarungE* (Makkuradde Daeng Mattana) yang juga memimpin rakyat Cellu, Dulung Ajangale La Madeppungeng, Daeng Massere atau Petta Sere Arung Timurung, Dulung Awang Tangka Ambo Gappa yang digelar Cambang Mattemunna Bojo,

dan Dulung Lamuru.⁹⁰

Selain itu, tampil pula pemimpin-pemimpin rakyat lainnya untuk mengucapkan ikrar sebagai pernyataan kebulatan tekad mereka dalam rangka menghadapi pasukan Belanda, yaitu antara lain pimpinan rakyat Sailong (Mangenre Daeng Manompo Arung Sailong), pimpinan rakyat Bengo (Arung Bengo Daeng Matteppo), pimpinan rakyat Sijelling (Mappegau Daeng Parani Arung Sijelling), pimpinan rakyat Kaju (Daeng Pasara Arung Kaju), pimpinan rakyat Maroanging (Daeng Mangkana Arung Maroanging), pimpinan rakyat Melle (Daeng Majeppu Arung Melle), pimpinan rakyat Gareccing dan Mare (Arung Gareccing), pimpinan rakyat Baringeng (Mappiare), Arung Segeri, pimpinan rakyat Ponre (Daeng Marola), pimpinan rakyat Tonra, Sullewatang Impakimpa (dari Wajo), Arung Pattiro, Sullewatang Cina (Daeng Riolo), dan pimpinan rakyat Kahu (La Temmu Page Arung Labua-ja). Lebih lanjut tampil pula silih bergantian pemimpin rakyat Gona, Lemoape, Masumpu, Jeppe, Parripung, Lilise, Mario dan lain-lain, untuk mengucapkan ikrar atau sumpah setia.⁹¹ Sehubungan dengan itu, mungkin ada baiknya dikemukakan salah satu ikrar atau sumpah yang diucapkan oleh pemimpin rakyat di bawah ini, yaitu ikrar atau *osong* dari pemimpin rakyat Melle yang berbunyi sebagai berikut :

“... Lihatlah kami wahai raja Bone, tengoklah juga kami jenderal besarnya Kerajaan Bone, dengarkanlah baik-baik sekalian rakyat banyak. Sayalah yang bernama I Macca Daeng Majeppu yang memimpin daerah serta rakyat Melle. Saya akan merelakan jiwaku untuk berkorban jika benar tentara Kompeni Belanda akan mencoba-coba menginjakkan kainya

⁹⁰ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 8-15; Salim, Muhammad, 1991, *op. cit.*, hlm. 25-60.

⁹¹ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *loc. cit.*

di tepi pantai BajoE di sebelah Timurnya Lona. Sejak sekarang ini jiwaku telah kuserahkan kepada rakyat dan daerah. Saya hidup hanya merupakan bayangan belaka, sebab saya tahu bahwa seluruh hidup dan kehidupanku hanya merupakan pinjaman belaka untuk kami gunakan di dalam membela kepentingan rakyat dan jika tentara Kompeni Belanda akan mencoba-coba menginjak-injak kedaulatan rakyat, maka itu merupakan detik terakhir bagiku....".⁹²

Demikianlah silih berganti menyatakan sumpahnya dari sekian banyak pimpinan rakyat maupun pimpinan kelaskaran dari seluruh daerah yang hadir ketika itu. Akhirnya, bangkitlah dari seluruh rakyat yang hadir dengan serentak menghunus kerisnya, lalu diacungkan ke atas yang disertai dengan cucuran air mata, bersorak dengan tekad bulat bahwa mereka semua rela mati dan bersedia tidak akan kembali ke kampung halamannya, demi untuk mempertahankan daerahnya dari serangan pasukan Belanda. Setelah itu mereka semua surut lalu duduk sambil memasukkan kerisnya ke dalam sarungnya masing-masing. Seketika itu juga genderang perang ditabuh, begitu pula bunyi sangkakala berku-mandang ke angkasa.⁹³

Setelah pengucapan ikrar atau sumpah selesai, para *dulung, arung palili*, dan pimpinan kelaskaran lainnya diperintahkan kembali ke daerah atau tempat tugasnya masing-masing. Sementara *Petta PonggawaE* bersama *Petta Anregurunna AnakarangeE*, *Petta Pangulunna JowaE*, dan beberapa pimpinan pasukan Kerajaan Bone lainnya disertai dengan iring-iringan pasukan masing-masing berangkat dari Lalebbata – Watampone menuju BajoE melalui Tibojong, Lona, dan Cellu sampai di BajoE, untuk me-

⁹² *Ibid.*, hlm. 14.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 16.

ngatur pertahanan di sepanjang pesisir pantai BajoE dan daerah sekitarnya. Tidak lama kemudian datanglah pimpinan rakyat Manajeng (Arung Manajeng) bersama pasukannya menemui Abdul Hamid Petta Ponggawae. Kemudian, Arung Manajeng bersama pasukannya diperintahkan kembali ke Pattiro untuk memperkuat pertahanan di sana. Namun sebelum mereka berangkat ke Pattiro untuk melaksanakan tugasnya, mereka diperintahkan terlebih dahulu menghadap raja Bone, untuk menyampaikan tugas yang diembannya. Perintah penugasan ini disetujui oleh Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri. Sebelum mereka berangkat, Arung Manajeng terlebih dahulu mengucapkan ikrar atau kesetiaannya. Sesudah itu, Arung Manajeng bersama pasukannya berangkat atau kembali ke Pattiro untuk mempersiapkan dan mengatur pasukannya di sepanjang pantai Ujung Pattiro. Pertahanan di Ujung Pattiro tidak begitu kuat karena pertahanan Kerajaan Bone di pusatkan di pantai BajoE dan muara Sungai Cenrana atau Pallime.⁹⁴

⁹⁴ Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 104-105; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 18; Amir, Muhammad, 2003, *op. cit.*, hlm. 78.

DINAMIKA PERLAWANAN ABDUL HAMID



Kerajaan Bone pada awal abad ke-20, semakin mendapat tekanan dari pemerintah Belanda. Tekanan itu tidak hanya berupa tuntutan untuk melepaskan penguasaan atas Pelabuhan Bajoe dan Pallime, tetapi juga tuntutan agar menandatangani *korte verklaring*, yaitu pernyataan tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya kepada Belanda. Kedua tuntutan pemerintah Belanda itu mendapat penolakan tegas dari Kerajaan Bone. Penolakan itulah yang menjadi penyebab pemerintah Belanda memutuskan untuk meluncurkan serangan militer terhadap Bone. Hal inilah yang mendorong Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama para pembesar kerajaan lainnya tampil ke depan untuk memimpin rakyatnya dalam melakukan perlawanan terhadap serangan militer Belanda. Namun pada penghujung perlawanan itu, pasukan militer Belanda yang akhirnya keluar sebagai pemenang dan berhasil menaklukkan Bone. Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang itu, maka dalam pembahasan bab ini difokuskan pada uraian tentang pasang surut perlawanan Abdul Hamid Petta Ponggawae terhadap pasukan pemerintah Belanda mulai dari awal perlawanan hingga akhir, serta perubahan sosial pasca perlawanan.

Awal perlawanan

Pemerintah Hindia Belanda semakin memusatkan perhatian untuk menguasai secara langsung seluruh daerah Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Salah satu kerajaan yang menjadi fokus dalam rencana itu adalah Kerajaan Bone. Sebab kerajaan ini tidak hanya menolak tuntutan agar menyerahkan penguasaan Pelabuhan BajoE dan Pallime, tetapi juga mengenai tuntutan supaya menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*), yaitu pernyataan tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya kepada Belanda. Penolakan terhadap kedua tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda itulah yang memicu terjadi konflik terbuka berupa perang antara Bone dengan Belanda. Dukungan rakyat Bone terhadap pemerintah kerajaan ini yang menolak dengan tegas segala tuntutan pemerintah Belanda itu, tidak perlu diragukan lagi sebab “budaya panutan” masih sangat kuat berperan dalam kehidupan masyarakat.

Penolakan Kerajaan Bone itu, mendorong pemerintah Belanda segera memerintahkan persiapan pemberangkatan pasukan pendudukan atau ekspedisi militernya ke Sulawesi Selatan. Pasukan ekspedisi militer Belanda itu, telah dibentuk jauh sebelumnya dan dipersiapkan untuk menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang tidak bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda. Mereka dipersiapkan di tiga tempat dan mendapat tugas pertama untuk menaklukkan Bone. Setelah persiapan dianggap matang, maka diberangkatkanlah pasukan pendudukan atau ekspedisi militer Belanda tersebut. Pasukan dari Jawa Barat diberangkatkan dari Tanjung Priok pada 11 dan 13 Juli 1905, dan pasukan dari Jawa Tengah diberangkatkan dari Semarang pada 13 dan 15 Juli 1905, serta pasukan dari Jawa Timur diberangkatkan dari Surabaya pada 13 dan 15 Juli

1905. Semua armada pasukan yang diberangkatkan itu, berlayar menuju suatu tempat yang telah ditentukan, yaitu harus berkumpul di Pelabuhan Bulukumba. Kemudian, dari Bulukumba mereka meneruskan pelayaran menuju BajoE, sebuah pelabuhan yang cukup aman, yang terletak di Teluk Bone.¹

Kerajaan Bone menjadi sasaran pertama tindakan penaklukan pasukan ekspedisi militer Belanda, karena merupakan kerajaan yang paling kuat dan paling berbahaya serta paling berpengaruh di antara kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Sulawesi Selatan pada waktu itu. Di samping itu, juga karena sikapnya yang dianggap “kurang ajar” dengan berani menolak segala tuntutan yang diajukan pemerintah Belanda.² Tindakan penaklukan militer terhadap Bone tersebut, tampaknya erat kaitannya dengan strategi tindakan militer yang telah dicanangkan oleh pemerintah Belanda, untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Maksudnya, Bone dijadikan sebagai sasaran pertama tindakan penaklukan pasukan ekspedisi militer Belanda ketika itu, dengan pertimbangan bahwa apabila Bone berhasil ditaklukkan, maka kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan lebih mudah ditaklukkan dan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada pemerintah Belanda.³

Pada 18 Juli 1905, kapal perang dan kapal pengangkut pasukan ekspedisi militer Belanda, yang terdiri atas 25 kapal telah ber-

¹ Poelinggomang, Edward L., 1980. *Perlawanan Rakyat Gowa Terhadap Pendudukan Belanda*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, hlm. 59; Kadir, Harun, dkk., 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin, hlm. 46.

² Harvey, Barbara Sillars, 1989. *Pemberontakan Kahar Mudzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Garafiti Press, hlm. 48; Kroesen, C. A., 1906. *Memori van Overgave van het Bestuur over het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*. Koleksi Arsip Nasional Indonesia, hlm. 9.

³ Amir, Muhammad, 2003. *Perlawanan Rakyat Bone Terhadap Belanda Pada 1905*. Makassar: Eramedia, hlm. 86; Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 47.

kumpul di perairan BajoE dan berlabuh pada jarak sekitar 5.000 meter dari pantai. Kapal-kapal perang dan pengangkut itu, antara lain; De Goen, Bromo, H. N. Hertog, Hendrik, Koningin, Regentes, De Ruyter, Soeland, Borneo, Asahan, Serdang, Brak, Tjantik II, dan Argus. Pasukan ekspedisi militer Belanda tersebut, pada mulanya di bawah pimpinan oleh Kolonel Infantri Van der Wedden sebagai Panglima Operasi, dan Kolonel Infantri C. A. van Loenen sebagai Wakil Panglima Operasi, serta Kolonel Kaveleri Jhr. L. D. C. de Lannoy sebagai Panglima Tempur. Berhubung karena Kolonel Infantri Van der Wedden sakit, maka ia kemudian digantikan oleh Kolonel Infantri C. A. van Loenen sebagai Panglima Operasi.⁴

Kemudian, pada 19 Juli 1905, pimpinan pasukan ekspedisi militer Belanda, mengutus Karaeng Maros untuk menyampaikan ultimatum terakhir kepada raja Bone, yaitu agar Bone bersedia menerima segala tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda dan diberi kesempatan menjawab dalam waktu 24 jam.⁵ Dalam sumber lain disebutkan bahwa isi pokok tuntutan itu ialah mengharuskan pemerintah Kerajaan Bone menandatangani ketentuan penyerahan kekuasaan kepada pemerintah Belanda, persetujuan ganti rugi, pelaksanaan penarikan pajak atas ekspor dan impor, mengakui hak pemerintah Belanda dalam daerah Bone. Sehubungan dengan itu, maka pegawai pemerintah Belanda akan ditempatkan di Bone.⁶ Selanjutnya, Raja Bone La Pawawoi Karaeng

⁴ Patang, Lahadjdji, 1976. *Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya*. Jakarta: YKGM (Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia, hlm. 24; Abduh, Muhammad, 1985. *Sejarah Perjuangan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 100.; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 277.

⁵ Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 100; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 277.

⁶ Koelstra, E.B., 1910. *Kumpulan Artikel*. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, hlm. 362; Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 47.

Segeri menyampaikan kepada perutusan Belanda (Karaeng Maros) itu, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Bone, baik untuk kepentingan raja maupun untuk kepentingan rakyat Bone, tidak ditentukan oleh raja sendiri. Akan tetapi harus melalui musyawarah yang disepakati oleh dewan *Ade Pitu* Bone.⁷

Setelah perutusan Belanda kembali ke kapal, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama para anggota dewan *Ade Pitu* kerajaan, Abdul Hamid Petta Ponggawae, serta para pembesar kerajaan lainnya, segera mengadakan pertemuan untuk membicarakan tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda dan kedatangan pasukan ekspedisi militer Belanda yang sedang bertebaran di perairan BajoE. Pada pertemuan itu, pemerintah Kerajaan Bone menolak dengan tegas tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda. Bahkan tuntutan itu disambut dengan usaha-usaha mempersiapkan diri dan memperkuat posisi kekuatan pasukan militernya (laskarnya), dalam rangka menghadapi pasukan ekspedisi militer Belanda. Sejumlah besar laskar Bone ditempatkan di sepanjang pesisir pantai, mulai dari Ujung Pattiro di bagian selatan sampai muara Sungai Cenrana atau Pallime di bagian utara utara.⁸

Sehubungan dengan itu, setelah persiapan-persiapan dalam rangka menghadapi pasukan ekspedisi militer Belanda selesai, maka pemerintah kerajaan segera mengirim utusan untuk menyampaikan jawaban atas tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda. Adapaun jawaban pemerintah Kerajaan Bone tersebut, yaitu bahwa "semua usaha-usaha untuk membawa Bone kepada pemikiran yang lebih baik haruslah dipandang tidak ber-

⁷ Ali, A. Muh. 1984. *Rumpakna Bone (Perang Bone) 1905*. Watampone: Damai, hlm. 14; Amir, Muhammad, 2003, *op. cit.*, hlm. 87.

⁸ Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 101; Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 47.

manfaat, dan negeri Bone telah tertutup bagi ekspor dan impor".⁹

Penolakan Bone terhadap tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Belanda, merupakan isyarat bagi pimpinan ekspedisi militer Belanda untuk mendaratkan pasukannya guna melakukan penyerangan. Pada 21 Juli 1905, pasukan ekspedisi militer Belanda mulai melakukan pendaratan di Ujung Pattiro. Penentuan Ujung Pattiro sebagai tempat pendaratan pertama bagi pasukan Belanda, karena dianggap lebih aman. Di samping itu, juga karena pertahanan di Ujung Pattiro tidak begitu kuat. Oleh karena pertahanan Bone dipusatkan di pantai BajoE dan daerah sekitarnya, serta di muara Sungai Cenrana atau Pallime.¹⁰ Itulah sebabnya pasukan ekspedisi militer Belanda memilih Ujung Pattiro sebagai tempat pendaratan pertama, demi untuk menghindari jangan sampai pasukannya mendapat banyak perlawanan dan kesulitan.

Meskipun pertahanan Bone di Ujung Pattiro tidak begitu kuat, tetapi pendaratan ekspedisi militer Belanda yang dipimpin oleh Kolonel C. A. van Loenen di daerah itu, mendapat perlawanan sengit dari laskar Bone di bawah pimpinan Arung Manajeng. Namun pada penghujung pertarungan mati-matian itu, pihak Belandalah yang keluar sebagai pemenang. Pada pertempuran habis-habisan di Ujung Pattiro dan daerah sekitarnya, gugur sebagai kusuma bangsa di medan bakti atau juang, antara lain; Senrima La Pattawe, La Palilu, La Badullah, La Manakku, La Palagu, La Muhammad, La Canunnu, La Setta, Daeng Masiga, Daeng Mattengnga, Daeng Mallipu, La Sakke, La Rubana, Daeng Massese (pimpinan rakyat BelawaE), Dulunna Pajalele, Uwa Cabalu, Rilompengeng, Kapitan Letta Tanah, Laiwa, La Paggalung, Daeng Mananrang (pimpinan rakyat Calo), Laoni,

⁹ Kielstra, E. B., 1910, *op. cit.*, hlm. 362; Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hl. 48.

¹⁰ Harvey, 1989, *op. cit.*, hlm. 48-49; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 18.

Daeng Mallongi, La Tiwajo, dan Daeng Pagiling di pihak laskar Bone. Sedangkan yang luka-luka, antara lain Daeng Mallaga, Lapawe, Daeng Balede, dan La Bante.¹¹

Kekalahan laskar Bone di Ujung Pattiro, melapangkan jalan bagi pasukan ekspedisi militer Belanda untuk menerobos pertahanan Bone di pantai BajoE, baik melalui darat maupun melalui laut. Sebab, setelah beberapa hari melakukan operasi militer di Ujung Pattiro dan daerah sekitarnya, pasukan ekspedisi militer Belanda kemudian bergerak ke utara melalui Lanreseng, Buarenge, dan Barebbo lewat darat untuk menyerang pertahanan laskar Bone di pantai BajoE dan Lalebbata – Watampone dari darat. Meskipun di sepanjang perjalanan, pasukan Belanda mendapat perlawanan sengit dari rakyat atau laskar Bone yang menelan korban jiwa manusia yang tidak sedikit. Namun setelah kurang lebih satu minggu kemudian sejak pendaratan pertama, pasukan ekspedisi militer Belanda berhasil mendekati benteng pertahanan laskar Bone di pantai BajoE. Taktik dan strategi pasukan ekspedisi militer Belanda tersebut, tampaknya berhasil mengacaukan pusat pertahanan laskar Bone yang memusatkan pertahanannya di pantai BajoE. Sebab, di samping terancam dari arah selatan (darat), mereka juga terancam dari arah timur (laut), sehingga Abdul Hamid Petta Ponggawae memerintahkan sebagian laskar Bone dikerahkan untuk menyongsong pasukan ekspedisi militer Belanda yang menyerang dari arah selatan. Sementara sisanya tetap pada rencana semula, yaitu menyongsong musuh atau pasukan ekspedisi militer Belanda dari arah laut (timur).¹²

¹¹ Arung Majaneng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 20; Abduh, Muhamad, 1985, *op. cit.*, hlm. 105 – 106.

¹² Friedericy, H. J., 1991. *Sang Jenderal*. Jakarta: Grafiti Press, hlm. 144; Arfah, Muhammad, 1977. *Baso Pagilingi Abdul Hamid Panglima Besar Kerajaan Bone Melawan Belanda*. Ujung Pandang: Depdikbud, hlm. 38; Ernawati, 1997. *Perjuangan Baso Pagilingi Abdul Hamid Menentang Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Kerajaan Bone Pada*

Dengan demikian, maka pertahanan laskar Bone di pantai BajoE yang sebelumnya begitu kuat atau kokoh, sekarang terbukalah jalan bagi pasukan ekspedisi militer Belanda untuk menerobosnya.

Puncak Perlawanan

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa pasukan ekspedisi militer Belanda mulai melakukan pendaratan di Ujung Pattiropo pada 21 Juli 1905. Pendaratan itu kemudian disusul pula dengan upaya-upaya pendaratan di pantai BajoE dan daerah sekitarnya. Pasukan ekspedisi militer Belanda yang berupaya melakukan pendaratan dengan menggunakan sekoci-sekoci itu, didahului dan disertai dengan tembakan-tembakan meriam dari kapal-kapal perang Belanda. Tembakan-tembakan meriam itu ditujukan terhadap benteng-benteng pertahanan laskar Bone di BajoE dan daerah sekitarnya. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk melindungi sekoci-sekoci yang sarat dengan pasukan Belanda yang sedang melakukan pendaratan. Upaya pendaratan pasukan ekspedisi militer Belanda itu, mendapat perlawanan sengit dari laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggowae, yang telah bersiap-siap menyongsong kedatangan atau pendaratan musuh (pasukan Belanda) di sepanjang pesisir pantai BajoE. Demikian pula tembakan-tembakan meriam dari kapal-kapal perang Belanda, dibalas juga dengan tembakan-tembakan meriam yang tidak kalah hebatnya dari laskar Bone.¹³

Tampaknya, upaya-upaya pendaratan pasukan ekspedisi militer Belanda tersebut, merupakan penjajakan awal sebelum melakukan penyerangan secara besar-besaran untuk menakluk-

1905. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana IAIN Alauddin, hlm. 76-77.

¹³ Mattulada, 1998. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, hlm. 373; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 20.

kan Bone. Hal itu bukan hanya dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan mencari tempat atau daerah pendaratan yang lebih aman, tetapi juga dimaksudkan sebagai pancingan untuk mengetahui tempat pertahanan yang terkuat dari laskar Bone. Sementara itu, laskar Bone tetap siap siaga di tempat tugas masing-masing untuk menyongsong setiap upaya pendaratan pasukan Belanda, dan sambil memperhatikan gerak-gerik kapal-kapal perang Belanda yang sedang bertebaran di perairan pantai BajoE atau di Teluk Bone. Setiap upaya pendaratan pasukan Belanda, selalu disambut dengan tembakan-tembakan gencar dari laskar Bone, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran antara kedua belah pihak di pantai BajoE dan daerah sekitarnya.¹⁴

Meskipun pertempuran antara laskar Bone dengan pasukan Belanda di pantai BajoE dan daerah sekitarnya, telah berlangsung selama beberapa hari, tetapi pasukan Belanda belum berhasil menancapkan panji-panji perangnya di darat. Oleh karena itu, setelah pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung selama kurang lebih satu minggu, pimpinan ekspedisi militer Belanda segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan pendaratan secara besar-besaran guna menaklukkan Bone. Upaya mereka itu akhirnya berhasil mendarat di sebelah utara BajoE, yaitu pantai Bene atau sekitar daerah Toro pada malam 27 Juli 1905. Pendaratan pasukan Belanda tersebut, disertai dengan tembakan-tembakan meriam yang hebat dari kapal-kapal perang Belanda terhadap kubu-kubu pertahanan laskar Bone. Tembakan-tembakan meriam itu, dibalas pula dengan tembakan-tembakan meriam yang tidak kalah hebatnya dari laskar Bone, sehingga terjadilah pertempuran atau aduh kekuatan meriam antara kedua belah pihak. Demikian pula pendaratan-pendaratan pasukan Belanda

¹⁴ Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 20; Ernawati, 1997, *op. cit.*, hlm. 79-80.

tersebut, mendapat perlawanan sengit dari rakyat atau laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggowae dan Daeng Matteppo Arung Bengo. Mereka berdua dan para pemimpin lainnya senantiasa memimpin laskar Bone dalam memberikan perlawanan mati-matian terhadap serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda yang baru mendarat, sehingga terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak di daerah Bene dan sekitarnya. Meskipun pada pertarungan mati-matian itu, laskar Bone berhasil memukul mundur pasukan Belanda, namun hal itu harus dibayar mahal dengan gugurnya salah seorang pimpinan laskar Bone, yaitu Daeng Matteppo Arung Bengo bersama beberapa anggota laskar Bone lainnya.¹⁵

Keesokan harinya, yaitu pada 28 Juli 1905, pertempuran sengit antara laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggowae dengan ekspedisi militer Belanda yang dipimpin oleh Kolonel C. A. van Loenen, kembali berkobar di daerah Bene. Pendaratan-pendaratan pasukan Belanda terus berlanjut pada hari itu. Sementara laskar Bone, dengan semangat perjuangan yang pantang mundur dan menyerah, memberikan perlawanan mati-matian, sehingga pertempuran antara kedua belah pihak semakin sengit atau seruh dan bahkan semakin meluas ke daerah Toro dan TippuluE. Pada pertempuran mati-matian di daerah-daerah tersebut, gugurlah sebagai kusuma bangsa pimpinan laskar Bone, antara lain La Macca Daeng Majjeppu Arung Melle dan Sullewatang Impakimpa dari Wajo.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pada pertempuran itu, bukan hanya laskar Bone yang terlibat, tetapi juga laskar dari kerajaan lain di Sulawesi Selatan turut membantu Bone dalam perang melawan pasukan Belanda.

¹⁵ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 25; Arafah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 38; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 21.

¹⁶ Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 21; Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 26.

Abdul Hamid Petta Ponggawae segera memerintahkan kepada La Maddeppungeng Daeng Massere Arung Timurung (Dulung Ajangale), untuk tampil ke depan memimpin pertempuran bersama La Mangerre Daeng Manompo Arung Sailong. Pertempuran pun semakin sengit dan semakin meluas ke daerah sebelah timur Lona, yaitu daerah LonraE dan BajoE karena pasukan Belanda terus melakukan pendaratan-pendaratan. Demikian pula dengan laskar Bone, karena Abdul Hamid Petta Ponggawae segera pula melepas atau memerintahkan kepada pasukan intinya yang disebut dengan *MattanrasulaE* di bawah pimpinan *Petta Pangulunna JowaE* La Muhammad Ali Arung Cenrana untuk maju ke medan pertempuran bersama La Mappiare Arung Baringeng, Arung Gareccing, Arung Ponre, La Massakirang Arung Macege, Arung Segeri, Kapitan La Saraju, Arung Tanete, dan Arung Sijelling serta pemimpin-pemimpin laskar lainnya bersama pasukannya. Sementara Abdul Hamid dengan dikawal oleh pasukan khusus Bone yang berbendera bulan sabit, tampil ke depan memimpin pertempuran, sehingga terjadilah pertempuran habis-habisan antara kedua belah pihak di daerah LoraE dan BajoE yang terletak di sebelah timur Lona. Kedua belah pihak saling berusaha untuk mematahkan serangan dari pihak lawan-lawannya. Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama pasukannya, dengan semangat perjuangan yang pantang menyerah, maju terus untuk menyerang musuh (pasukan Belanda) dengan mempergunakan senapan dan tombak. Pasukan Belanda pun terpecah untuk melakukan pengepungan sehingga pertempuran pun semakin berkecamuk antara kedua belah pihak.¹⁷

Demikian pula di sektor selatan, terjadi pertempuran yang tidak kalah hebatnya antara laskar Bone di bawah pimpinan

¹⁷ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 26-30; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 21-23.

La Parakkasi Daeng Pawawo (Arung Tanete Riattang, anggota dewan *Ade Pitu* Kerajaan Bone) dengan pasukan Belanda terutama di sekitar benteng pertahanan utama di BajoE. Meskipun La Parakkasi Daeng Pawawo Arung Tanete Riattang bersama pasukannya memberikan perlawanan mati-matian terhadap serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda, tetapi mereka berhasil didesak oleh pasukan Belanda, dan akhirnya mengundurkan diri ke daerah Cellu. Oleh karena pada waktu itu, pasukan Belanda melancarkan serangan dari dua arah yang bersamaan, yaitu pasukan Belanda yang melakukan pendaratan di Ujung Pattiro beberapa hari yang lalu menyerang dari arah selatan dan serangan dari arah timur yang dilancarkan oleh pasukan Belanda yang melakukan pendaratan di BajoE. Dengan mundurnya La Parakkasi Daeng Pawawo bersama pasukanya dari benteng pertahanan BojoE ke Cellu, maka pasukan Belanda dengan mudah berhasil menduduki dan menguasai benteng pertahanan BajoE bagian selatan.¹⁸

Sementara di bagian utara, yaitu di sebelah timur Lona (LonraE dan BajoE), pertempuran yang dipimpin langsung oleh Abdul Hamid Petta Ponggowae, berkecamuk terus dan para korban yang gugur dan luka-luka bergelimpangan di medan pertempuran. Puluhan pimpinan dan ratusan anggota laskar Bone yang gugur dan luka-luka dalam pertempuran di daerah sebelah timur Lona. Mereka itu antara lain; La Maddepungeng Daeng Massere Arung Timurung (Dulung Ajangale), La Mangerre Daeng Manompo Arung Sailong, Senrima La Pannusu, pimpinan rakyat Parippung, Daeng Mattengnga pimpinan rakyat Lilise, Kapitang La Siraju, Arung Segeri, pimpinan rakyat Mario, Senrima Daeng

¹⁸ Salim, Muhammad, 1991. *Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Tolok Rumpakna Bone*. Ujung Pandang: Depdikbud, hlm. 130; Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 31; Ali, A. Muh., 1990, *op. cit.*, hlm. 49-50.

Malinta dari Cina, Senrima La Sakka pimpinan rakyat Jeppe, dan pimpinan rakyat Masumpu. Sedangkan yang luka parah, yaitu antara lain; Senrima Daeng Riolo Sullewetang Cina, Senrima Daeng Sitaba, dan Senrima Daeng Mattutu.¹⁹

Oleh karena itu, maka posisi Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama laskarnya di medan pertempuran semakin sulit. Sebab, sebagian besar pimpinan laskarnya telah gugur dan mengalami luka-luka. Bahkan pasukan Belanda mulai melakukan pengepungan terhadap posisi Abdul Hamid bersama laskarnya. Mereka tidak hanya terkepung dari arah utara dan selatan, tetapi juga dari arah timur sehingga demi untuk melanjutkan perjuangan dan perlawanan, Abdul Hamid bersama laskar Bone mengalihkan pertempuran atau mengundurkan diri ke daerah sebelah timur Cellu, yaitu di daerah Lona. Pertempuran sengit antara laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid dengan pasukan Belanda kembali berkobar di daerah Lona. Oleh karena serangan pasukan Belanda semakin gegar dan terlalu kuat, sehingga Abdul Hamid bersama laskarnya terpaksa mengundurkan diri lagi ke daerah Cellu. Dengan mundurnya seluruh laskar Bone dari benteng pertahanan di pantai BajoE dan daerah sekitarnya ke daerah Cellu, maka pasukan Belanda akhirnya berhasil menduduki dan menguasai seluruh benteng pertahanan di pantai BajoE dan daerah sekitarnya.²⁰

Abdul Hamid Petta Ponggawae kemudian mengadakan konsolidasi di daerah Cellu setelah kurang lebih sehari semalam melakukan perlawanan dan pertempuran dengan pasukan Belanda. Ia segera mengutus Senrima Daeng Marola Arung Ponre ke Lale-

¹⁹ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 26-31; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 39; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 106.

²⁰ Salim, Muhamad, 1991, *op. cit.*, hlm. 130; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 39; Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 31.

bbata-Watampone untuk menyampaikan dan melaporkan kepada Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri, tentang pendaratan dan pertempuran serta dikuasainya benteng pertahanan Bone di pantai BajoE dan daerah sekitarnya oleh pasukan Belanda atau meminta petunjuk lebih lanjut. Lalu Abdul Hamid, memerintahkan pula kepada Senrima Arung Lemoape untuk melakukan pengecekan terhadap pimpinan dan anggota laskarnya yang gugur dan mengalami luka-luka dalam pertempuran hari itu. Tidak lama kemudian, Senri Daeng Marola Arung Ponre tiba kembali dari Lalebbata-Watampone dengan membawa pesan dari raja Bone untuk Abdul Hamid. Ia menyarankan agar Abdul Hamid beristirahat sambil mengatur laskarnya di daerah Cellu. Sementara raja Bone bersama keluarga istana berkeinginan untuk pindah ke Palakka serta memindahkan seluruh perlengkapan perang dan amunisi yang ada di Lalebbata-Watampone ke Palakka. Sedangkan Senrima Arung Lemoape, setelah melakukan pengecekan lalu kembali melaporkan kepada Abdul Hamid, tentang nama-nama pimpinan laskar yang gugur dan luka-luka dalam pertempuran ketika itu (27 dan 28 Juli 1905), yaitu antara lain; Arung Timurung (Dulung Ajangale), Arung Sailong, Arung Bengo, Arung Melle, Arung Segeri, Arung Mario, Sullewatang Impakimpa (Wajo), Senrima Daeng Malinta, Kapitan La Siraju, dan Arung Parippung. Sementara yang mengalami luka-luka, yaitu antara lain; Senrima Daeng Riolo, Senrima Daeng Sitaba, Senrima Daeng Mattutu, dan Senrima La Nusu.²¹

Berdasarkan sejumlah sumber antara lain disebutkan bahwa pendaratan pasukan ekspedisi militer Belanda disambut oleh laskar Bone dengan tembakan-tembakan yang cukup dahsyat. Laskar

²¹ Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 38-39; Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 31-32; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 23-24.

Bone (menurut dugaan Ch. Kies sekitar 7. 000 orang, sedangkan menurut Abd. Razak Daeng Patunru sekitar 2.000 orang) yang terlibat dalam pertempuran mati-matian di BajoE dan daerah sekitarnya pada 27 dan 28 Juli 1905. Mereka tidak mampu membendung dan membinasakan pasukan ekspedisi militer Belanda yang memiliki persenjataan yang lebih baik. Dalam pertempuran itu, laskar Bone mengalami kerugian yang besar dan kehilangan anggota laskarnya sekitar 1.000 orang. Menurut Abd. Razak Daeng Patunru, bahwa Bone mengalami kerugian 256 orang tewas dan 9 orang luka-luka, termasuk di dalamnya kurang lebih 100 yang tewas dari kalangan bangsawan tinggi Bone. Sedangkan di pihak pasukan Belanda yang meninggal 48 orang, luka berat 9 orang, dan luka ringan 11 orang, termasuk yang meninggal seorang letnan infantri yang bernama Posthast dan seorang penembak ulung (*fuseliur*). Ketika itu laskar Bone telah mendapat bantuan dari Gowa, Wajo, dan Sidenreng. Kerugian yang dialami Bone tersebut, erat kaitannya dengan taktik dan strategi perang yang baru di canangkan setelah pasukan ekspedisi militer Belanda telah siap melancarkan penyerangan, sehingga sangat sederhana dan tidak tertata dengan baik.²²

Ketika Abdul Hamid Petta Ponggawae sedang mengatur dan mempersiapkan laskarnya di daerah Cellu keesokan harinya, yaitu pada 29 Juli 1905, datanglah Senrima Daeng Mangawe membawa berita bahwa tampaknya pasukan Belanda akan bergerak dari BajoE menuju ke barat melalui Lona dan kemungkinan akan menyerang dan menduduki Lalebbata-Watampone. Oleh karena itu, Abdul Hamid memerintahkan kepada Senrima Daeng Marola Arung Ponre bersama laskarnya segera berangkat ke Lalebbata-

²² Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 48; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 278-279; Kies, Ch. 1935. *De Expeditie naar Zuid Celebes in 1905*. J. G., BGN. I, hlm.

Watampone untuk mengawal Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama keluarga istana ke Palakka, dan memindahkan semua perlengkapan perang yang masih ada di Lalebbata-Watampone ke Palakka. Sementara Abdul Hamid bersama panglima pasukan inti laskar Bone, dan pemimpin-pemimpin laskar lainnya bersama pasukannya meninggalkan daerah Cellu menuju ke daerah Lona untuk menghadang pasukan Belanda di daerah itu.²³

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan laskar Bone yang dipimpin langsung oleh Abdul Hamid Petta Ponggawae di sebelah utara Cellu dan di daerah Lona. Oleh karena serangan pasukan Belanda terlalu kuat dan semakin gencar, sehingga Abdul Hamid bersama laskarnya mengundurkan diri ke daerah Tibojong dan kemudian bertahan di sebelah barat Tibojong. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak di daerah itu, berlangsung hingga sore hari dan baru berhenti setelah menjelang malam. Pasukan Belanda kembali ke BajoE, sedangkan Abdul Hamid berangkat ke Lalebbata-Watampone untuk memeriksa perlengkapan perang yang masih tertinggal. Setelah beristirahat di istana, Abdul Hamid disertai panglima pasukan inti dan Senrima Daeng Marola bersama laskarnya berangkat ke Palakka pada dini hari untuk melihat keadaan raja Bone bersama keluarga istana sambil melaporkan situasi di medan peperangan.²⁴

Kegagalan laskar Bone dalam membendung serangan musuh di pesisir pantai, sehingga pasukan ekspedisi Belanda berhasil menerobos pertahanan laskar Bone di BajoE dan daerah seki-

²³ Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 39-40; Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 32-33; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 23-24.

²⁴ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 33; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 40; Ali, A. Muh., 1990. *Transkrip Tolo Rumpakna Bone*. Watampone: Depdikbud, hlm. 52-55.

tarnya. Kenyataan itu memaksa Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama pimpinan angkatan perang beserta para pembesar kerajaan dan rakyat meninggalkan Lalebbata-Watampone dan mengungsi ke daerah pedalaman. Pada 30 Juli 1905, pasukan Belanda bergerak dari BajoE menuju ke Lalebbata-Watampone. Laskar Bone pun tidak mampu membendung dan mematahkan serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda. Akibatnya, pasukan Belanda akhirnya berhasil menduduki dan menguasai Lalebbata-Watampone pada 30 Juli 1905.²⁵

Keesokan harinya yakni 31 Juli 1905, pasukan Belanda bergerak dari Lalebbata-Watampone menuju ke Palakka, setelah memperoleh informasi bahwa Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri beserta pengawalnya sedang berada di Palakka. Pengawal raja Bone yang bertugas mengawasi pasukan Belanda melihat pasukan Belanda berjalan beriringan di Pakkanrebata (sebelah selatan Lalebbata-Watampone) menuju jurusan Palakka, dengan segera melaporkan hal tersebut kepada raja Bone yang sedang berada di Palakka. Oleh karena itu, Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama laskarnya segera berangkat menyongsong pasukan Belanda di Coppoleang (sebelah barat Lalebbata-Watampone). Tidak lama kemudian, terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak di Coppoleang. Pada pertempuran itu, kuda tunggangan Abdul Hamid terkena tembakan musuh dan jatuh tersungkur, sehingga terpaksa menggantinya dengan kuda yang lain dan terus mengobarkan pertempuran hingga sore hari. Sementara perang berkecamuk di Coppoleang, Abdul Hamid mengirim utusan kepada raja Bone untuk mengawal raja Bone ber-

²⁵ Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 4849; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 279.

sama keluarga istana dari Palakka menuju ke Pasempe. Meskipun dalam pertempuran sengit di Coppoleang tersebut, Abdul Hamid bersama laskarnya berhasil memukul mundur pasukan Belanda, namun mereka harus kehilangan puluhan anggota laskarnya. Pasukan musuh (Belanda) lalu kembali ke Lalebbata-Watampone.²⁶

Kemudian laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae berangkat ke Pasempe. Mereka tiba di Pasempe pada malam itu dan segera mengatur dan mempersiapkan pertempuran di daerah itu. Abdul Hamid segera menemui Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri beserta keluarga istana di rumah kediaman La Mappasissi Arung Pasempe. Selanjutnya, Abdul Hamid memerintahkan kepada laskarnya untuk tetap siaga karena pasukan Belanda pasti akan datang menyerang. Sementara di pihak Belanda, setelah memperoleh informasi yang pasti bahwa raja Bone beserta pengawalnya berada di Pasempe, maka pimpinan pasukan ekspedisi militer Belanda Kolonel C. A. van Loenen bersama pasukannya berangkat ke Pasempe pada 2 Agustus 1905.²⁷

Perlu dikemukakan bahwa Pasempe adalah merupakan benteng pertahanan terkuat Kerajaan Bone di daerah pedalaman sejak dahulu. Oleh karena letaknya yang sangat strategis dan sulit dijangkau, sehingga sering dijadikan sebagai tempat pertahanan terakhir bagi Bone dalam setiap peperangan, baik dalam menghadapi kerajaan-kerajaan lokal di daerah Sulawesi Selatan, maupun dalam menghadapi pasukan Belanda. Keberadaan Pasempe tampaknya mempunyai peranan penting dalam lembaran sejarah Bone. Sebab, merupakan kunci utama atau barometer ka-

²⁶ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 34; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 40.

²⁷ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 279; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm.107; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 25-26; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 40.

lah tidaknya dalam setiap peperangan yang dihadapinya. Itulah sebabnya ketika pasukan Belanda berhasil merebut dan menduduki BajaoE dan Lalebbata-Watampone yang merupakan Ibukota Kerajaan Bone, raja Bone bersama para pembesar kerajaan yang disertai dengan laskar Bone, mengungsi atau mengundurkan diri ke daerah Pasempe untuk melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadilah pertempuran sengit yang cukup menentukan antara laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae dengan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel C. A. van Loenen di daerah Pasempe pada 3 Agustus 1905. Ketika itu tampilah dua orang srikandi, yaitu Cenra Datu Cinnong dan Madura Daeng Tamera mengucapkan ikrar di hadapan raja Bone, untuk turut serta mengadakan perlawanan sampai tetes darah yang terakhir dalam menghadapi pasukan Belanda. Namun kedua srikandi hanya diperkenankan untuk mengawal raja Bone dalam perjalanan selanjutnya. Sementara perang berkecamuk, raja Bone bersama pengwalnya meninggalkan Pasempe menuju Cinennung yang terletak di sebelah selatan Pasempe. Meskipun pada pertempuran sengit itu, laskar Bone yang mendapat bantuan dari Gowa, Wajo, Soppeng, dan Sidenreng, memberikan perlawanan mati-matian terhadap serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda di daerah Pasempe. Akan tetapi gabungan pasukan itu tidak mampu membendung serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda yang memiliki persenjataan yang lebih baik. Bahkan pasukan Belanda berhasil merebut dan menguasai pertahanan Bone di Pasempe. Itulah sebabnya laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid mengundurkan diri ke daerah Cinennung.²⁸

²⁸ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 34; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op.*

Kekalahan secara berturut-turut yang dialami oleh laskar Bone di Bajoe, Lalebbata – Watampone, dan Pasempe, serta keberhasilan Belanda menerobos ketiga pertahanan utama laskar Bone tersebut, maka dewan peperangan kerajaan memutuskan untuk mengungsikan raja Bone semakin jauh ke daerah pedalaman guna meneruskan peperangan dengan Belanda. Bahkan dalam perkembangan kemudian, raja Bone bersama pengawal yang setia terpaksa harus meninggalkan atau keluar dari wilayah kekuasaan Bone untuk melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Pembahasan lebih lanjut mengenai masalah tersebut, akan diuraikan pada pembahasan berikut ini.

Perjalanan Panjang Ke Utara

Walaupun pasukan ekspedisi militer Belanda telah berhasil merebut dan menguasai pertahanan laskar Bone di BajoE, Lalebbata-Watampone, dan Pasempe, tetapi mereka masih merasa belum mencapai sukses yang sepenuhnya. Sebab, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama para pembesar kerajaan belum berhasil ditawan dan dipaksa untuk mengakui kekuasaan pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pimpinan pasukan ekspedisi militer Belanda, di samping mempersiapkan pasukan khusus untuk mengejar dan menangkap raja Bone, juga mempersiapkan penyerangan ke pusat-pusat pertahanan laskar Bone di daerah pedalaman. Pasukan Belanda yang melancarkan serangan ke daerah pedalaman, secara berturut-turut berhasil menduduki daerah-daerah; Ulaweng pada 3 Agustus 1905, Tanjung pada 4 Agustus 1905, dan Otu, Manapotu, Amali, Palongki pada 5 Agustus 1905, serta Laliku dan Kalu pada 6 Agustus 1905.²⁹

cit., hlm. 279; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 40; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 26-27.

²⁹ Kadir, Harun, dkk., 1984, *op. cit.*, hlm. 49; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op.*

Serangan pasukan Belanda itu, mendapat perlawanan dari laskar Bone di daerah-daerah tersebut. Namun pada penghujung pertempuran itu, rakyat atau laskar Bone akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya atau pasukan Belanda dan mereka harus takluk di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Bagi mereka yang tidak mau tunduk atau menolak kehadiran kekuasaan pemerintah Belanda, tetap melanjutkan perlawanan melalui perang gerilya, yaitu melakukan aksi-aksi sabotase dan penghadangan atau pun penyerangan secara tiba-tiba terhadap pasukan Belanda dan kaki-tangannya pada setiap ada kesempatan. Bahkan sebagian rakyat lebih suka meninggalkan kampung halamannya dari pada harus menyerah kepada pasukan Belanda.³⁰

Sedangkan pasukan khusus Belanda yang tugaskan untuk mengejar dan menangkap Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri, terlibat pertempuran dengan laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae di daerah Cinennung pada 4 Agustus 1905. Sementara pertempuran sengit antara laskar Bone dengan pasukan Belanda berlangsung di daerah Cinennung, raja Bone bersama pengawal pribadinya meninggalkan daerah itu menuju ke Gottang. Laskar Bone yang dipimpin oleh Abdul Hamid, dengan semangat perjuangan yang pantang menyerah memberikan perlawanan sengit terhadap serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda, sehingga pertempuran berlangsung sampai sore hari. Namun pasukan Belanda pun berhasil memukul mundur laskar Bone sampai ke daerah Gottang.³¹

Setelah mereka tiba di daerah Gottang, Abdul Hamid Petta Ponggawae segera menemui raja Bone pada malamnya. Ketika

cit., hlm. 280; Amir, Muhammad, 2003, *op. cit.*, hlm. 100-101.

³⁰ Amir, Muhammad, 2003, *op. cit.*, hlm. 101; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 281.

³¹ Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 27-28; Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 34-35.

itu raja Bone menyampaikan kepada putranya, bahwa “janganlah menyesaliku, sebab aku tidak akan damai dengan Gubernur Jenderal Belanda serta orang-orang besar di Makassar” (*Bacok aja musessekak apak ia ri watakku tannginan kuisumpalak koro-neli bettaede na to marajana Juppandang*).³² Selanjutnya, Abdul Hamid menjawab perkataan raja Bone, sebagai berikut:

“Menurut saya biarlah segalanya habis atau hancur dalam membela dan mempertahankan tanah tumpa daraku. Sebab, masih banyak lagi pengganti-penggantiku yang membela kepentingan Bone – Palakka” (*Puang ia ri watakku tarosai maccappureng angkaukkeng ri manaku kupasilollonngi puang salareng mapperumaku apak engkatu selleku missenngi adecengenna to Bone to Palakkae*).³³

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap tegas dan semangat perjuangan kedua pimpinan utama laskar Bone dalam perlawanan menghadapi pasukan Belanda. Mereka rela mengorbankan segala-galanya dalam perjuangan demi untuk mempertahankan dan membela ke hormatan bangsa dan tanah airnya.

Kemudian, pada 5 Agustus 1905 pasukan Belanda melancarkan serangan ke daerah Gottang, sehingga terjadilah pertempuran dengan laskar Bone yang dipimpin oleh Abdul Hamid Petta Ponggawae. Pada pertempuran tersebut, salah seorang perwira dari laskar Bone yang bernama Senrima Daeng Mangatta ditangkap oleh pasukan Belanda. Oleh karena ia tidak mau menunjukkan tempat persembunyian raja Bone, sehingga ia ditawan kemudian dibawa ke Watampone dan selanjutnya diasingkan atau dibuang ke Pulau Jawa. Itulah sebabnya Abdul Hamid segera

³² Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 35; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 41.

³³ Salim, Muhammad, 1991, *op. cit.*, hlm. 154; Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 35; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 28.

memerintahkan pengawalan terhadap raja Bone ke tempat yang lebih aman dan menjauhi daerah pertempuran, yaitu ke Pegunungan Ponre. Pertempuran antara kedua belah pihak berkobar hingga siang hari. Namun pasukan Belanda berhasil mendesak laskar Bone, sehingga laskar Bone mengundurkan diri dan tercerai-berai di Pegunungan Gottang dan sebagian dipukul mundur sampai ke atas Pegunungan Ponre. Sejak itulah pasukan Belanda mulai kehilangan jejak mengenai keberadaan raja Bone bersama pengawalnya.³⁴

Ketika Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama pengawalnya sedang berada di Pegunungan Ponre, datanglah utusan dari Dulung Awang Tangka menyampaikan kepada raja Bone, tentang keberhasilan laskar Dulung Awang Tangka dalam penyerangan terhadap benteng pertahanan pasukan Belanda di Balangnipa (Sinjai). Dalam penyerangan itu, laskar Dulung Awang Tangka berhasil membunuh beberapa orang pasukan Belanda, termasuk seorang letnan serta berhasil pula merampas beberapa pucuk senjata. Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid sangat gembira mendengar kabar tersebut, tetapi tidak lama kemudian datanglah kurir menyampaikan bahwa pasukan Belanda sedang bergerak menuju Ponre. Abdul Hamid segera memerintahkan pengawalan terhadap raja Bone untuk menghindari dari tempat itu, sementara ia bersama laskarnya segera menyongsong pasukan Belanda. Namun sebelum pasukan Belanda tiba di tempat dimana Abdul Hamid bersama laskarnya melakukan penghadangan, pasukan Belanda telah terlibat pertempuran dengan laskar Bone lainnya, yaitu mereka yang belum berkumpul atau tidak bertemu dengan induk pasukan laskar Bone ketika

³⁴ Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 36; Ali. A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 28-29.

bercerai berai dalam pertempuran di Pegunungan Gottang. Oleh karena itu, pasukan Belanda semakin kehilangan jejak mengenai keberadaan raja Bone, sehingga usaha pasukan Belanda untuk menangkap raja Bone mengalami kegagalan. Sementara itu, raja Bone bersama pengawalnya, untuk sementara waktu dalam keadaan aman di Pegunungan Ponre dan terhindar dari pengejaran pasukan Belanda.³⁵

Kegagalan pasukan Belanda menangkap Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggawae, serta hilangnya jejak mereka berdua di Pegunungan Ponre, mendorong pimpinan pasukan Belanda mengambil keputusan untuk kembali ke Lalebbata-Watampone bersama semua pasukannya pada 6 Agustus 1905. ketika mereka sampai di Watampone, pimpinan pasukan ekspedisi militer Belanda Kolonel C.A. van Loenen mendapat berita dari Komandan Militer Daerah Makassar, bahwa beberapa hari yang lalu benteng pertahanan Belanda di Sinjai (Balangnipa) mendapat serangan dari laskar Bone. Selain itu, juga diberitahukan bahwa pos tentara Belanda di Camba terancam oleh serangan laskar Bone yang terdiri atas 2.000 orang dan yang memakai senjata api sejumlah kurang lebih 50 buah pucuk senapan. Lebih jauh Kolonel C.A. Loenen memperoleh berita, bahwa orang-orang Bone telah melakukan tindakan-tindakan untuk menghalang-halangi pasukan Belanda yang akan melayari Sungai Cenrana dengan jalan menghanyutkan batang-batang kayu di sungai itu serta mempersiapkan 80 buah meriam.³⁶

Patut dikemukakan bahwa Sungai Cenrana merupakan urat nadi perkonomian Kerajaan Bone bagian utara dan Kerajaan

³⁵ Arafah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 42-43; Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 39-40; Ali, Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 30-31.

³⁶ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 280; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 376.

Wajo pada khususnya. Di muara Sungai Cenrana inilah terdapat Pelabuhan Pallime, salah satu pelabuhan utama Kerajaan Bone yang dituntut oleh pemerintah Belanda, agar Bone melepaskan penguasaan atas pelabuhan tersebut. Itulah sebabnya setelah pasukan Belanda berhasil menguasai pertahanan laskar Bone di pesisir pantai Bajoe dan daerah sekitarnya serta Ibukota Kerajaan Bone – Watampone, sebagian pasukan angkatan laut Belanda bergerak ke arah utara untuk menguasai Pelabuhan Pallime dan menyusuri Sungai Cenrana. Meskipun mendapat perlawanan dari laskar Bone, pasukan angkatan laut Belanda berhasil menguasai Pelabuhan Pallime. Namun ketika pasukan Belanda berusaha menyusuri Sungai Cenrana, mereka mendapat perlawanan sengit dari laskar Bone. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melanjutkan operasi militernya di sepanjang sungai itu dan terpaksa kembali Pelabuhan Pallime.³⁷

Sehubungan dengan berita-berita tersebut di atas, maka pimpinan pasukan ekspedisi militer Belanda Kolonel C. A. van Loenen, memerintahkan kepada bawahannya berangkat dengan segera ke Balangnipa pada 7 Agustus 1905, untuk mengecek atau memeriksa kebenaran tentang penyerangan laskar Bone terhadap benteng pertahanan Belanda di Balannipa beberapa hari yang lalu. Utusan itu kembali ke Watampone pada 8 Agustus 1905, dengan membawa berita bahwa rakyat di Bone Selatan pada umumnya tidak lagi menghendaki perlawanan terhadap Belanda. Hanya beberapa orang terkemuka saja, di antaranya La Temmu Page Arung Labuaja bersama pengikut-pengikutnya, yang tetap hendak melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu, pimpinan pasukan ekspedisi militer Belanda Kolonel C. A.

³⁷ Amir, Muhammad, 2003, *op. cit.*, hlm. 104; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 376-377; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 281.

van Loenen, memerintahkan kepada Mayor de Wijs bersama satu kompi tentara Belanda, supaya segera berangkat ke Balangnipa (Sinjai) untuk mengadakan operasi militer di daerah Bone Selatan dan Sinjai.³⁸

Sedangkan pasukan khusus Belanda yang bertugas mengejar dan menangkap Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggawae, terus pula berusaha mencari keterangan mengenai tempat kedua pimpinan rakyat Bone itu berada. Hampir setiap hari usaha pencarian dan pengejaran yang dilakukan oleh pasukan Belanda terhadap raja Bone dan Petta Ponggawae, sejak mereka kehilangan jejak pada pertempuran di Pegunungan Ponre, tetapi selalu mengalami kegagalan. Bahkan beberapa kali pasukan khusus Belanda itu, menderita kerugian akibat tindakan rakyat yang memperdayai mereka dengan menunjukkan sembarangan tempat yang menurutnya kedua pimpinan itu berada. Oleh karena itu, pasukan Belanda terpaksa mempergunakan petunjuk jalan yang diikat dengan tali dan diikuti dalam rombongannya.³⁹

Sikap dan tindakan itu menunjukkan bahwa rakyat Bone turut mendukung rajanya dalam perjuangan melawan pasukan Belanda atau agar tetap tidak mengakui kekuasaan pemerintah Belanda. Itulah sebabnya rakyat senantiasa memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, agar menyulitkan pasukan Belanda dalam menemukan tempat persembunyian rajanya. Atau sekurang-kurangnya dapat mengalihkan perhatian pasukan Belanda ke tempat lain, agar raja Bone beserta pengikut-pengikutnya tetap dalam keadaan aman atau pun agar mereka dapat dengan leluasa

³⁸ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 377; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 281.

³⁹ Ali, A. Muh. Ali., 1986. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Damai, hlm. 67; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 282.

mengungsikan diri ke luar dari tempat persembunyian mereka menuju ke tempat yang lebih aman.

Sementara di daerah Bone Selatan dan Sinjai, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor de Wijs, yang diperintahkan ke daerah-daerah itu untuk mengadakan operasi militer, mulai melaksanakan operasi militernya pada 9 Agustus 1905. Operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan Belanda itu, mendapat perlawanan dari laskar Bone di bawah pimpinan, antara lain Ambo Geppa Dulung Awang Tangka dan La Temmu Page Arung Labuaja, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, dalam perkembangannya beberapa pimpinan terkemuka di Bone Selatan, terpaksa harus mengakui keunggulan pasukan Belanda yang mempunyai persenjataan yang lebih baik dan menyerah kepada pasukan Belanda, yaitu antara lain Dulung Awang Tangka, Arung Kahu, Arung Patimpeng, dan Arung Tonra. Sedangkan La Temmu Page Arung Labuaja bersama laskarnya yang tidak sudi menyerah kepada pasukan Belanda, terus mengadakan gerakan perlawanan dengan melakukan perang gerilya di Bone Selatan dan daerah Sinjai yang berlangsung hingga beberapa tahun kemudian. Itulah sebabnya pemerintah membentuk pemerintahan sipil militer *Onderafdeling* Bone Selatan. Pada mulanya pusat *Onderafdeling* ini ditempatkan di Bellu (daerah Kahu), dengan tugas antara lain menyelesaikan perlawanan rakyat di daerah Awang Tangka atau Bone Selatan yang masih terus bergolak dan mengadakan gerakan perlawanan menentang pemerintah Belanda.⁴⁰

Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggawae beserta laskarnya berhasil meloloskan diri dari

⁴⁰ Friedericy, H. J., 1991. *Sang Jenderal*. Jakarta: Grafiti Press, hlm. 179; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 282-283; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 110; Ali, A. Muh., 1986, *op. cit.*, hlm. 67-68.

kejarian pasukan Belanda di Pegunungan Ponre. Setelah tinggal selama beberapa hari di daerah tersebut, mereka meninggalkan pegunungan itu menuju ke Lamuru, untuk melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Dalam perjalanan panjang ke utara itu, mereka bukan hanya keluar masuk hutan dan naik-turun gunung, tetapi juga harus melintasi lembah dan padang yang luas selama beberapa hari hingga mereka tiba di Lamuru yang berbatasan dengan Soppeng. Daerah Lamuru merupakan salah satu pusat pertahanan Bone yang dikenal dengan Dulung Lamuru dan bertanggung jawab atas wilayah pertahanan Bone bagian barat, dijadikan sebagai tempat konsolidasi bagi laskar Bone. Ketika raja Bone dan Abdul Hamid beserta laskarnya berada di Lamuru, mereka memperoleh berita yang dapat dipercaya dari Watampone, bahwa pasukan Belanda telah menguasai dan menduduki beberapa daerah di Bone bagian utara, Bone bagian tengah, dan telah merembes ke Bone bagian barat. Hanya Bone bagian selatan atau daerah Dulung Awang Tangka, yang masih terjadi perlawanan setempat dengan menggunakan taktik perang gerilya di daerah-daerah pegunungan dari Mare ke selatan hingga daerah Sinjai.⁴¹

Selain itu, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri juga memperoleh berita yang pasti, bahwa *Tomarilaleng*, anggota dewan *Ade Pitu*, dan *Petta Anregurunna AnakarungE*, serta beberapa pembesar kerajaan lainnya, telah berhasil ditangkap atau menyerah kepada pasukan Belanda. Bahkan benda-benda kebesaran (*arajang*) Kerajaan Bone sudah jatuh ke tangan pimpinan pasukan Belanda. Oleh karena itu, raja Bone dan Abdul Hamid beserta pemimpin-pemimpin Kerajaan Bone lainnya, memutuskan bahwa untuk melanjutkan perjuangan dalam menentang kekuasaan

⁴¹ Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 31; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 43.

pemerintah Belanda, mereka terpaksa harus ke luar dari daerah atau wilayah kekuasaan Bone, karena keadaan di dalam negerinya sudah semakin sulit. Keputusan itu, juga dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerjasama atau melibatkan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi-Selatan yang anti penjajahan dalam menentang pemerintah Belanda.⁴² Itulah sebabnya ketika utusan Datu Soppeng datang menawarkan bantuan, baik berupa bantuan pasukan dan perbekalan, maupun berupa jaminan pengamanan dan perlindungan serta undangan beristirahat di daerah Soppeng kepada raja Bone bersama laskarnya, mereka tidak menolaknya dan memilih daerah Citta untuk beristirahat.

Setelah Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama pengawalnya atau laskarnya, beristirahat di Citta selama tiga hari dengan mendapat bantuan pengamanan dari pemerintah Kerajaan Soppeng, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke utara dengan tujuan Pegunungan Awo (Tanah Toraja). Namun sebelum mereka sampai di tempat tujuan, raja Bone bersama laskarnya terlebih dahulu melalui beberapa daerah dan harus pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain di wilayah kekuasaan Wajo, yaitu antara lain Wage, Tempe, dan Impakimpa. Ketika mereka tiba di daerah Impakimpa, Ranreng Tua Wajo menawarkan kepada raja Bone, agar berkenan tinggal di daerah Wajo dan apabila pasukan Belanda datang menyerang, maka pasukan Wajo yang akan tampil untuk menghadapi hingga tetesan darah yang terakhir.⁴³

⁴² Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 283; Ernawati, 1997, *op. cit.*, hlm. 93; Amir, Muhammad, 2003, *op. cit.*, hlm. 107.

⁴³ Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Sullewatan Impakimpa gugur dalam pertempuran dengan pasukan Belanda di daerah Lona, sebelah timur Cellu pada tanggal 28 Juli 1905. Hal ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya hubungan kerjasama atau kekeluargaan antara Bone dengan Impakimpa pada khususnya dan Wajo pada umumnya. Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 31 dan 41; Ernawati, 1997, *op. cit.*, hlm. 94.

Dalam perkembangan selanjutnya, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama pengawalnya melanjutkan perjalanan, setelah beristirahat selama beberapa hari di daerah Impakimpa. Mereka bertolak dari Impakimpa menuju ke utara dengan melalui daerah Pajalele, Ujung, dan selanjutnya sampai di daerah Lowa. Ketika mereka berada di daerah Lowa, utusan Cakkuridi Wajo datang menemui dan bersedia memberikan bantuan kepada raja Bone dalam meneruskan perjuangan menentang atau melawan pasukan Belanda. Bahkan Cakkuridi Wajo menawarkan mereka untuk beristirahat di istananya di Lowa.⁴⁴

Gambaran itu menunjukkan bahwa ada jalinan kerjasama antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Soppeng dan Wajo dalam perjuangan menentang kekuasaan pemerintah Belanda. Jalinan kerjasama itu, bukan hanya baru tampak setelah raja Bone bersama pengawalnya meninggalkan wilayah kekuasaan Bone dalam melanjutkan perjuangan melawan pasukan Belanda, dengan melalui perang gerilya di wilayah kekuasaan Soppeng dan Wajo. Akan tetapi jalinan kerjasama itu, telah tampak ketika pasukan Belanda melancarkan serangan secara besar-besaran terhadap laskar Bone di pantai BajoE dan sekitarnya pada 27 dan 28 Juli 1905. Buktinya, yaitu dengan gugurnya Sullewatang Impakimpa (dari Wajo), salah seorang pimpinan pasukan di pihak laskar Bone pada pertempuran sengit di pantai BajoE dan daerah sekitarnya. Selain itu, laskar Wajo di bawah pimpinan Arung Bola La Makkaraka juga telah aktif membantu laskar Bone dalam perlawanan terhadap pasukan Belanda di Pallime dan Sungai Cenrana.⁴⁵

⁴⁴ Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 33-34; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 108; Amir, Muhammad, 2003, *op. cit.*, hlm. 107-108.

⁴⁵ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 283; Amir, Muhammad, 2003,

Sementara di lain pihak, pimpinan pasukan ekspedisi militer Belanda C. A. van Loenen, telah memperoleh informasi yang pasti bahwa raja Bone dan panglima perangnya bersama laskarnya, sudah keluar dari wilayah kekuasaan Bone dan sedang berada di daerah Wajo. Oleh karena itu, pimpinan pasukan Belanda menganggap sangat perlu memindahkan pangkalan operasi militernya dari Watampone ke Pompanua (Bone bagian utara). Sebab, letaknya sangat strategis dalam operasi militer selanjutnya yang telah dicanangkan. Selain untuk mengejar dan menangkap raja Bone bersama panglima perangnya, juga untuk menduduki daerah-daerah di wilayah Bone bagian utara yang masih bergolak. Di samping itu, juga untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di daerah Sulawesi Selatan, terutama yang telah aktif membantu perlawanan laskar Bone terhadap pasukan Belanda, yaitu Wajo, Sidenreng, Soppeng, dan Luwu.⁴⁶

Sehubungan dengan itu, maka pimpinan pasukan ekspedisi militer Belanda Kolonel C. A. van Loenen memindahkan pusat komando operasinya militernya ke Pompanua pada 24 Agustus 1905. Sejak itu, pasukan Belanda mulai melancarkan gerakan operasi militernya di daerah Wajo. Selain dimaksudkan untuk menaklukkan Wajo, juga bertujuan untuk mengejar dan menangkap raja Bone bersama panglima perangnya. Tidak lama kemudian, pimpinan pasukan Belanda memperoleh berita yang pasti, bahwa Raja Bone La Pawaoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggowae beserta laskarnya, berada di daerah Pitumpanua (Wajo). Oleh karena itu, pimpinan pasukan Belanda segera memerintahkan atau mengerahkan pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten "Marchaussee" March Stipriaan Luisius,

op. cit., hlm. 108.

⁴⁶ Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 378; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 283284.

supaya berangkat ke Pitumpanua pada awal September 1905, untuk mengejar dan menangkap raja Bone bersama panglima perangnya.⁴⁷

Gugurnya Abdul Hamid Petta Ponggawae

Setelah Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama laskarnya berada di daerah Wajo selama kurang lebih satu bulan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tibalah berita bahwa pasukan Belanda akan melakukan operasi militer di daerah Wajo. Oleh karena itu, maka Abdul Hamid Petta Ponggawae, segera memerintahkan sebahagian laskarnya untuk mengawal raja Bone bersama Arung Awo meninggalkan daerah Wajo menuju ke Pegunungan Awo. Sedangkan Abdul Hamid bersama sisa laskarnya, sengaja masih tinggal untuk menghalang-halangi pengejaran pasukan Belanda. Kedatangan pasukan Belanda di daerah Wajo mendapat perlawanan sengit dari laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid yang dibantu oleh laskar Wajo dan Soppeng. Namun pada pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan gabungan pasukan (laskar Bone, Wajo, dan Soppeng) di daerah Pitumpanua dan daerah sekitarnya, pasukan Belanda yang memiliki persenjataan lebih baik berhasil mengalahkan gabungan pasukan itu.⁴⁸

Kekalahan itu memaksa laskar Bone mengundurkan diri ke wilayah Sidenreng. Sementara pasukan Belanda tetap pula

⁴⁷ Patang, Lahadjji, 1976, *op. cit.*, hlm. 24-26; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1983. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hlm. 111; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 378-379.

⁴⁸ Untuk kesekian kalinya laskar Bone meskipun mendapat bantuan dari pasukan Kerajaan Wajo, Soppeng, dan Sidenreng ketika itu, namun harus mengakui keunggulan lawan mereka (pasukan Belanda). Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 108-109; Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 43; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 34; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 379.

melakukan pengejaran terhadap laskar Bone. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua belah pihak itu bertemu di daerah Pitu Riase (Sidenreng), sehingga terjadilah pertempuran antara laskar Bone dengan pasukan Belanda di daerah tersebut. Walaupun laskar Bone yang dibantu oleh rakyat Sidenreng, memberikan perlawanan sengit pada pertempuran itu, tetapi pasukan Belandalah yang keluar sebagai pemenang dan berhasil memukul mundur laskar Bone. Atas peristiwa itu, laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid mengundurkan diri ke Pegunungan Awo. Dalam pengunduran diri itu, sebagian laskar Bone ditinggalkan pada tempat-tempat yang dilalui oleh Abdul Hamid, untuk menahan laju pengejaran atau menghalang-halangi pasukan Belanda, sehingga terjadilah pertempuran kecil-kecilan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia di kedua belah pihak.⁴⁹

Beberapa hari kemudian, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama pengawalnya tiba di Pegunungan Awo. Demikian pula Abdul Hamid Petta Ponggawae beserta laskarnya, setelah beberapa kali terlibat pertempuran dengan pasukan Belanda, mereka berhasil menyusul dan sampai pula ke Pegunungan Awo. Di daerah inilah raja Bone dan *petta ponggawae* bersama sisa-sisa laskar Bone, mengadakan persiapan-persiapan dalam rangka melanjutkan perjuangan melawan pasukan Belanda. Kurang lebih satu bulan setelah mereka berada di Pegunungan Awo, datanglah utusan dari *addatuang* (raja) Sidenreng yang diwakili oleh putranya, yaitu *arung malolo* selaku panglima perang Kerajaan Sidenreng. Utusan itu menyampaikan salam dan harapan dari *adattuang* Sidenreng kepada raja Bone dan *petta ponggawae*, agar jangan dulu melakukan perlawanan sebelum *adattu-*

⁴⁹ Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 284; Mattulada, 1998, *op. cit.*, hlm. 380.

ang Sidenreng bersama pasukannya datang untuk bersama-sama menghadapi pasukan Belanda.⁵⁰

Harapan dari *adattuang* Sidenreng tersebut, tampaknya tidak dapat dipenuhi oleh raja Bone dan *petta ponggawae*. Sebab, sebelum *adattuang* Sidenreng bersama laskarnya sampai di Pegunungan Awo, ternyata pasukan Belanda telah mengepung tempat itu, sehingga pertempuran antara laskar Bone dengan pasukan Belanda sudah tidak dapat lagi dihindari. Pasukan Belanda yang cukup besar jumlahnya di bawah pimpinan Mayor der Infanterie van Bennekom, dan dibantu satu kompi pasukan khusus (*marchaussee*) yang dipimpin oleh Kapten March Stiprian Luis-cius, yang melakukan pengepungan terhadap posisi raja Bone dan *petta ponggawae* bersama laskar Bone di Pegunungan Awo, mulai melancarkan serangan pada pertengahan November 1905. Serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda itu, mendapat perlawanan dari laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae, sehingga mulai saat itu terjadilah tembak menembak antara kedua belah pihak di kaki Pegunungan Awo.⁵¹

Ketika pertempuran antara laskar Bone dengan pasukan Belanda mulai berkobar di kaki Pegunungan Awo, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri meminta pertimbangan kepada panglima perangnya (*petta ponggawae*) Abdul Hamid, tentang pengepungan pasukan Belanda dan mulainya berkobar pertempuran antara kedua belah pihak di kaki Pegunungan Awo tersebut. Kemudian, Abdul Hamid Petta Ponggawae menjawab dengan menyatakan, sebagai berikut:

⁵⁰ Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 43; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 109; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 35.

⁵¹ (Lahadjji Patang : 1976, 26; Lihat, Muhammad Abduh : 1985, 109 : Lihat, Abd. Razak : 1983, 111).

“Bahwa menurut pertimbangan dan pendapatku sebaiknyalah kita bertahan mati-matian atau habis-habisan di tempat ini untuk menyelesaikan perang serta menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Sebab walaupun kita menyingkir sampai ke ujung langit, tak henti-hentinya kita diikuti oleh pasukan Belanda..... Biarlah mereka datang, saya akan menghadapi langsung untuk mempertahankan serta menjunjung tinggi kehormatan rakyat serta Raja Bone, ataukah saya menumpahkan darah yang akan membasahi Gunung Awo”.⁵²

Sikap tegas dan pertimbangan yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Petta Ponggowae tersebut, ternyata disetujui pula oleh Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri. Oleh karena itu, maka *petta ponggowae* segera memerintahkan kepada pemimpin-pemimpin laskarnya untuk terus mengobarkan pertempuran hingga tetes darah yang terakhir. Pertempuran antara laskar Bone dengan pasukan Belanda di kaki Pegunungan Awo semakin sengit dan korban pun sudah mulai berguguran. Sebab, laskar Bone memberikan perlawanan mati-matian dalam menahan lajunya gempuran pasukan Belanda yang bertekad naik ke puncak yang merupakan tempat raja Bone dan pengawalnya berada. Walaupun demikian, pasukan Belanda berlahan-lahan dapat mengurung atau mengepung rapat tempat itu dan semakin mendekati pertahanan laskar Bone di pegunungan itu. Pertempuran sengit antara laskar Bone dengan pasukan Belanda selama beberapa hari tersebut, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia yang tidak sedikit di kedua belah pihak.⁵³

⁵² Arung Manajeng, Andi Malla, 1967, *op. cit.*, hlm. 43; Salim, Muhammad, 1991, *op. cit.*, hlm. 200.

⁵³ Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 36; Patang, Lahadjdji, 1976. *Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya*. Jakarta: Yayasan Kecerdasan Generasi Muda Indonesia (YKGMI), hlm. 26.

Kemudian, pada 18 November 1905, sekitar jam 05. 00 pagi (waktu subuh), pasukan Belanda yang telah mengepung posisi raja Bone bersama laskarnya di Pegunungan Awo, melancarkan serangan secara besar-besaran yang serentak. Serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda itu, mendapat perlawanan dari laskar Bone, sehingga terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Sementara perang berkobar dengan seruhnya di kaki dan lereng Pegunungan Awo, tiba-tiba kompi pasukan khusus yang dipimpin oleh Letnan March Eulers berhasil menyelinap dan melepaskan diri dari arena pertempuran di lereng pegunungan, lalu mendekati tempat persembunyian raja Bone dan pengawal-nya. Pasukan pengawal yang berada di sekitar tempat raja Bone segera mengetahui dan langsung melepaskan tembakan ke arah datangnya musuh. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua belah pihak yang tidak kalah seruhnya dengan pertempuran di kaki dan lereng Pegunungan Awo. Laskar Bone yang jumlahnya semakin berkurang terpaksa terbagi lagi. Oleh karena sebagian berusaha menghalangi pasukan Belanda yang ada di lereng pegunungan untuk naik ke atas, dan sebagian yang lainnya mengadakan perlawanan di sekitar tempat raja Bone berada.⁵⁴

Dalam situasi yang semakin kritis dan semakin terkepung oleh pasukan Belanda, Abdul Hamid Petta Ponggowae bersama sisa-sisa laskarnya terus mengobarkan perlawanan dan melakukan pertempuran habis-habisan. Dengan memegang keris sakti yang disebut "Raja Bagus" di tangan kanan dan memegang tombak yang disebut "Bolong Kahu" di tangan kirinya, Abdul Hamid mengamuk laksana kerbau liar, sehingga beberapa orang pasukan Belanda telah berhasil dilukainya. Sambil melakukan

⁵⁴ Patang, Lahadjdji, 1976, *op. cit.*, hlm. 26-27; Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 36-39; Kielstra, 1910, *op. cit.*, hlm. 210.

pertarungan mati-matian, Abdul Hamid memerintahkan kepada wanita-wanita yang menyertainya dalam pengungsian yang ada di sekitarnya, termasuk istri dan seorang sepupunya untuk menyingkir bersama raja Bone dari arena pertempuran. Namun sang istri dan wanita-wanita pengiringnya enggan meninggalkan tempat itu. Pada penghujung pertempuran sengit itu, sebutir peluru musuh (pasukan Belanda) berhasil mengenai tubuh Abdul Hamid Petta Ponggowae dan ia pun rebah di atas tanah. Melihat kejadian itu, istri Abdul Hamid Petta Ponggowae yang bernama We Cenra Datu Cinnong segera berlari menghampirinya dan tidak lama kemudian Abdul Hamid pun menghembuskan nafas terakhir kembali kehadirat Allah SWT di pangkuan istrinya. Ia gugur di medan pertempuran dalam membela kehormatan bangsa dan tanah airnya di Pegunungan Awo pada 18 November 1905.⁵⁵

Pada pertempuran sengit di Pegunungan Awo tersebut, Abdul Hamid Petta Ponggowae gugur sebagai kusuma bangsa bersama dengan 25 orang pengawalanya. Mereka itu antara lain Senrima Daeng Malinta, Senrima Daeng Mallongi, Senrima Daeng Mamile, Senrima Daeng Mattengnga, dan Senrima Daeng Palawa. Para pejuang itu gugur dalam membela dan mempertahankan kehormatan bangsa dan tanah airnya. Sekitar seratus meter dari tempat peristiwa itu, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri menunggu seorang diri dalam tandu, karena semua pengusung-pengusungnya telah disuruh pergi untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba tanduhnya telah dikepung oleh pasukan Belanda dan pada saat itu pula Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri ditangkap oleh pasukan Belanda. Ketika raja Bone bersama komandan pasukan Belanda mendarat atau mendekati jenazah

⁵⁵ Arfah, Muhammad, 1977, *op. cit.*, hlm. 45; Patang, Lahadjdji, 1976, *op. cit.*, hlm. 27; Ali, A Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 39; Daeng Patunru., Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 285; Mattulada, 1989, *op. cit.*, hlm. 379.

Abdul Hamid Petta Ponggowae di pangkuan istrinya (We Cenra Datu Cinnong), terjadi suatu hal diluar dugaan. Yaitu, seorang serdadu Belanda dengan pedang terhunus mendekati jenazah Abdul Hamid untuk memenggal kepala atau memisahkan kepala dari tubuhnya. Pada saat itu We Cenra Datu Cinnong sebagai seorang srikandi Kerajaan Bone, tidak membiarkan tindakan itu dilakukan. Dengan keris di tangan yang telah keluar dari sarungnya, ia mengacungkan kepada serdadu Belanda itu, sambil berkata “urusanmu dengan *petta ponggowae* telah selesai, tetapi kalau engaku mau berurusan dengan seorang wanita, maka langkah kakiku selangkah lagi”. Sikap kepahlawanan yang ditunjukkan We Cenra Datu Cinnong itu, mendorong komandan pasukan Belanda memerintahkan kepada bawahannya untuk kembali ke tempat semula.⁵⁶

Setelah pemakaman jenazah Abdul Hamid Petta Ponggowae yang dilaksanakan secara sederhana di Pegunungan Awo pada hari itu,⁵⁷ maka Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama tawanan lainnya dibawa melalui Rappang menuju Parepare. Selanjutnya mereka dibawa dari Parepare ke Makassar dengan menggunakan kapal H. M. Asahan, dan mereka tiba di Makassar pada 29 November 1905. Dalam perkembangannya, dengan alasan demi “keamanan dan ketertiban”, Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri ditawan dan selanjutnya diasingkan ke Bandung pada 14 Desember 1905.⁵⁸ Ketika hendak diasingkan ke Bandung,

⁵⁶ Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 41; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 285-286.

⁵⁷ Berdasarkan permintaan dari sanak keluarganya, beberapa bulan kemudian jenazah Abdul Hamid Petta Ponggowae di Pegunungan Awo dipindahkan ke Bone, dan dimakamkan di Matuju salah satu tempat pemakaman Raja-Raja Bone (Ernawati, 1997, *op. cit.*, hlm. 100).

⁵⁸ Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri diasingkan ke Bandung pada tanggal 14 Desember 1905, dan meninggal dalam pengasingan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 11 Januari 1911. Ia dimakamkan di Pemakaman Mangga Dua Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1974, jenazahnya dipindahkan dan dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan

Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri berikrar, sebagai berikut :

"Mauka teppa ri saliweg langi' rekkuwa tellesang muwi ada assituruseng kittari paturungengngengngi Nabi Muhammad, apa ia ri watakku mangolo sia tubukku temmangngola atikku ri BalandaE".

Artinya:

"Walaupun aku akan terdampar di luar bumi sekalipun, asalkan saya tidak mengingkari kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebab bagi saya hanya tubuhku yang menghadap atau tertawan, tetapi hatiku tidak menghadap kepada Belanda atau pantang bersua dengan Belanda".⁵⁹

Dengan gugurnya Abdul Hamid Petta Ponggawae serta ditangkap dan tertawannya Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri, maka semangat perlawanan rakyat dan sisa-sisa laskar Bone semakin merosot. Meskipun demikian, laskar Bone di bawah pimpinan La Temmu Page Arung Labuaja tetap melanjutkan perlawanan melalui perang gerilya di daerah Bone Selatan. Namun dengan dilakukannya patroli secara terus menerus oleh pasukan Belanda, di samping adanya usaha-usaha pendekatan terhadap keluarga dari pihak pejuang atau "pemberontak" yang belum mau tunduk kepada pemerintah Belanda, agar dapat mempengaruhi keluarganya untuk menghentikan perlawanannya kepada pemerintah Belanda. Oleh karena itu, satu demi satu pimpinan laskar Bone akhirnya juga menyerah kepada pemerintah Belanda pada 1908.⁶⁰ Dengan berakhirnya perlawanan rakyat atau laskar Bone di daerah Bone Selatan, maka seluruh wilayah kekuasaan Kera-

Kalibata, Jakarta (Hamzah, Aminah P., 1993, *op. cit.*, hlm. 82); Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 109; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 285.

⁵⁹ Ali, A. Muh., 1984, *op. cit.*, hlm. 4 ; Abduh, Muhammad, 1985, *op. cit.*, hlm. 110.

⁶⁰ Arsip Bone, No, 5/2. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan..

jaan Bone jatuh di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atau menjadi daerah jajahan pemerintah Belanda.

Seiring dengan jatuhnya Kerajaan Bone di bawah kekuasaan pemerintah Belanda, maka pemerintah Kerajaan Bone termasuk dewan *Ade Pitu* dihapuskan atau dibekukan oleh pemerintah Belanda. Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh pemerintahan sipil-militer dan pembantu-pembantunya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Bone dibagi menjadi tiga *Onder Afdeling*, yaitu *Onder Afdeling* Bone Utara meliputi wilayah bagian utara bekas Kerajaan Bone dengan pusat pemerintahannya di Pompanua, *Onder Afdeling* Bone Tengah meliputi wilayah bagian tengah bekas Kerajaan Bone dengan pusat pemerintahannya di Watampone, dan *Onder Afdeling* Bone Selatan meliputi wilayah bagian selatan Kerajaan Bone dengan pusat pemerintahannya pertama-tama di Bellu (Kahu), lalu dipindahkan ke Masumpu, dan terakhir di Kadai-Mare. Ketiga *Onder Afdeling* tersebut, masing-masing diperintah oleh seorang *controleur*. Dalam perkembangan kemudian, ketiga *Onder Afdeling* itu dilebur menjadi satu *Onder Afdeling* yang disebut dengan *Onder Afdeling* Bone pada 19 Juni 1922, dengan pusat pemerintahannya di Watampone.⁶¹

Selain akibat yang ditimbulkan terhadap Kerajaan Bone tersebut, perlawanan Bone terhadap pendudukan militer Belanda, juga telah menimbulkan akibat terhadap kerajaan-kerajaan lain di daerah Sulawesi Selatan. Sebab, ketika perlawanan Bone terhadap pendudukan militer Belanda bergolak, Kerajaan Gowa, Wajo, Soppeng, dan Sidenreng ikut terlibat menentang Belanda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat pula

⁶¹ Kadir, Harun, 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud, hlm. 72-73; Daeng Patunru, Abd. Razak, 1989, *op. cit.*, hlm. 286-287; Harun, Kadir, 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Unhas, hlm. 54.

bermakna bahwa telah tumbuhnya benih-benih persatuan dan kesatuan di antara kerajaan-kerajaan itu untuk menentang kekuasaan pemerintah Belanda. Adapun keterlibatan kerajaan-kerajaan tersebut, ialah ikut membantu baik berupa bantuan pasukan dan perbekalan, maupun bantuan berupa perlindungan, pengamanan, dan lintas batas kepada Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri dan Abdul Hamid Petta Ponggwae bersama laskarnya dalam perjuangan menentang kekuasaan pemerintah Belanda. Salah satu akibat dari keterlibatan kerajaan-kerajaan tersebut, ialah menjadi sasaran penaklukan atau serangan pasukan ekspedisi militer Belanda berikutnya. Meskipun pada awalnya kerajaan-kerajaan itu melakukan perlawanan, tetapi pada akhirnya satu demi satu kerajaan-kerajaan itu harus mengakui keunggulan lawan yang mempunyai persenjataan yang lebih baik. Kerajaan-kerajaan itu pun harus tunduk di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda atau dengan kata lain menjadi daerah jajahan Belanda.

Di samping itu, tentu pula tidak dapat disangkal telah menimbulkan akibat jatuhnya korban yang tidak sedikit, baik itu dalam bentuk korban harta benda, maupun dalam bentuk korban jiwa manusia. Tercatat sekitar 100 orang dari kalangan bangsawan tinggi Bone dari kurang lebih 1000 orang orang laskar Bone yang gugur sebagai kusuma bangsa di medan juang. Termasuk Abdul Hamid Petta Ponggwae sendiri yang telah mengantarkan kepergiannya untuk selama-lamanya. Juga Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri, harus menerima akibat perjuangannya melawan pasukan Belanda, sebagai tawanan perang di tempat pembuangan atau pengasingan yang menyengsarakan dan tidak menyenangkan sampai akhir hayatnya. Korban yang jatuh itu, baik berupa harta benda, apalagi korban jiwa manusia, tentu saja memberikan akibat yang memedihkan dan memilukan.

Tidak sedikit wanita yang menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim, bahkan yatim piatu karena ditinggalkan oleh suami atau ayah mereka yang meninggal atau gugur di dalam peperangan. Juga tidak sedikit yang menjadi cacat seumur hidup, dan atau harus merasakan kehidupan yang menyengsarakan dan tidak menyenangkan di dalam penjara, dan di tempat pengasingan atau pembuangan, sebagai akibat dari perjuangan mereka dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda, atau demi untuk membela martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Walaupun demikian, perlawanan Bone terhadap penduduk militer Belanda ketika itu, mempunyai makna tersendiri dalam sejarah perjuangan bangsa melawan pemerintahan Belanda. Oleh karena, laskar Bone bukan hanya telah melakukan perlawanan dengan semangat perjuangan yang pantang menyerah hingga tetesan darah yang terakhir dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Akan tetapi juga membuktikan kepada pemerintah Belanda, bahwa setiap jengkal tanah yang berhasil direbutnya, selalu dipertahankan secara habis-habisan atau mati-matian oleh rakyat dan laskar Bone di bawah pemimpin-pemimpinnya. Maknanya bahwa rakyat Bone di bawah pimpinan raja-raja bersama pemimpin-pemimpinnya, tidak akan tunduk sepenuhnya untuk diperintah seenaknya oleh pemerintah Belanda, tanpa melakukan perlawanan terhadapnya, sekalipun harus mengorbankan segala-galanya, demi perjuangan membela dan mempertahankan kedaulatan serta kehormatan bangsa dan tanah airnya.

KESIMPULAN



Abdul Hamid adalah putra Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri dari hasil perkawinannya dengan I Karimbo Daeng Tamene, putri Arung Mengempang (Barru). Kedua orang tuanya merupakan bangsawan tinggi yang dapat diangkat menjadi raja pada sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Abdul Hamid sebagai *anak pattola* (putra mahkota) bukan hanya dapat diangkat menjadi *mangkau* (raja) di Kerajaan Bone, tetapi juga sebagai *arung* (raja) di Kerajaan Barru. Sebelum Abdul Hamid diangkat menjadi panglima perang (*pongawae*) Kerajaan Bone pada 1896, ia telah memegang beberapa jabatan penting dalam pemerintahan Kerajaan Bone, seperti Arung Lita, Arung Palakka, dan Arung Macege. Ketika Abdul Hamid memegang jabatan sebagai *pongawae* Kerajaan Bone, terjadi perang antara Bone dengan Belanda pada 1905. Dalam perang itulah, Abdul Hamid memegang peranan yang amat penting karena merupakan pimpinan tertinggi dalam angkatan perang Bone.

Perlawanan Abdul Hamid Petta Pongawae dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda, dilatari oleh akumulasi dari pertentangan-pertentangan antara Bone dengan Belanda. Benih-benih pertentangan antara kedua belah pihak semakin memuncak ketika Belanda mengajukan tuntutan kepada Bone, agar menyerahkan penguasaan pelabuhan BajoE dan Pallime. Oleh karena kedua pelabuhan itu merupakan sumber penghasilan yang pen-

ting bagi Bone, sehingga tuntutan Belanda itu tidak dapat dipenuhi dan ditolak dengan tegas. Pertentangan antara kedua belah pihak, mencapai puncaknya ketika pemerintah Belanda bermaksud untuk menguasai secara langsung Bone. Maksud pemerintah Belanda itu ditandai dengan diajukannya suatu tuntutan kepada Bone, agar tunduk, taat, dan patuh sepenuhnya kepada Belanda dengan menandatangani pernyataan pendek (*korte verklaring*). Tuntutan pemerintah Belanda itu pun ditolak dengan tegas oleh Bone. Bahkan tuntutan itu disambut dengan persiapan-persiapan dalam rangka menghadapi serangan pasukan Belanda.

Penolakan Bone terhadap tuntutan tersebut, mendorong pemerintah Belanda segera memerintahkan pasukan militernya di bawah pimpinan Kolonel Infanteri C.A. van Loenen untuk melakukan pendaratan dalam rangka menaklukkan Bone. Pendaratan pasukan Belanda di Ujung Pattiro, BajoE, dan Pallime memicu terjadinya konflik terbuka berupa perang antara kedua belah pihak. Berkat dukungan penuh dari rakyat Bone, Abdul Hamid Petta Ponggowae bersama para pemimpin lainnya, tampil ke depan untuk memimpin laskar Bone dalam melakukan perlawanan terhadap serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda. Dengan semangat perlawanan yang pantang menyerah, mereka bahu membahu dengan rakyat yang dipimpinnya melakukan perlawanan habis-habisan hingga tetesan darah yang terakhir, demi membela dan mempertahankan martabat serta kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Meskipun Abdul Hamid Petta Ponggowae bersama laskar Bone memberikan perlawanan sengit terhadap serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda, namun pertahanan laskar Bone di Ujung Pattiro berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada 21 Juli 1905. Demikian pula pertahanan laskar Bone di pantai BajoE

dan daerah sekitarnya, berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada 28 Juli 1905, setelah kurang lebih seminggu kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang sengit. Oleh karena setiap jengkal tanah yang berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda selalu dipertahankan dengan mati-matian oleh laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae. Namun dalam pertempuran sengit untuk mempertahankan Lalebbata – Watampone, Abdul Hamid Petta Ponggawae bersama laskar Bone juga mengalami kekalahan, sehingga ibukota kerajaan itu berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada 30 Juli 1905. Kekalahan yang dialami oleh laskar Bone tersebut, memaksa dewan peperangan memutuskan untuk mengungsikan Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri ke daerah pedalaman. Bahkan dalam perkembangannya, raja Bone bersama laskarnya terpaksa harus meninggalkan wilayah kekuasaan Bone untuk melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda.

Setelah kurang lebih empat bulan laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda, keluar masuk hutan, naik turun gunung, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, akhirnya terjadilah pertempuran yang menentukan di Pegunungan Awo pada 18 November 1905. Pada pertempuran sengit tersebut, Abdul Hamid Petta Ponggawae gugur sebagai kusuma bangsa bersama puluhan orang laskar Bone. Sementara Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri ditangkap oleh pasukan Belanda. Dengan alasan demi keamanan dan ketertiban, ia kemudian diasingkan ke Bandung oleh pemerintah Belanda. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa perlawanan rakyat Bone terhadap Belanda telah berakhir. Oleh karena sisa-sisa laskar Bone yang tidak mau menyerah, tetap melanjutkan perlawanan melalui perang gerilya, terutama

di daerah Bone bagian selatan. Perlawanan rakyat di daerah Bone Selatan, baru dapat dipadamkan atau berakhir setelah La Temmu Page Arung Labuaja tertangkap pada 1908. Dengan berakhirnya perlawanan di daerah Bone Selatan, maka dapat dikatakan bahwa perlawanan Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae terhadap pendudukan militer Belanda ketika itu telah sampai titik akhir.

Implikasinya, Kerajaan Bone terpaksa harus dibubarkan dan seluruh wilayah kekuasaannya menjadi daerah jajahan dari pemerintah Belanda. Oleh karena itu, maka terbulah babakan baru dalam lembaran sejarah Bone, yaitu berakhirnya sistem pemerintahan kerajaan dan berlakunya sistem pemerintahan kolonial (Hindia Belanda).¹ Wilayah Bone di bagi menjadi tiga *onderafdeling*, yaitu *Onderafdeling* Bone Utara, *Onderafdeling* Bone Tengah, dan *Onderafdeling* Bone Selatan. Masing-masing *onderafdeling* ini dipimpin oleh seorang pejabat Belanda yang disebut dengan *Controleur*. Sementara kerajaan-kerajaan yang telah membantu perlawanan Bone terhadap pendudukan militer Belanda, seperti Gowa, Wajo, Soppeng, dan Sidenreng menjadi sasaran penaklukan dari pasukan ekspedi militer Belanda berikutnya. Meskipun pada awalnya kerajaan-kerajaan itu memberikan perlawanan, tetapi pada akhirnya satu demi satu kerajaan-kerajaan itu berhasil ditaklukkan dan menjadi jajahan pemerintah Belanda.

Selain itu, perlawanan laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae terhadap serangan pasukan Belanda pada 1905, telah menimbulkan akibat jatuhnya korban yang

¹ Namun dalam perkembangannya, sistem pemerintahan kerajaan dipulihkan kembali pada tahun 1931, ketika pemerintah Hindia Belanda gagal atau tidak berhasil menundukkan rakyat sepenuhnya.

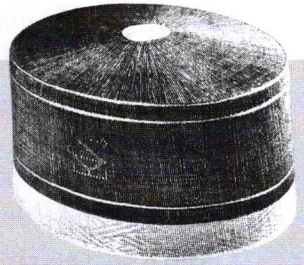
tidak sedikit, baik itu dalam bentuk korban harta benda, maupun korban jiwa manusia. Kurang lebih 1000 orang laskar Bone gugur sebagai kusuma bangsa di medan pertempuran, termasuk sekitar 100 orang dari kalangan bangsawan tinggi Bone dan Abdul Hamid Petta Ponggawae sendiri, yang telah mengantarkan kepergiannya untuk selama-lamanya. Korban yang jatuh itu, baik berupa harta benda, apalagi korban jiwa manusia, tentu saja memberikan akibat yang menyedihkan dan memiluhkan. Tidak sedikit wanita yang menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim, bahkan yatim piatu karena ditinggalkan oleh suami atau ayah mereka yang meninggal atau gugur di dalam pertempuran. Di samping itu, tidak sedikit pula yang menjadi cacat seumur hidup, dan harus merasakan kehidupan yang menyengsarakan di dalam penjara atau di tempat pengasingan. Termasuk Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri sendiri, yang menjadi tawanan perang di tempat pembuangan atau pengasingan yang menyengsarakan dan tidak menyenangkan sampai akhir hayatnya. Kesemuanya itu merupakan akibat dari perlawanan mereka dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda, demi untuk membela martabat dan kehormatan bangsa dan tanah airnya.

Walaupun demikian, perlawanan laskar Bone yang dipimpin oleh Abdul Hamid Petta Ponggawae terhadap pendudukan militer Belanda pada 1905, mempunyai makna penting dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya dalam perlawanan menentang kekuasaan Belanda. Sebab, bukan hanya merupakan suatu bukti bahwa ekspedisi militer Belanda ketika itu, mendapat perlawanan sengit dari laskar Bone di bawah pemimpin-pemimpinnya. Setiap tanah yang berhasil direbut pasukan Belanda, selalu dipertahankan mati-matian hingga tetes darah yang terakhir oleh laskar Bone. Akan tetapi juga merupakan suatu bukti bahwa semangat

perjuangan laskar Bone dalam melawan kekuasaan Belanda, tidak pernah padam atau tetap berkobar hingga awal abad ke-20. Kekalahan yang mereka alami dalam perang dengan Belanda pada 1824 –1825, perang pada 1857-1859, dan perang pada 1859-1860, tidak membuat mereka jera, apalagi takut menghadapi Belanda. Justru kekalahan demi kekalahan yang mereka alami itu, membuat mereka semakin gigih dan teguh dalam pendirian untuk terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu, perlawanan laskar Bone di bawah pimpinan Abdul Hamid Petta Ponggawae dalam menentang kekuasaan Belanda tersebut, mempunyai makna historis yang patut untuk direnungkan dan dipahami di dalam membangun kekinian dan hari esok kita.

Abdul Hamid Petta Ponggawae kini telah tiada, tetapi nama dan jasa-jasanya tetap akan dikenang sepanjang masa. Ia adalah seorang panglima perang yang pantang menyerah dan patriotik sejati yang konsekuen terhadap prinsip perjuangan sampai akhir hayatnya. Bahkan ia tidak segan-segan mengorbankan seluruh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan tanah airnya. Kepemimpinan dan sikap perjuangannya merupakan suriteladan dan telah menimbulkan kesan positif dalam kehidupan masyarakat, sehingga ia telah meninggalkan karya sejarah yang tetap akan dikenang oleh masyarakat, khususnya di kawasan Sulawesi Selatan. Banyak pemimpin yang kita miliki, tetapi hanya sedikit yang dapat membuat karya sejarah untuk bangsa dan tanah airnya. Oleh karena itu, kepemimpinannya, sikap dan prinsip perjuangannya serta patriotismenya yang mengandung nilai-nilai luhur patut dikenang dan diteladani oleh kita semua dalam mengisi kemerdekaan di era reformasi sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA



- Abduh, Muhammad. 1985. *Sejarah Perjuangan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Dekdibbud.
- Abdullah, Hamid. 1991. *Andi Pangerang Petta Rani Propil Pimpinan Yang Manunggal Dengan Rakyat*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Abdullah, Taufik. 1982. *Sosial Budaya Sebagai Faktor Dalam Peristiwa Sejarah Pantulan Dari Sulawesi Selatan*. Makalah pada Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Dalam Menentang Penjajahan Asing.
- Ali, Andi Muh. 1984. *Rumpa'na Bone (Perang Bone) 1905*. Watampone: Damai.
- Ali, Andi Muh. 1986. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Damai.
- Ali, Andi Muh. 1990. *Transkrip Tolo Rumpa'na Bone*. Watampone: Depdikbud.
- Amir, Muhammad. 2001. Baso Pagilingi Abdul Hamid (Petta PonggawaE) Profil Patriotik Yang Konsekuensi Hingga Tetesan Darah Yang Terakhir, dalam *Buletin Bosara No, 17, Thn. VIII*. Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Amir, Muhammad. 2003. *Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905*. Makassar: Eramedia.
- Amir, Muhammad, dkk. 2012. *Konflik dan Perubahan Sosial, Kajian Sejarah Perlawanan Tiga Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan Abad XIX*. Makassar: de la macca.
- Andaya, Leonard Y. 2004. Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17. Makassar Innawa. Terjemahan dari *The Heritage of Arung Palakka*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Arfah, Muhammad, 1997. *Baso Pagilingi Abdul Hamid Panglima Besar Kerajaan Bone Melawan Belanda*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Arfah, Muhammad dan Mauhammad Amir. 1993. *Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Propil Nasionalis dan Patriotik Sejati Yang Konsekuhan Terhadap Republik Indonesia*. Ujung Pndang: Depdikbud.
- Arsip Bone No. 5 (1, 2, dan 3). Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip Bone, No. 13 (1 dan 2). Koleksi Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip NIT (Negara Indonesia Timur), No. 110. Koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arung Manadjeng, Andi Malla. 1967. *Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Rumpakna Bone (Perang Bone) 1905*. Ujung Pandang: Team Penelitian Sejarah Bone.
- Bakkers, J. A. 1866. "Het Leenvorstendom Boni," dalam *Tijdschrift voor Nederlandsche-Indie (TNI)*, XV.
- Daeng Patunru, Abd. Razak. 1983 *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Daeng Patunru, Abd. Razak. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

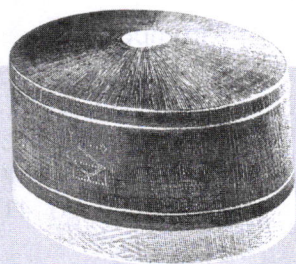
- Ernawati. 1997. *Perjuangan Baso Pagilingi Abdul Hamid Menentang Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Kerajaan Bone Pada Tahun 1905*. Ujung Pandang: Skripsi IAIN Alauddin.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1973. *Beberapa Ungkapan Dalam Lontarak Tentang Kepemimpinan dan Pemerintahan*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Friedericy, H. J. 1933. "De Standen bij de Boeginezen en Makassaren", dalam *Bijdragen tot de Taal, Landen en Volkenkunde van Nederlandsche Indie (BKI)*, No. 90.
- Friedericy, H. J. 1991. *Sang Jenderal*. Jakarta : Grafitti, Cetakan Pertama.
- Gonggong, Anhar. 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Yogyakarta: Ombak, Edisi Revisi.
- Gottschalk, Louis, 1986. *Mengerti Sejarah* (terj). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hamid, Pananrangi. 1995. *Transliterasi dan Terjemahan Naskah Kuno Bugis Tolok Rumpa'na Bone*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hadimulyo. 1979. *Sejarah Kuno Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Suaka Sejarah dan Purbaka.
- Hamzah, Aminah P. 1984. *Monografi Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Hamzah, Aminah P. 1993. *Biografi Pahlawan La Pawawoi Karaeng Segeri*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Mudzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti.
- Himpunan Biografi Empat Pahlawan Daerah Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Kadir, Harun, 1978. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.

- Kadir, Harun, dkk., 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Ujung Pandang : Hasil Kerja Sama BAPPDE TK. I Prop. Sulawesi Selatan dengan Unhas.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kies, Ch., 1935. *De Expeditie naar Zuid Celebes in 1905*. J.G. BGN. I.
- Kielstra, E.B. 1910. *Kumpulan Artikel*, Koleksi Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kroesen, C. A. 1906. *Memorie van Overgave van het Bestuur Over Het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, 1906*. Koleksi Arsip Nasional, Jakarta.
- Leur, J. C. van dan F. R. J. Veroeven, 1974. *Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Kumpulan Artikel, Koleksi Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mappangara, Suriadi, 1996. *Kerajaan Bone Abad XIX: Konflik Kerajaan Bone – Belanda 1816-1860*. Yogyakarta: Tesis Program Pasca-sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Mattulada. 1985. *Latoa Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mattulada, 1989. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Morris, D. F. van Braam, 1890, *Het Landschap Loehoe, Getrokken uit een rapport van den Gouverneur van Celebes, den her* (diterjemahkan oleh Mappasanda, H.A.M., 1992. *Kerajaan Luwu, Menurut Catatan Van Braam Morris*). Ujung Pandang: Depdikbud.
- Morris, D.F. van Braam. 1993. *Kerajaan Masserempulu*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Notosusanto, Nugroho 1978, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu.
- PaEni, Mukhlis. 1986. "Landasan Kultural Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar", dalam *Dinamika Bugis Makassar*. Ujung Pandang: PLPIIS.
- PaEni, Mukhlis, dkk. 2002. *Batara Gowa, Messianisme Dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Patang, Lahajdji. 1976. *Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya*. Jakarta: YKGM.
- Pawiloy, Sarita. 1987. *Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang : DHD 45 Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pemda, 1993. *Selayang Pandang Kabupaten Dati II Bone*. Watampone: Bappeda Tingkat II Bone.
- Perelaer, M.T. H., 1872. *De Bonische Expeditien Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860*. Leiden: Gualth. Kolff, eerste deel.
- Poelliggomang, Edward L. 1980. *Perlawanan Rakyat Gowa Terhadap Pendudukan Belanda*. Yogyakarta: Thesis Sarjan Universitas Gadjah Mada.
- Poelliggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Gramedia.
- Poelliggomang, Edward L. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Jakarta: Ombak.
- Reid, Anthony. 2007. *Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sagimun MD. 1964. *Perang Sulawesi Selatan*. Jakarta: Penelitian Museum Sejarah Tugu Nasional.
- Sagimun MD. 1976. *Haji Andi Mappanyukki Raja Bone XXXII*.

- Jakarta: Depdikbud.
- Sagimun MD. 1976 *La Pawawoi Karaeng Segeri Raja Bone XXXI*. Jakarta Depdikbud.
- Salim, Muhammad. 1991. *Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Telok Rumpakna Bone*. Ujung Pandang: Depdikbud.
- Shahib, M. Roem. 1980. *Bone Kartu Mati Bagi Perjuangan Merah Putih di Sulawesi Selatan Pada Tahun 1945-1950*. Ujung Pandang: Skripsi Sarjana Unhas.
- Sejarah Pahlawan-Pahlawan Daerah Sulawesi Selatan*. 1982. Ujung Pandang: Depdikbud, BKSNT.
- Sulistyo, Bambang. 1992. *Konflik Kerajaan dan Dampaknya di Sulawesi Selatan*. Makalah pada Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur, di Malino.
- Sumber Arsip, 1971. *Staakundig Overzicht van Nederlandsch Indie 1837* (Laporan Politik Tahun 1837). Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 4.
- Sumber Arsip, 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Arsip Nasional Republik Indonesia, No. 5.
- Tideman, J. 1935. "*Het Landschap Bone*", dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land-en Volkenkunde (TNAG)*, Bagian LII.

INDEKS



A

ade asseajingeng 39

Ade Pitu 7, 12, 28, 67, 70, 77, 82, 83, 84, 94, 101, 102, 105,
107, 108, 118, 125, 141, 153

Alfred Thayer Mahan 34

Alitta 4, 39

Amali 11, 133

Amas Madinah 72, 73, 74

ambe 40

ambo 40

amure 40

Anakarung 38

anak cerak 38, 50

anak pattola 26, 27, 38, 50, 64, 69, 83, 158

anak rajeng 38, 50

Anang 25

anaure 40

anri 40

Anro Biring 26

Apala 27, 82, 83, 84, 85

Arab 48

arajang 141

Argus 117

arumpone 24
 Arumpugi 79
 Arung Ajjalireng 59
 Arung Apala 82, 83, 84, 85
 Arung Baringeng 41, 124
 Arung Bengo 41, 109, 123,
 127
 Arung Cenrana 41, 108, 124
 Arung Data 60, 77, 78, 79
 Arung Kahu 68, 140
 Arung Labuaja 41, 109, 138,
 140, 152, 161
 Arung Lita 69, 158
 Arung Lompu 77
 Arung Macege 70, 108, 124,
 158
 Arung Mampu 72, 73, 74, 85
 Arung Manajeng 107, 109,
 111, 119, 123, 124,
 125, 126, 127, 129,
 131, 132, 134, 135,
 136, 137, 142, 148
 Arung Mangempang 59
 Arung Maroanging 41, 109
 Arung Melle 41, 109, 123,
 127
 Arung Palakka 20, 29, 39, 59,
 69, 72, 73, 75, 77, 95,
 158, 166
 arung palili 8, 106, 107, 110
 Arung Pannyili 79
 Arung Peneki 71
 Arung Sijelling 59, 85, 109,
 124
 Arung Tonra 41, 140
 Asahan 117, 151

asseajingeng 39, 41, 42
 assiteppa-teppangangeng 40
 ata 37, 38, 48, 49
 ata mabuang 38
 ata mana 38
 ata puppu 38
 Awampone 27, 32
 Awo 12, 15, 63, 70, 142,
 145, 146, 147, 148,
 149, 150, 151, 160

B

BabauwaE 27
 baine 40
 BajoE 7, 9, 10, 11, 33, 35,
 47, 60, 61, 78, 80, 81,
 87, 92, 94, 97, 99, 101,
 102, 105, 110, 111,
 115, 116, 117, 118,
 119, 120, 121, 122,
 124, 125, 126, 127,
 128, 129, 130, 133,
 143, 158, 159
 Bakke, 27
 Balangnipa 100, 136, 137,
 138, 139
 Bandung 12, 59, 151, 160
 Bangkung 83, 84, 85
 Bantaeng 75, 78, 81, 95
 Barebbo 27, 30, 32, 120
 Barru 39, 59, 78, 84, 158,
 185
 Batara Gowa 4, 72, 73, 74,
 169
 Batari 68
 Batavia 5, 47, 61, 74, 78, 79,

81, 90, 151
 Bawakaraeng 31
 Bellu 140, 153
 Bengo 31, 41, 100, 109, 123,
 127
 Besse Kajuara 61, 62, 79, 80,
 81, 82
 bila-bila musu' 8, 106
 Biru 26
 Bolong Kahu 149
 bondgenootschap 82
 Borneo 117
 Braam Morris 82, 83, 84
 Brak 117
 Bromo 117
 Brugman 7, 73, 94
 Bulukumba 9, 75, 78, 81, 95,
 116
 Bungasutera 82, 83, 84, 85

C

Camba 100, 137
 Capellen 77
 Cellu 26, 102, 108, 110, 125,
 126, 127, 128, 129, 142
 Cenrana 8, 28, 31, 32, 34,
 41, 46, 71, 101, 108,
 111, 118, 119, 124,
 137, 138, 143
 cerak 38, 50
 Cerowali 27
 Chasses 76
 Ch. Kies 128
 Cina 32, 34, 48, 101, 109,
 126
 Cinennung 11, 132, 134

Citta 142
 Controleur 161
 Coppoleang 130, 131
 Cramer 7, 94
 C. van Loenen 63

D

Daeng Malinta 125, 127, 150
 Daeng Mallongi 120, 150
 Daeng Mamile 150
 Daeng Mattengnga 119, 125,
 150
 Daeng Palawa 150
 Daeng Tamene 38, 59, 158
 Danau Tempe 31
 Datu Cinnong 68, 132, 150,
 151
 Datu Larompong 71, 86
 De Goen 117
 de onrust eiland 4, 95
 De Ruyter 117
 devide et impera 83
 dewata 21, 50
 Diponegoro 61, 78
 Dulung 41, 85, 100, 101,
 108, 109, 124, 125,
 127, 136, 140, 141

E

Edward L. Poelinggomang 34
 Ellungmangenre 100
 emma 40
 Enrekang 66, 71, 86
 etta 40

F

Fatimah 59, 70

Filipina 47

Friedericy, H.J. 37

fuseliur 128

G

Goedhart 7, 94

Gona 31, 109

Gottang 11, 134, 135, 136,
137

H

Hendrik 117

Hertog 117

heuristik 16

historiografi 17

I

I Ceppi 68

I Kalau 59

I Karimbo 38, 59, 158

Impakimpa 109, 123, 127,
142, 143

I Munca 59

India 48

indo 40

Inggris 45, 54, 76, 77, 96

ipa' 41

I Samateppa 25

I Sangkilang 72, 73

J

Jawa Barat 9, 115

Jawa Tengah 9, 115

Jawa Timur 9, 115

J. B. van Heutsz 89, 91, 92

J. J. van Geen 60, 78

K

Kajao Laliddong 27, 50, 51,
52

Kaju 27, 59, 109

Kajua 32, 33, 34, 47, 61,
62, 79, 80, 81, 82

kalampoang 73, 74

Kalling 31

Kalu 11, 133

Kapitang Kaju 59

Karaeng Katangka 72

Karaeng Popo 69, 83, 84, 85

Karaeng Segeri 7, 10, 11, 12,
38, 39, 41, 59, 70, 71,
83, 84, 85, 86, 98, 99,
101, 102, 103, 104,
105, 111, 117, 118,
127, 129, 130, 131

Karampelua 27

Kerajaan TellumpoccoE 28,
29

Koningin 117

Kontrak Bungaya 3, 58, 78,
80, 82, 182

korte verklaring 3, 5, 7, 91,
92, 94, 98, 114, 115,
159

Kroesen, C.A. 5

L

Labbakkang 60

lakkai 40

Lalebbata 8, 29, 60, 62, 63,
78, 80, 98, 100, 106,

110, 120, 126, 127,
 128, 129, 130, 131,
 132, 133, 137, 160
 Laliku 11, 133
 La Mappaewa 77
 La Mappaseling 79
 La Mappasessu 27
 La Mellong 27
 Lampoko 27
 Lamuru 31, 32, 67, 100, 101,
 109, 141
 Lannoy 117
 Lanreseng 120
 Lantimojong 31
 La Pabbenteng 68
 La Padassajati 69
 La Parenrengi 79
 La Pawawoi 7, 10, 11, 12, 38,
 39, 41, 59, 63, 70, 71,
 83, 84, 85, 86, 98
 Lapitu 31
 La Saliyu 26, 27
 La Singkeru Rukka 69
 La Temmu Page 41, 68, 109,
 138, 140, 152, 161
 La Tenrirawe BongkangE 27
 La Tenrirua 69
 La Tenri Sukki 27
 La Tenritappu 72, 73, 74, 75,
 76, 77, 95, 96
 La Tenritatta 29, 72, 75, 77,
 95
 lato' 40
 La Uliyo Bote'E 27
 La Umassa 25, 26
 leevorstendom 82

Lemoape 109, 127
 lise pajung 101
 Lompu 27, 77
 lontarak 16, 64
 Lowa 143
 Luwu 3, 5, 28, 31, 39, 61, 85,
 90, 106, 144, 168

M

Makassar iv
 Makkadang Tanah 27
 Malaka 47
 malempu' pi 50
 Mallisujawa 72, 73
 Mampu 31, 72, 73, 74, 85,
 108
 Manapotu 11, 133
 Mandar 4, 186
 mangkau 50, 59, 158
 marchaussee 147
 Mare 30, 32, 33, 47, 100,
 109, 141, 153, 185
 Mario ri Awa 31
 Mario ri Wawo 31
 Maros 30, 60, 75, 78, 95,
 101, 117, 118
 MatasilompoE 25
 Matowa 22, 25, 26, 28
 Matowa Macege 25
 Matowa Pitu 25, 26, 28
 Matowa Ponceng 25
 Matowa Ta' 25
 Matowa Tanete ri Attang 25
 Matowa Tanete ri Awang 25
 Matowa Tibojong 25
 Matowa Ujung 22, 25

- MattanrasullaE 41
 matua 41
 Mayor Kroesen 62
 Melayu 48
 Melle 27, 41, 48, 109, 123,
 127
 Muhammad Siji 68
- N**
- nenek 40, 73
 Nusantara 4, 47
- O**
- Otu 11, 133
- P**
- padakkunrai 40
 padarane 40
 Pajalele 119, 143
 Palakka 20, 26, 27, 29, 32,
 39, 59, 69, 72, 73, 75,
 77, 95, 101, 127, 129,
 130, 131, 135, 158, 166
 Pallengoreng 27
 Palette 33
 Pallime 7, 8, 32, 33, 34, 35,
 47, 87, 92, 97, 99, 105,
 107, 111, 114, 115,
 118, 119, 138, 143,
 158, 159
 Palongki 11, 133
 Pamandeng Rukka 62
 pangadereng 39
 Pangkajene 60, 75, 78, 95
 Pangkep 30
 Parenrengi 68, 79
 Parippung 125, 127
 Pasempe 10, 11, 27, 61, 62,
 80, 81, 131, 132, 133
 Pattanra Wanua 25, 26
 Pattiyo 8, 10, 27, 33, 47, 101,
 107, 109, 111, 118,
 119, 120, 121, 125, 159
 pesse 42, 43, 44, 45, 65
 Petta Sagala 59
 Petta Tungke 59
 Pette Mene 38, 59
 Pitumpanua 12, 144, 145
 Pitu Riase 146
 Pompanua 12, 144, 153
 ponggawa 10, 70, 71, 72, 99,
 102, 158
 Ponre 11, 27, 32, 109, 124,
 126, 127, 128, 136,
 137, 139, 141
 puang 40, 135
 pude 47
 Pulau Jawa 61, 135
- R**
- Raja Bagusu 149
 Rappang 4, 151
 Regentes 117
 Reijke 73
 Residen Philips 76
- S**
- Sailon 72
 Salakang 31
 Salomekko 32, 33
 sappokadua 41
 sappokatellu 41

sapposiseng 41
 Sawerigading 21
 Sawitto 4, 6, 39, 186
 seajing 40
 seajing mabela 40
 seajing mareppe 40
 Semarang 9, 115
 Sengakang 31
 Serdang 117
 siakkalabinengeng 39
 Sidenreng 4, 8, 10, 39, 41,
 106, 128, 132, 144,
 145, 146, 147, 153,
 161, 181
 Singapura 47, 100
 Singkeru Rukka 59, 69, 82,
 83, 85
 Sinjai 30, 75, 78, 81, 85, 95,
 100, 136, 137, 139,
 140, 141
 siri' 42, 43, 44, 45, 55, 103,
 104
 Soekarno 2
 Soeland 117
 Soga 27
 sompung lolo 40
 Soppeng 4, 8, 10, 28, 29,
 30, 31, 33, 39, 41, 100,
 106, 132, 141, 142,
 143, 144, 145, 153,
 161, 185
 Steinmetz 61, 79, 80
 Sudanga 73
 sugi' pi 51
 Sultan Zainuddin 72, 73, 74
 Suppa 4, 39, 62, 81

Surabaya 9, 47, 115

Swieten 62, 81

T

Tamping 31
 Tanah Toraja 15, 66, 71, 86,
 142
 Tanete 4, 25, 27, 30, 31, 32,
 60, 70, 78, 107, 108,
 124, 125, 181
 Tanjung 9, 11, 107, 115, 133
 Tanjung Priok 9, 115
 Tarapong 31
 Tegal, 47
 Teluk Bone 9, 30, 46, 74, 94,
 106, 107, 116, 122
 Temmasongeng 72
 Tempe 31, 142
 Tenriawaru 25, 79
 Tenripadang 84
 Tenri Salago 25
 Tjantik II 117
 To Appatunru 69, 77
 todeceng 38
 Tomanurung 21, 22, 23, 24,
 25, 26, 37
 tomaradeka 37, 48, 49
 tomarilaleng 84
 Tonra 30, 32, 41, 109, 140
 To Salawakka 26
 tosama 38
 To Suwalle 26, 27

U

Ujung 4, 8, 9, 10, 11, 21, 22,
 25, 29, 31, 33, 42, 49,

50, 59, 61, 62, 65, 69,
 70, 89, 103, 104, 107,
 108, 111, 116, 117,
 118, 119, 120, 121,
 125, 143, 145, 153,
 159, 166, 167, 168,
 169, 170, 178, 182, 184
 Ujung Pattiro 8, 10, 111, 118,
 119, 120, 121, 125, 159
 Ulaweng 11, 32, 133

V

Van der Wedden 117
 van Heutzs 6, 90, 91
 vertiening 75, 96

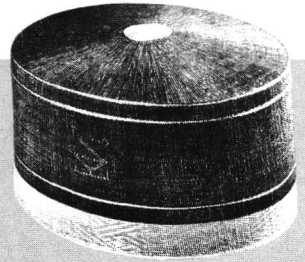
W

Wage 142
 Wajo 4, 8, 10, 12, 28, 29,
 30, 33, 39, 41, 71, 101,
 106, 109, 123, 127,
 128, 132, 138, 142,
 143, 144, 145, 153, 161
 WalanaE 31, 32, 46, 48
 Wanua 25, 26
 waranipi 51
 Watampone 8, 10, 11, 20,
 21, 29, 32, 60, 61, 62,
 63, 65, 67, 78, 80, 81,
 98, 100, 106, 110, 118,
 120, 127, 128, 129
 We Arattiga 25
 We Benrigau 27
 We Maniratu 60, 77, 78, 79
 We Tenri Tappu 28
 Wijs 139, 140
 W. Roosemboom 6, 89

Y

Yabe 59

LAMPIRAN



PEMBAHARUAN KONTRAK BUNGAYA 1824 **(*Verniewd Bongaijasch Kontract*)**

Pasal 1

Akan selalu berlangsung perdamaian. Persahabatan, persekutuan antara pemerintah Belanda dan raja-raja Sulawesi yang telah disebutkan

Pasal 2

Pemerintah (Hindia Belanda) adalah pemimpin utama dari persekutuan, dan perantara dan pelindung dari persekutuan itu

Pasal 3

Mutlak tidak akan ada yang superioritas diantara sekutu-sekutu lainnya tetapi sekutu- sekutu itu dinyatakan sebagai penguasa yang merdeka dan berdaulat, tidak ada perbedaan diantara sekutu-sekutu itu, kecuali penyebutan saudara tua dan saudara muda.

Pasal 4

Raja-raja dari Bone dan Makassar dipandang sebagai anggota tertua dari persekutuan ini.

Pasal 5

Sahabat dari Pemerintah (Hindia Belanda) menjadi sahabat dari kerajaan-kerajaan sekutu, dan musuh dari pemerintah juga dipandang menjadi musuh kerajaan-kerajaan sekutu, yang mana mereka sepakat mengerahkan rakyat dan senjata untuk menentanginya.

Pasal 6

Anggota dari kerajaan-kerajaan sekutu saling menjamin daerah kekuasaannya masing-masing, yang dalam waktu yang singkat akan menetapkan secara tepat dan berlandas pada kesepakatan luas dan batas-batas wilayah kekuasaannya masing-masing.

Pasal 7

Semua perselisihan antara kerajaan-kerajaan sekutu harus diputuskan kerajaan-kerajaan sekutu, yang akan berkedudukan di Ujung Pandang. Dewan ini dipimpin oleh Gubernur dan sejumlah raja-raja dari kerajaan sekutu atau memperoleh kuasa penuh, seperti tiap raja akan dipilih, yang dikirim untuk penyelesaian perselisihan

Pasal 8

Penyelesaian menyangkut semua perselisihan kecil, baik tentang perdagangan maupun yang lainnya, setiap kerajaan sekutu akan menempatkan seorang wakil yang mendapat kuasa penuh secara permanen di Ujung pandang.

Pasal 9

Raja-raja kerajaan sekutu menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak akan saling berperang, tetapi mengajukan perselisihan mereka kepada dewan kerajaan sekutu dan mematuhi keputusan dari (dewan) kerajaan sekutu, sanksi hukuman yang ditangani dengan cara lain dipandang sebagai musuh oleh persekutuan kerajaan sekutu.

Pasal 10

Untuk membendung hasrat membunuh dan untuk melakukan pembalasan dendam sendiri yang masih umum terjadi diantara penduduk

Sulawesi, maka pada kesempatan ini dinyatakan dengan hikmat, dan oleh setiap penguasa kerajaan-kerajaan sekutu dinyatakan sebagai suatu hukum yang berlaku dalam negerinya, bahwa tidak akan dilakukan lagi pembunuhan atau penganiayaan yang berakibat kematian ditebus dengan denda berupa uang, dan bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan seperti itu, tanpa membedakan orang, semua orang termasuk keluarga kerajaan, sesuai dengan hukum-hukum dari Al Quran, akan dihukum berat, tidak boleh ada orang yang melakukan pembunuhan, baik atas perintah dari raja maupun para Dewan Kerajaannya.

Pasal 11

Juga raja-raja berjanji akan menghapuskan semua jenis hukuman yang menghilangkan salah satu anggota badan di kerajaan mereka masing-masing, yang hanya merugikan penduduk dan akan memperbanyak kemiskinan.

Pasal 12

Untuk semua perselisihan yang terjadi tentang hukuman terhadap penjahat dengan tegas dinyatakan bahwa setiap penjahat akan dihukum menurut peraturan hukum pada negeri itu dan di negeri di mana ia melakukan kejahatan, tetapi harus dengan sepengetahuan dari penguasa yang syah dari pelaku kejahatan itu. Orang-orang Kristen hanya akan dikenakan hukuman oleh orang Kristen.

Pasal 13

Pada akhirnya untuk memperbaiki kondisi kemiskinan yang menyedihkan dan menyengsarakan penduduk Sulawesi, raja-raja dari kerajaan-kerajaan sekutu berjanji akan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mendorong rakyatnya meningkatkan usaha pertanian dan terutama mengusahakan semua produksi pertanian untuk perdagangan. pemerintah (Hindia Belanda) berjanji sedapat mungkin, dalam hal ini, memberikan dukungan kepada semua perusahaan petani.

Pasal 14

Penduduk dari kerajaan-kerajaan dan negeri-negeri yang berada dalam

kekuasaan kerajaan-kerajaan sekutu diperbolehkan untuk melakukan pelayaran perdagangan ke mana saja dengan syarat membawa surat izin berlayar dari pemerintah Belanda di Sulawesi dan mentaati semua peraturan menyangkut pajak impor dan ekspor dalam pelayaran dan perdagangan yang akan diterapkan oleh pemerintah (Hindia Belanda).

Pasal 15

Untuk pengawasan lebih lanjut dari ketentuan dalam dua pasal terdahulu itu dan untuk memudahkan pedagang-pedagang, Governemen akan memiliki hak, yang berupa semacam persetujuan atas perundingan dengan raja-raja, mendirikan suatu bangunan yang permanen, yang mana raja-raja berjanji akan memberikan bantuan dengan menyerahkan material dan tenaga kerja dengan pembayaran imbalan yang pantas.

Pasal 16

Pada akhirnya persahabatan antara kerajaan-kerajaan sekutu dengan Governemen dijalin lebih kuat, raja-raja menyatakan tidak akan mengirim duta ke atau menerima duta dari negara-negara asing, juga tidak melakukan korespondensi dengan penduduk negara asing tanpa sepengetahuan Governemen.

Pasal 17

Semua mata uang emas dan perak dan tembaga yang berlaku di Jawa akan berlaku juga di seluruh pesisir Sulawesi.

Pasal 18

Untuk menghindari terjadinya perselisihan-perselisihan dan peristiwa-peristiwa berdarah yang sering kali terjadi ketika kematian seorang raja seperti ditetapkan sebagai suatu hukum yang pasti dan telah berlangsung berabad-abad, maka ketika setiap raja yang memerintah masih hidup, menurut tradisi dan kebiasaan dari setiap kerajaan, akan mengangkat seorang (calon) pengganti untuk menggantikan raja sesudah kematiannya. Pengganti itu akan menikmati tanda penghargaan dengan kedudukan raja muda atau seperti di tempat lain dengan kedudukan sebagai putera mahkota. Pemilihan seorang pengganti akan dengan

segera diberitahukan kepada Pemerintah (Hindia Belanda, pen.) dan semua anggota dari persekutuan, Apabila terdapat beberapa alasan yang mendasar, mengapa orang yang ditetapkan menjadi pengganti di salah satu kerajaan tidak mendapat persetujuan dari anggota persekutuan maka pemerintah dari kerajaan itu berkewajiban untuk mentaati pendapat Pemerintah dan anggota persekutuan.

Pasal 19

Tidak seorang pun dalam persekutuan ini, sesudah kontrak ini akan diputuskan akan diperkenankan membatalkan persetujuan dari Dewan persekutuan itu.

Pasal 20

Pemerintah (Hindia Belanda, pen.) akan membuat kontrak secara terpisah dengan setiap kerajaan dari persekutuan ini tentang butir-butir itu sepanjang hanya memiliki kaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan-pengaturan.

Pasal 21

Selanjutnya raja-raja yang disatukan ini berjanji akan menunaikan secara religius Kontrak perdamaian, persahabatan, dan persekutuan ini, selanjutnya mereka berjanji akan bersama-sama memandang kerajaan yang menentang sebagai musuh dan akan membantu menghukumnya. Akhirnya mereka saling berjanji, dan terutama juga kepada Pemerintah (Hindia Belanda, pen.) akan memberikan bantuan dan dukungan penuh apabila hal itu dituntut.

Pasal 22

Semua pasal dan syarat-syarat yang dibuat dan diputuskan demi perdamaian, persahabatan, dan persekutuan yang abadi antara Pemerintah dari paduka tuan yang mulia raja Belanda dengan raja-raja dari kerajaan besar Makassar, Sidenreng, Tanete, Buton, Sanrabone, Binamu, dan Laikang, baik untuk diri sendiri maupun untuk kerajaan-kerajaan mereka, anak-anak mereka, dan kerurunan mereka kemudian juga untuk raja-raja yang lain, apabila setelah ini akan diminta untuk

bergabung dalam persekutuan ini, dengan itu (Bone, pen), dikenakan syarat-syarat yang tegas, bahwa apabila raja Bone, dalam dua bulan setelah kontrak ini diputuskan, tidak akan bergabung secara sukarela sendiri dalam persekutuan ini, maka akan kehilangan hak sebagai sekutu tertua untuk selama-lamanya.

Catatan:

- Naskah pembaruan Kontrak Bungaya dalam Bahasa Belanda yang diterjemahkan diambil dari buku, Sartono Kartodirdjo, dkk, *Ikhtisar Keadanr Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*, Jakarta. ANRI: Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5, hal. 294-797.
- Kontrak ini diputuskan di Benteng Jungpandang (Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam) pada 27 Agustus 1824.

UNIFORM MODEL KORTE VERKLARING

SOERAT IKRAR

Bahwa inilah ikrar raja mengakoe tiga jang terseboet di bawah ini ialah:

Fasal jang pertama

Bermoela ikrar raja bahwa sesoenggoehnja djadi soeatoe bahagian daripada Hindia Nederland, maka tajoeklah itoe kepada Keradjaan Belanda maka wadjiblah atas saja selamanya bersetia kepada Baginda Seri Maharadja Belanda dan kepada wakil Baginda, ia itoe Seri Padoeka jang dipertoean besar Goebornoer Djenderal Hindia Nederland, maka oleh Seri Padoeka jang dipertoean besar Goebornoer Djenderal dikaroeniakan kepada raja djabatan pemerintahan di dalam

Fasal jang kedoea

Moesoeh Baginda Seri Maharadja Belanda itoe moesoeh saja, begitoe djoega sohabat Seri Mahardja Belanda itoe sohabat saja adanja.

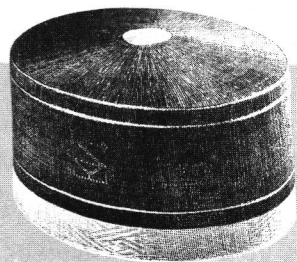
Fasal jang ketiga

Bahwa mengakoelah dan berdjandjilah saja bahwa sesoenggoehnja segala pengatoermoe hal bahwa ! baik jang telah diatoerkan baik jang akan ditoeroenkan oleh ataoe dengan nama Baginda Seri Mahardja Belanda ataoe Seri Padoeka jang dipertoean besar Goebornoer Djenderal Hindia Nederland ataoe wakilnja, semoea pengatoeran itoe saja hendak mendjalankan lagi segala perintah jang akan diperintahkan kepada saja baik oleh Seri Padoeka jang dipertoean besar Goebornoer Djenderal baik oleh wakilnja, semoea perintah saja itoe handak menoeroetkan djoega adanja.

Demikialah ikrar jang telah saja mengakoe dengan bersimpah di pada boelan taoen hijrah dan tersoerat tiga helai jang sama boenjinja.

Catatan : Dikutip dari Muhammad Arfah dan Muhammad Amir. 1993. *Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim, Profil Nasionalis dan Patriotik Sejati Yang Konsekuen Terhadap Republik Indonesia*. Ujung Pandang: Depdikbud, hlm.285-286.

TENTANG PENULIS

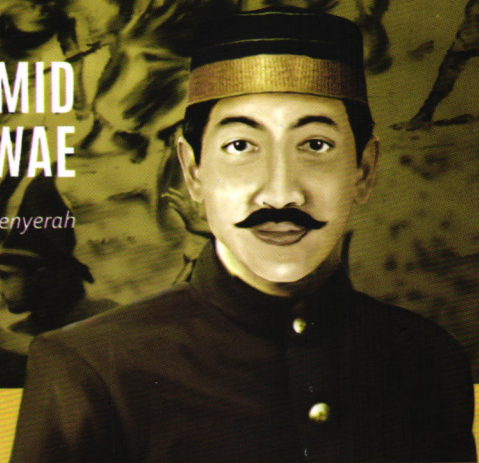


Muhammad Amir dilahirkan di Bone (Darampa), Sulawesi Selatan, tanggal 31 Desember 1966. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (1977) dan SMP (1981) di ArasoE, dan SMA di Mare pada 1984. Sarjana Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (1990), dan Pascasarjana Universitas Hasanuddin – Program Studi Antropologi – Konsentrasi Ilmu Sejarah (2011). Lulus Pelatihan Tenaga Teknis Kesejarahan Tingkat Dasar (2001) dan Tingkat Lanjutan (2003). Menjadi tenaga honorer pada Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kanwil Depdikbud Sulawesi Selatan (1990-1995), dan tenaga SP3 Bidang Kebudayaan di Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru (1996-1997). Staf peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Ambon (1998-2000), dan BKSNT Makassar (2000 hingga sekarang). Sejak tahun 1990 telah aktif dalam penelitian dan penulisan tentang aspek kesejarahan. Karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku baik tim maupun mandiri, antara lain; Biografi Panglima LAPRIS Ranggong Daeng Romo (1990), Biografi

Pahlawan Opu Daeng Risaju (1991), Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim (1993), Biografi Pahlawan Lanto Daeng Pasewang (1994), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan I (1995), Biografi Pahlawan La Siring, Bakkalolona Sawitto (1996), Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (2002), Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun 1905 (2003), Kerajaan Gowa Pada Abad XIX (2004), Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2 ((2005), Monumen Sejarah Perjuangan Bangsa di Sulawesi Selatan Jilid 2 (2005), Sejarah Polewali Mandar (2006), Biografi Pahlawan I Makkulau Sultan Husain (2007), Andi Abdullah Bau Massepe: Profil Patriot yang Konsekuen Hingga Tetesan Darah Terakhir (2008), Pahlawan Nasional Dari Sulawesi Selatan (2009), Kelaskaran di Mandar – Sulawesi Barat: Kajian Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (2010), Tiga Srikandi Dari Mandar – Sulawesi Barat (2011), Konfederasi Mandar: Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Barat (2011), Membela Republik Indonesia: Kajian Sejarah Perjuangan Kelaskaran Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan (2012), Konflik dan Perubahan Sosial: Kajian Sejarah Perlawanan Tiga Kerajaan Terhadap Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan (2012), Perlawanan Rakyat Ajatappareng: Kajian Sejarah Perjuangan Menentang Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1905-1906 (2013), dan Gerakan Mara'dia Tokape di Mandar – Sulawesi Barat Pada 1870-1873 (2014).

ABDUL HAMID PETTA PONGGAWAE

Profil Panglim yang Pantang Menyerah



Abdul Hamid adalah putra Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri dari hasil perkawinannya dengan I Karimbo Daeng Tamene, putri Arung Mengempang (Barru). Sebagai anak pattola bukan hanya dapat diangkat menjadi mangkau (raja) di Kerajaan Bone, tetapi juga sebagai arung (raja) di Kerajaan Barru.

Perlawanan Abdul Hamid Petta Ponggawae dalam menentang kekuasaan pemerintah Belanda, dilatari oleh akumulasi dari pertentangan-pertentangan antara Bone dengan Belanda. Mencapai puncaknya ketika Belanda bermaksud menguasai secara langsung Bone.

Terjadi pertempuran antara pasukan Belanda dan pasukan Kerajaan Bone. Pasukan Kerajaan Bone terdesak. Pasukan Belanda melakukan pengejaran terhadap raja Bone, akhirnya berhasil mengepung Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri bersama pengawalnya di Pegunungan Awo (Tana Toraja) pada 18 November 1905. Pada pertempuran tersebut, Abdul Hamid Petta Ponggawae gugur bersama puluhan laskar Bone. Sementara raja Bone ditangkap kemudian diasingkan ke Bandung oleh pemerintah Belanda.

ISBN: 978-979-3570-81-5



9 789793 570815

PUSTAKA
REFLEKSI

Andi
Wahua
Rumah Buku

Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5057064
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172
Email : refleksibooks@yahoo.co.id